

LAPORAN KINERJA

STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG



TAHUN 2025

SKIPM PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang (SKIPM Palembang), sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas atas pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian serta pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Sebagai UPT BPPMHKP di daerah, SKIPM Palembang berperan mendukung pelaksanaan kebijakan nasional melalui penyampaian capaian kinerja, tantangan, dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, serta mengharapkan masukan yang konstruktif guna peningkatan kinerja SKIPM Palembang ke depan.



Palembang, 15 Januari 2026

YOYOK FIBRIANTO, SE., S.Pi.,M.Pi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Stasiun KIPM Palembang mengemban mandat strategis dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil perikanan di wilayah Sumatera Selatan, sebagai bagian integral dari upaya mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan mandat tersebut diarahkan untuk memberikan nilai tambah yang nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menjamin mutu, keamanan, dan daya saing produk hasil perikanan. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Palembang berkomitmen memberikan keyakinan (assurance) kepada pimpinan kementerian bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, transparan, dan akuntabel, serta senantiasa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian tujuan strategis KKP, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut mengacu pada standar, pedoman, dan regulasi pengendalian mutu serta keamanan hasil perikanan yang berlaku, sehingga mampu menjamin konsistensi mutu layanan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPPMHKP Tahun 2025 adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif.” Keberhasilan pelaksanaan program ini didukung melalui pencapaian kinerja Stasiun KIPM Palembang yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (Program), yaitu:

1. Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Pengendalian Keamanan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar; dan
3. Pengawasan terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good

Corporate Governance) di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.

Ketiga sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id), capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,74 % dengan predikat Istimewa. Dari total 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sebanyak terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target. . Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta selaras dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik, yaitu mencapai Rp 5.240.368.818 atau 95,21 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000. Tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penggunaan sumber daya anggaran dinilai cukup efisien karena mampu mendukung pencapaian kinerja yang melampaui target, yang ditunjukkan melalui Skor Kinerja sebesar 114,74. Dengan demikian, kinerja keuangan dan kinerja program Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 secara keseluruhan menunjukkan sinergi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B.... Dasar Hukum	2
C.... Tugas dan Fungsi	3
D.... Agenda SKIPM Palembang	4
E.... Sumber Daya	5
F.... Dasar Pelaporan Kinerja.....	6
G.... Tujuan Pengukuran Kinerja	7
H.... Ruang Lingkup.....	7
I..... Waktu Pengukuran Kinerja	7
J..... Metodologi Pengukuran Kinerja	7
K.... Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
A.... Rencana Strategis KKP dan BPPMHKP Tahun 2025 – 2029.....	9
B.... Rencana Kinerja Tahunan	19
C.... Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	20
D.... Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A.... Pengelolaan Kinerja Stasiun KIPM Palembang	26
B.... Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang.....	26
C.... Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran.....	115
D.... Realisasi Rencana Aksi.....	116
BAB IV PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan.....	121
B. Rencana Perbaikan	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	5
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 (Awal)	21
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi)	22
Tabel 4.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	24
Tabel 5.	Penilaian Capaian Kinerja	26
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang	28
Tabel 7.	Target dan Realisasi IK 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	31
Tabel 8.	Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025	36
Tabel 9.	Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang.....	41
Tabel 10.	Target dan Realisasi IK3 Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	41
Tabel 11.	Target dan Realisasi IK4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025.....	46
Tabel 12.	Target dan Realisasi IK5 Nilai kualitas penerapan sistem	

	manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	49
Tabel 13.	Target dan Realisasi IK6 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai))	53
Tabel 14.	Target dan Realisasi IK 7 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2025)	66
Tabel 15.	Target dan Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025	72
Tabel 16.	Target dan Realisasi IK 9 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2024).....	78
Tabel 17.	Target dan Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2025.....	86
Tabel 18.	Target dan Realisasi IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai).....	92
Tabel 19.	Target dan Realisasi IK 12 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025.....	100
Tabel 20.	Target dan Realisasi IK 13 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	103
Tabel 21.	Target dan Realisasi IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025.....	108
Tabel 22.	Target dan Realisasi IK15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Tahun 2025	111
Tabel 23.	Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.....	115

Tabel 24.	Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja SKIPM Palembang Tahun 2025	116
Tabel 25.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025.....	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025	5
Gambar 2.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang 2025.....	27
Gambar 3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Palembang Tahun 2025.....	72
Gambar 4	Nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan pada Aplikasi SIDAK.....	98

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja ini menggambarkan keterkaitan antara perencanaan strategis, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP Palembang dalam mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Melalui laporan ini, disajikan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, sekaligus analisis atas tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran organisasi.

Selain sebagai media evaluasi internal, Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan berorientasi pada peningkatan mutu hasil kelautan dan perikanan. Evaluasi terhadap capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta penetapan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja BPPMHKP Palembang Tahun 2025, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis kinerja, serta memperkuat peran BPPMHKP Palembang dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi, penyusunan Laporan Kinerja ini menjadi instrumen penting dalam menilai tingkat pencapaian sasaran strategis, efektivitas pemanfaatan sumber daya,

serta kualitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.

B. DASAR HUKUM

SKIPM Palembang melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan
7. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2025
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor: 032.02.0/2025 tanggal 30 November 2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh rantai produksi, mulai dari hulu hingga hilir, guna menjamin produk kelautan dan perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP Palembang menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan sertifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai kewenangan, antara lain CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, serta cara penanganan ikan yang baik.
- Pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilans, serta pemantauan dan evaluasi penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha dan unit pemerintah di wilayah kerja.
- Pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian, pemeriksaan, dan dukungan teknis dalam rangka pengendalian mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penguatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kinerja di bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. AGENDA SKIPM PALEMBANG

Dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan, BPPMHKP Palembang menetapkan agenda kegiatan Tahun 2025 yang berfokus pada peningkatan penerapan sistem jaminan mutu, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Agenda kegiatan tersebut meliputi:

- Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan pada seluruh tahapan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Penerapan dan penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, verifikasi, surveilans, serta evaluasi penerapan standar mutu pada unit usaha dan unit terkait di wilayah kerja BPPMHKP Palembang.
- Pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Pelaksanaan pengujian dan dukungan teknis guna mendukung pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi, melalui penerapan SAKIP, pengelolaan data dan informasi kinerja, serta penyusunan laporan kinerja secara tepat waktu dan akurat

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

SKIPM Palembang dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 32 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia SKIPM Palembang Tahun 2025

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala	1
2.	Kepala Urusan Umum	1
3.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Muda	6
4.	Inspektur Mutu Perikanan Ahli Pertama	2
5.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Penyelia	1
6.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Mahir	2
7.	Asisten Inspektur Mutu Perikanan Terampil	2
8.	Bendahara	1
9.	Analisis BMN	1
10.	Analisis Keuangan	1
11.	Analisis SDM Aparatur	1
12.	Pengadministrasian Persuratan	1
13.	Pengadministrasian Umum	1
14.	Penata Layanan Operasional	3
15.	Pengelola Layanan Operasional	2
16.	Pengadministrasian Perkantoran	1
17.	Pengelola Umum Operasional	1
18.	Satpam	4
Jumlah		32

Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi SKIPM Palembang Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
PALEMBANG TAHUN 2025



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan serta dukungan operasional pengawasan, SKIPM Palembang pada Tahun 2025 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000 dengan blokir anggaran sebesar Rp 234.986.000, sehingga pagu efektif anggaran yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp 5.269.136.000.

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Rencana Kinerja KKP tahun 2025
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor: 032.02.0/2025 tanggal 30 November 2024.

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja SKIPM Palembang .

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2025.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2025
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2026

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja SKIPM Palembang berdasarkan Penetapan Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU SKIPM Palembang Tahun 2025.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

- 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Stasiun KIPM Palembang, Sumber Daya, Dasar Pelaporan Kinerja, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan;
- 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP Tahun 2025 - 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025, Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan;

- 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Stasiun KIPM Palembang, Capaian Kinerja Stasiun KIPM Palembang, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan
- 4) Penutup yang mencakup kesimpulan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP 2025 - 2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025–2029 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 adalah **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi ini menegaskan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan berlandaskan fondasi pembangunan yang telah dibangun oleh pemerintah, guna mewujudkan Indonesia yang setara dengan negara maju pada tahun 2045.

Sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan visi pembangunan sektor kelautan dan perikanan Tahun 2025–2029 untuk mendukung secara langsung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2025–2029 yang menjadi dokumen perencanaan jangka menengah dan landasan utama dalam penyelenggaraan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Renstra KKP 2025–2029 disusun untuk mendukung visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dengan menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing bangsa di tingkat global. Dalam Renstra tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan kelautan dan perikanan dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan berbasis ekonomi biru, dengan menempatkan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi sebagai prinsip utama pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, KKP berkomitmen melaksanakan pembangunan kelautan dan perikanan melalui perlindungan laut dan sumber dayanya, memastikan ketersediaan pangan biru, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengendalian tekanan dan pembatasan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, serta menjaga kelestarian wilayah laut secara berkelanjutan. Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, **Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029** ditetapkan sebagai:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam konteks pencapaian visi tersebut, mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi faktor yang sangat menentukan. Produk perikanan yang bermutu dan aman tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam melindungi konsumen serta menjaga keberlanjutan akses pasar, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) memiliki keterkaitan yang erat dan strategis dengan seluruh arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra KKP 2025–2029.

BPPMHKP menjalankan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh proses penanganan hasil kelautan dan perikanan, mulai dari tahap produksi hingga distribusi, telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan. Pengendalian dan pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang menekankan peningkatan kualitas produk sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Sejalan dengan hal tersebut, Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025–2029 ditetapkan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan KKP dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. KKP berkomitmen untuk mendukung tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus utama pada Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, guna mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-2 dan ke-8;
2. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-3, ke-5, dan ke-6;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-4; dan
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas, sebagai pelaksanaan Asta Cita ke-7.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan kelautan dan perikanan dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029 meliputi:

- 1) meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 2) meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
- 3) meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- 4) meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Selain mendukung peningkatan kinerja ekspor, pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan juga berperan penting dalam meningkatkan konsumsi ikan masyarakat. Renstra KKP menargetkan peningkatan konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya perbaikan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi prasyarat utama dalam mendukung pembangunan manusia yang sehat dan produktif. Jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang beredar di dalam negeri akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan, sehingga mendorong minat konsumsi ikan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran BPPMHKP tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat.

Keterkaitan BPPMHKP dengan Renstra KKP 2025–2029 juga terlihat dalam upaya peningkatan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Produk perikanan yang memenuhi standar mutu memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan akses pasar yang lebih luas. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan. Dengan demikian, peran BPPMHKP dalam menjamin mutu dan keamanan produk sejalan dengan sasaran Renstra KKP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, korelasi antara BPPMHKP dan Renstra KKP 2025–2029 sangat kuat dan bersifat strategis. Seluruh tugas dan fungsi BPPMHKP pada dasarnya merupakan instrumen pendukung utama dalam mewujudkan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP. Penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, serta daya saing produk, karena mutu merupakan fondasi kepercayaan pasar dan keberlanjutan usaha.

Dalam kerangka penerapan ekonomi biru sebagaimana ditekankan dalam Renstra KKP 2025–2029, peran BPPMHKP menjadi semakin relevan. Ekonomi biru menuntut proses produksi yang tidak hanya efisien dan bernilai ekonomi tinggi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan

kesehatan manusia. Melalui pengawasan mutu yang konsisten dan berbasis standar, BPPMHKP mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik penanganan dan pengolahan hasil perikanan yang ramah lingkungan, higienis, dan berkelanjutan, sehingga selaras dengan prinsip pembangunan yang menempatkan ekologi sebagai panglima.

Renstra KKP juga menyoroti pentingnya pengurangan kehilangan hasil (post-harvest losses) sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dan nilai tambah sektor perikanan. Dalam hal ini, BPPMHKP memiliki korelasi langsung karena pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sejak tahap awal produksi hingga distribusi mampu meminimalkan kerusakan produk, penurunan kualitas, dan risiko penolakan pasar. Dengan semakin kecilnya tingkat kehilangan hasil, maka produktivitas efektif sektor perikanan dapat meningkat tanpa harus menambah tekanan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan mutu yang dilaksanakan oleh BPPMHKP sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil. Pengawasan mutu yang transparan, terukur, dan berbasis risiko mendukung terciptanya sistem pelayanan publik yang akuntabel dan profesional. Hal ini sekaligus memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam menjamin mutu dan keamanan pangan asal ikan.

Dalam konteks perdagangan internasional, Renstra KKP menegaskan bahwa tantangan utama ekspor produk perikanan tidak hanya berasal dari kapasitas produksi, tetapi juga dari pemenuhan standar mutu dan regulasi negara tujuan. BPPMHKP memiliki peran strategis dalam menjembatani kepentingan nasional dengan tuntutan pasar global melalui harmonisasi standar, sertifikasi, dan pengujian laboratorium. Dengan dukungan BPPMHKP, pelaku usaha perikanan nasional dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional, sehingga risiko hambatan non-tarif dapat ditekan dan akses pasar ekspor dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Korelasi BPPMHKP dengan Renstra KKP 2025–2029 juga tercermin dalam upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Produk perikanan yang aman dan bermutu memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat sekaligus mendukung program peningkatan

konsumsi ikan sebagai sumber protein berkualitas. Hal ini sejalan dengan sasaran Renstra KKP dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik dan aman.

Lebih lanjut, peran BPPMHKP dalam penerapan standar dan sertifikasi mutu turut mendorong transformasi pelaku usaha perikanan menuju sistem usaha yang lebih modern dan berdaya saing. Penerapan standar mutu menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana dan prasarana, serta adopsi teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan. Transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan Renstra KKP yang mendorong inovasi, modernisasi, dan peningkatan kualitas pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, keterjaminan mutu produk berdampak langsung pada peningkatan nilai jual dan stabilitas harga. Produk yang memenuhi standar mutu cenderung memiliki akses pasar yang lebih luas dan harga yang lebih baik, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nelayan, pembudi daya, dan pelaku usaha. Dengan demikian, peran BPPMHKP mendukung secara tidak langsung pencapaian indikator kesejahteraan yang menjadi bagian dari sasaran strategis Renstra KKP.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa BPPMHKP merupakan elemen kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi Renstra KKP 2025–2029. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di daerah, BPPMHKP didukung oleh unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang, yang berperan sebagai garda terdepan dalam pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di Provinsi Sumatera Selatan. Melalui peran operasional SKIPM Palembang, kebijakan dan strategi BPPMHKP diimplementasikan secara langsung di lapangan, mulai dari pengawasan pra-produksi, proses produksi, pasca panen, distribusi, hingga lalu lintas komoditas perikanan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sehingga memastikan bahwa seluruh produk perikanan yang dihasilkan dan diperdagangkan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan. Penguatan peran BPPMHKP melalui

peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur laboratorium, serta sistem pengawasan mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam Renstra KKP 2025–2029, keberadaan SKIPM Palembang sebagai unit pelaksana teknis BPPMHKP di daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menjembatani kebijakan nasional dengan implementasi teknis di tingkat wilayah. Renstra KKP menekankan pentingnya penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi biru, peningkatan daya saing, serta perlindungan sumber daya dan konsumen. Dalam konteks tersebut, SKIPM Palembang menjadi representasi langsung negara dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas produksi dan peredaran hasil perikanan di Provinsi Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan prinsip keberlanjutan yang telah ditetapkan.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik wilayah yang strategis dalam lalu lintas dan distribusi komoditas perikanan, baik untuk konsumsi domestik maupun tujuan ekspor. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan yang konsisten, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika perdagangan. Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dan turunannya pada SKIPM Palembang sebagai salah satu unit pelaksana teknis dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

Mendukung terwujudnya “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” melalui pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, SKIPM Palembang

Terwujudnya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan yang andal, berdaya saing, dan berkelanjutan guna mendukung pembangunan ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat.

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen BPPMHKP dalam mendukung pencapaian Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP Tahun 2025–2029, khususnya dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sebagai prasyarat utama peningkatan daya saing, ketahanan pangan biru, dan perlindungan konsumen. Selain itu, dinamika perdagangan global, meningkatnya tuntutan standar mutu dan keamanan pangan, serta kebutuhan akan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menuntut penguatan sistem pengendalian dan pengawasan yang andal, terintegrasi, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, visi BPPMHKP dirumuskan untuk memastikan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan secara profesional dan akuntabel, guna mendukung pembangunan ekonomi biru serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Misi KKP

Misi KKP dapat diartikan sebagai arah dan komitmen strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat. Misi tersebut mencerminkan upaya KKP dalam menjaga kelestarian sumber daya laut, menjamin ketersediaan pangan biru, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Adapun Misi KKP yaitu

- a) Melindungi dan melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, pengendalian tekanan pemanfaatan, serta pengawasan yang efektif untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.**
- b) Menjamin ketersediaan pangan biru nasional guna mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budi daya yang produktif, efisien, dan ramah lingkungan.**
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui penguatan hilirisasi, peningkatan daya saing, serta perluasan akses pasar domestik dan internasional.**
- d) Meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan kemitraan yang inklusif dan berkeadilan.**
- e) Mengembangkan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang profesional dan berdaya saing melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan integritas.**
- f) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas melalui reformasi birokrasi, transformasi digital, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan.**

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen SKIPM Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP di daerah untuk berperan aktif sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, penerapan standar dan sertifikasi mutu secara konsisten, penguatan layanan laboratorium dan teknis, serta peningkatan profesionalisme sumber daya manusia. Seluruh upaya ini

diarahkan untuk menjamin perlindungan konsumen, meningkatkan kepercayaan pasar, serta mendukung daya saing produk kelautan dan perikanan dari wilayah kerja SKIPM Palembang, sejalan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis BPPMHKP dan KKP.

3. Tujuan Strategis SKIPM Palembang

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan misi SKIPM Palembang. Adapun tujuan strategis SKIPM Palembang adalah:

- ✓ ***Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.***
- ✓ ***Menjamin perlindungan konsumen dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk kelautan dan perikanan.***
- ✓ ***Mendukung peningkatan daya saing dan ketahanan pangan melalui penerapan sistem jaminan mutu yang berkelanjutan.***
- ✓ ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SKIPM Palembang.***

4. Sasaran Strategis

SKIPM Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT), sasaran strategis SKIPM Palembang adalah:

- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan di wilayah kerja SKIPM Palembang.
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- Terwujudnya penyelenggaraan layanan dan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan SKIPM Palembang.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.504.122.000 ,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.137.042.000 ,-
2. Pengendalian Mutu alokasi anggaran sebesar Rp 182.080.000 ,-
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan alokasi anggaran sebesar Rp 185.000.000 ,-

C. PENETAPAN KINERJA SKIPM PALEMBANG TAHUN 2025

Penetapan Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang dengan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Penetapan kinerja ini menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan SKIPM Palembang selama Tahun 2025 serta sebagai tolok ukur evaluasi atas keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025, SKIPM Palembang menetapkan sasaran kegiatan yang berfokus pada terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan, pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel. Sasaran tersebut diukur melalui indikator kinerja yang mencakup pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sektor produksi primer dan pasca panen, kinerja ekspor hasil perikanan, kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan lembaga inspeksi, serta indikator tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Untuk mendukung pencapaian target kinerja tersebut, SKIPM Palembang didukung dengan alokasi anggaran Tahun 2025 yang digunakan untuk kegiatan dukungan manajemen internal, manajemen mutu, serta pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal serta mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Awal) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (nama UPT yang memiliki lalu lintas ekspor)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
SK.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76

		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	88

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025 telah dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja (PK) lingkup SKIPM Palembang. Revisi tersebut ditetapkan pada tanggal **08 Desember 2025** sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan serta kebutuhan pencapaian kinerja. Adapun hasil revisi Perjanjian Kinerja dimaksud disajikan pada Tabel 3 beriku

Tabel 3. Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92

	akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36

D. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang, terarah, dan terukur. Oleh karena itu, Stasiun KIPM Palembang menyusun Rencana Aksi Kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran kinerja.

Rencana Aksi Kinerja ini memuat informasi mengenai jenis kegiatan serta waktu pelaksanaannya pada tahun berjalan, yang berfungsi sebagai alat pemantauan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan adanya Rencana Aksi Kinerja tersebut, diharapkan Stasiun KIPM Palembang dapat melaksanakan kegiatan secara lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Adapun rincian Rencana Aksi Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 4 berikut.

**Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan
SKIPM Palembang Tahun 2025**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Lokasi)	1	2
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	86,91

	mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	91
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92	96,60
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	100
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82	89,35
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	88,05
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	79,81
		15.	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36	3.74

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Pengelolaan kinerja merupakan suatu sistem manajemen yang dilaksanakan oleh organisasi dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengelola Kinerja SKIPM Palembang melaksanakan pengumpulan data kinerja, pengukuran, serta evaluasi terhadap perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap triwulan.

Hasil pengukuran kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan serta berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Selanjutnya, data capaian kinerja diolah dan disajikan melalui aplikasi manajemen kinerja berbasis website pada **kinerjaku.kkp.go.id**, dengan mekanisme kategorisasi atau penentuan posisi capaian kinerja. Adapun tingkat penilaian capaian kinerja SKIPM Palembang disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Penilaian Capaian Kinerja

No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

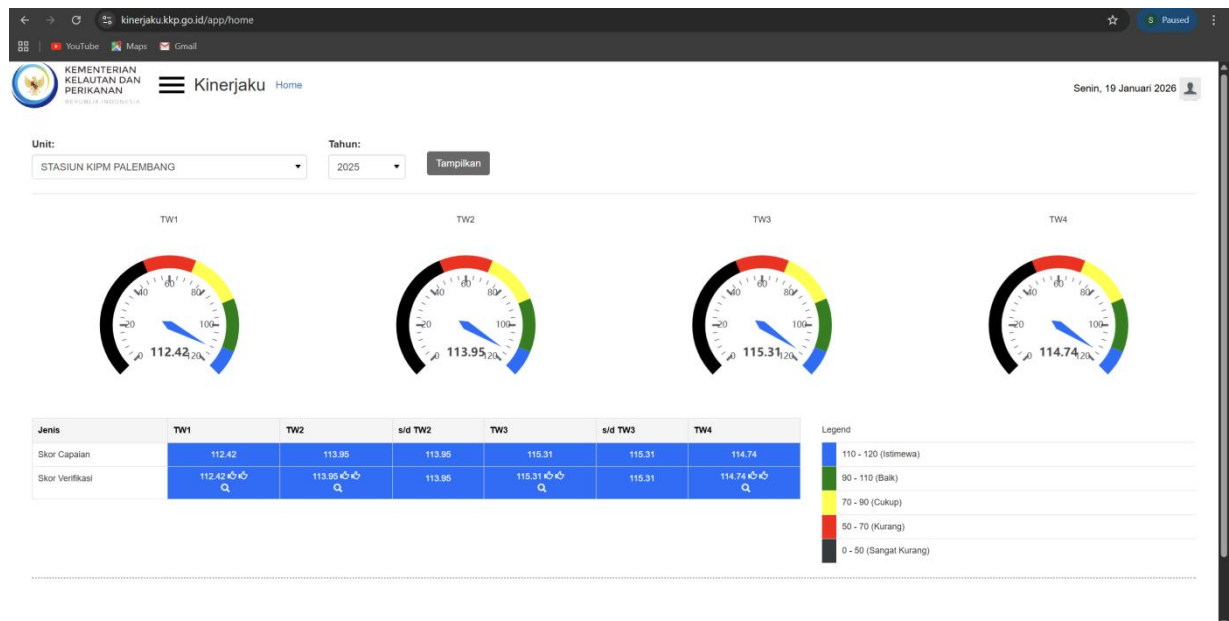
B. CAPAIAN KINERJA SKIPM PALEMBANG

Capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada periode Januari sampai dengan Desember 2025. Capaian kinerja tersebut terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 (Revisi).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Proses pengukuran kinerja dilaksanakan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja kinerjaku, sehingga hasil pengukuran dapat disajikan secara objektif, terukur, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi kinerjaku, capaian kinerja SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang Tahun 2025



Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) SKIPM Palembang Tahun 2025 dengan capaian 114,74 (**kategori Istimewa**). Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan SKIPM Palembang disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan SKIPM Palembang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	1	2	200
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100	101,01
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	86,91	115,88
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	91	121,3
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	92	96,60	105
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71,5	100	120
		9.	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM	100	100	100

			Palembang (%)			
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	82	89,35	108,96
		11.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	86	88,05	102,35
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	85	100	117,64
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	76	100	131,5
		14	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	79,81	114
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3.36	3.74	111,30

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui dari 15 Indikator Kinerja Kegiatan terdapat 14 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target dan terdapat 1 Indikator Kinerja yang realisasinya sesuai target. Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK.1 Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil kelautan dan perikanan yang diproduksi, ditangani, dan diperdagangkan di wilayah kerja SKIPM Palembang telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan, baik untuk peredaran domestik maupun ekspor. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer

yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

- 2) Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang
- 3) Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang
- 4) Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

IK 1- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan pada sektor produksi primer yang telah memenuhi standar mutu dan kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten. Sektor produksi primer dimaksud meliputi perikanan budi daya, antara lain penerapan CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, dan CDOIB, serta perikanan tangkap yang meliputi penerapan CPIB di kapal.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan upaya pencegahan dan pengendalian yang dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahap pra-produksi hingga pemasaran untuk menghasilkan produk hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara konsisten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hayati perairan, yang meliputi kegiatan penangkapan ikan, budi daya perikanan, serta pengumpulan hasil laut lainnya. Adapun Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) serta standar lain yang dipersyaratkan dalam perdagangan

dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Output dari kegiatan pengendalian dan pengawasan ini berupa rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan hasil inspeksi, baik yang disampaikan melalui sistem Online Single Submission (OSS) maupun secara manual, sebagai dasar pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} X 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
 E = Persentase Unit Usaha menerapkan CDOIB
 F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB
 A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB Kapal
 B = Persentase Unit menerapkan CPIB
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*
 C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor produksi primer yg ada UPT*

Pada periode tahun 2025 capaian realisasi sektor Produksi Primer sebagai berikut:

Tabel 7. Target dan Realisasi IK1 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	70	100	142,85	70	100	142,85

Keterkaitan Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2025 dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan difokuskan pada penerapan konsep ekonomi biru, peningkatan nilai tambah produk, penguatan daya saing hasil perikanan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan. Arah kebijakan tersebut menempatkan standardisasi dan sertifikasi pada sektor produksi primer sebagai fondasi utama untuk memastikan bahwa produk hasil perikanan yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, memenuhi standar mutu nasional dan internasional, serta berkelanjutan baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, Indikator Kinerja (IK) 1 Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan secara langsung mendukung pencapaian visi dan arah pembangunan KKP karena menitikberatkan pada pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan sejak hulu, yaitu pada tahapan produksi primer perikanan budi daya dan perikanan tangkap.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis dalam Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. IK 1 UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional di tingkat Unit Pelaksana Teknis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut melalui pelaksanaan pengawasan, sertifikasi, serta pembinaan terhadap unit produksi primer. Melalui penerapan standar CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB, serta CPIB

di kapal perikanan, IK 1 memastikan bahwa hasil perikanan yang dihasilkan dari sektor hulu telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, sehingga mendukung peningkatan daya saing produk perikanan secara nasional.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang relevan dengan pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan pangan antara lain persentase unit usaha perikanan yang menerapkan standar mutu, persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan tingkat kepatuhan terhadap sistem jaminan mutu. IK 1 UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja Renstra KKP tersebut, sekaligus menjadi kontributor utama dalam penyediaan data kinerja nasional di bidang jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan. Dengan demikian, capaian IK 1 di tingkat UPT secara langsung berpengaruh terhadap capaian indikator kinerja BPPMHKP dan KKP secara keseluruhan.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan sebagai Justifikasi IK 1

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi sejumlah tantangan utama dalam pemenuhan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, antara lain belum meratanya penerapan standar produksi primer, masih terjadinya kehilangan kualitas (*losses*) akibat penanganan yang belum sesuai standar, semakin ketatnya persyaratan sanitasi dan keamanan pangan di pasar ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, serta masih adanya inkonsistensi mutu bahan baku hasil perikanan. Dalam konteks tersebut, IK 1 hadir sebagai instrumen pengendalian risiko mutu sejak tahap produksi primer, sehingga berperan penting dalam menjaga konsistensi mutu hasil perikanan. Penerapan IK 1 secara efektif berdampak langsung pada kelancaran ekspor produk perikanan, perlindungan konsumen, serta peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan digunakan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan dan penerapan standar mutu serta keamanan pangan pada produk hasil kelautan dan perikanan yang telah melalui tahapan pasca panen. Indikator ini mengukur proporsi volume atau jumlah produk perikanan yang dihasilkan oleh unit usaha pasca panen yang telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi pasca panen mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap atau dipanen, yang bertujuan untuk menjaga mutu, meningkatkan nilai tambah, serta menjamin keamanan produk hingga sampai ke konsumen akhir. Kegiatan tersebut meliputi proses penanganan awal, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dalam tahapan ini, potensi risiko terhadap mutu dan keamanan pangan relatif lebih tinggi sehingga diperlukan penerapan sistem pengendalian yang ketat dan berkelanjutan.

Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen dilakukan melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, antara lain melalui implementasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sistem tersebut merupakan instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian bahaya yang dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap pra-produksi hingga pemasaran, guna menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan memenuhi ekspektasi pasar.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan yang menjadi acuan dalam penilaian indikator ini meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI), standar internasional seperti Codex Alimentarius, serta standar lain yang dipersyaratkan dalam perdagangan domestik maupun

internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan terhadap standar-standar tersebut menjadi prasyarat utama bagi produk perikanan untuk dapat diterima di pasar, khususnya dalam perdagangan ekspor.

Sebagai bentuk pengakuan atas pemenuhan persyaratan tersebut, SKIPM Palembang menerbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) berdasarkan hasil inspeksi dan evaluasi yang dilakukan terhadap unit pengolahan ikan. Sertifikat diterbitkan sesuai dengan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, serta potensi bahaya (hazard) yang ditangani dan/atau diolah, sehingga mencerminkan tingkat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara spesifik dan terukur. n dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

CARA PENGUKURAN =

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)

**) Komponen pembentuk yang dihitung berdasarkan karakteristik sertifikasi jaminan mutu sektor pasca panen yg ada UPT*

Pada periode tahun 2025 capaian realisasi sektor Pasca Panen sebagai berikut :

Tabel 8. Target dan Realisasi IK2 Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	70	100	142,85

Keterkaitan Indikator Pasca Panen dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029, pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada penguatan ekonomi biru, peningkatan nilai tambah produk, peningkatan daya saing hasil perikanan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pada tahapan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan pangan menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas produk hasil kelautan dan perikanan sebelum dipasarkan, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor.

Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan tersebut karena berfokus pada pengendalian mutu pada tahap pengolahan, penanganan, penyimpanan, dan distribusi. Melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, indikator ini memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga memenuhi standar mutu nasional dan internasional serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Indikator pasca panen di Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut melalui pengawasan dan pembinaan penerapan sistem jaminan mutu pada unit pengolahan ikan.

Pencapaian standar mutu dan keamanan pangan pada sektor pasca panen dilakukan melalui implementasi Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) serta pemenuhan persyaratan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). Sistem ini menjadi instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pengendalian bahaya secara sistematis mulai dari tahap pra-produksi, proses pengolahan, penyimpanan, hingga pemasaran, sehingga menghasilkan produk perikanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing tinggi.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan sektor pasca panen antara lain persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, persentase unit pengolahan ikan yang menerapkan sistem jaminan mutu, serta peningkatan kepatuhan terhadap standar pengolahan dan distribusi. Indikator Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja Renstra KKP tersebut.

Selain itu, indikator ini menjadi kontributor penting dalam penyediaan data kinerja nasional di bidang jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, khususnya pada aspek pengolahan dan distribusi produk perikanan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan Pasca Panen (Justifikasi Indikator)

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi sejumlah tantangan pada sektor pasca panen, antara lain belum optimalnya penerapan sistem jaminan mutu pada sebagian unit pengolahan, potensi kontaminasi biologis, kimia, dan fisik selama proses pengolahan dan distribusi, meningkatnya tuntutan standar keamanan pangan dari negara tujuan ekspor, serta tingginya risiko penurunan mutu produk akibat penanganan yang tidak sesuai standar.

Dalam konteks tersebut, indikator pasca panen ini berperan sebagai instrumen pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan pada tahap hilir, sehingga berdampak langsung pada kelancaran ekspor produk perikanan, perlindungan konsumen, serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk hasil kelautan dan perikanan Indonesia.

IK3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang percepatan penyediaan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat, UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Palembang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada sektor produksi pasca panen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menjamin bahwa produk perikanan yang beredar di masyarakat memenuhi standar mutu dan keamanan pangan.

Lokasi yang menjadi objek pengendalian dan penjaminan mutu hasil perikanan domestik meliputi unit pengumpulan atau supplier serta pasar-pasar di kabupaten/kota yang memiliki tingkat konsumsi hasil perikanan dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Penentuan lokasi tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi risiko mutu dan keamanan pangan, serta tingkat distribusi produk perikanan kepada masyarakat.

Adapun jenis hasil perikanan yang menjadi sasaran pengawasan mencakup ikan segar dan ikan beku, yang terdiri atas kelompok ikan demersal, pelagis, cephalopoda, mollusca, serta ikan hasil kegiatan budidaya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk tersebut ditangani, disimpan, dan didistribusikan sesuai dengan ketentuan standar mutu dan keamanan hasil perikanan yang berlaku.

Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden dimaksud, khususnya terkait pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan pengawasan mutu produk perikanan pada sektor pasca panen. Hal ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa produk perikanan yang dipasarkan aman, layak, dan sehat untuk dikonsumsi.

Pada Tahun 2025, indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen ditargetkan sebanyak 2 lokasi. Target tersebut telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

NO	TRIWULAN	PELAKSANAAN	
		LOKASI	LOKUS
1.	TW IV	Palembang	1. Pasar Alang Alang Lebar 2. Pasar PAL Limo 3. Farmer Market PTC Mall 4. Supermarket JM Sukarame
2	TW IV	Banyuasin	1.TPI Desa Sungsang Budiman Group

Tabel 10. Target dan Realisasi IK3 Persentase Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Indikator Kinerja	2024			2025		
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	70	100	142,85	1	2	200

Keterkaitan Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Pasca Panen dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendukung terwujudnya ekonomi biru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, sehat, dan bergizi bagi masyarakat. Dalam kerangka tersebut, penguatan sistem pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan domestik menjadi bagian penting dalam menjamin perlindungan konsumen serta keberlanjutan sistem pangan nasional.

Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP karena berfokus pada pengawasan langsung terhadap peredaran produk perikanan di dalam negeri, khususnya pada titik-titik strategis distribusi pasca panen. Pengawasan pada unit pengumpulan, supplier, serta pasar-pasar di wilayah dengan tingkat konsumsi dan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin mutu dan keamanan pangan hasil perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Kebijakan Nasional dan Tujuan Strategis Renstra KKP

Pelaksanaan indikator ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyediaan Pangan yang Aman, Sehat, dan Bergizi bagi Masyarakat, yang menekankan pentingnya pengawasan pangan secara terpadu dari hulu hingga hilir. Dalam konteks Renstra KKP 2025–2029, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan strategis KKP untuk meningkatkan daya saing dan kualitas produk kelautan dan perikanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Melalui pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada sektor pasca panen, UPT Stasiun KIPM Palembang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Renstra KKP, yaitu meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Indikator lokasi pengawasan ini menjadi instrumen operasional yang memastikan bahwa produk perikanan yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan secara sistematis.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang relevan antara lain persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap sistem jaminan mutu, serta penguatan pengawasan peredaran hasil perikanan di dalam negeri. Indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut melalui pendekatan berbasis lokasi dan risiko.

Penentuan lokasi pengawasan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan potensi risiko mutu dan keamanan pangan, volume distribusi produk perikanan, serta tingkat konsumsi masyarakat. Dengan pendekatan ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus memperkuat sistem pengendalian mutu hasil perikanan domestik.

d. Tantangan Mutu dan Keamanan Pangan Domestik sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2025–2029 mencatat bahwa peningkatan konsumsi ikan nasional harus diimbangi dengan penguatan pengawasan mutu produk yang beredar di pasar domestik. Tantangan yang dihadapi antara lain masih adanya praktik penanganan pasca panen yang belum sesuai standar, potensi kontaminasi selama distribusi, serta tingginya peredaran produk perikanan di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi.

Dalam konteks tersebut, indikator lokasi pengawasan mutu pasca panen menjadi instrumen penting dalam pengendalian risiko mutu dan keamanan pangan di tingkat hilir. Pelaksanaan pengawasan pada pasar dan unit pengumpulan berkontribusi langsung terhadap perlindungan konsumen, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk perikanan, serta penguatan ketahanan pangan berbasis protein hewani.

Data Pendukung (Konteks Renstra KKP 2025–2029) :

- Konsumsi ikan nasional terus meningkat dan menjadi salah satu sumber utama protein hewani masyarakat.
- Wilayah perkotaan dan sentra distribusi memiliki risiko lebih tinggi terhadap penurunan mutu akibat tingginya volume dan kecepatan peredaran produk.
- Pengawasan berbasis lokasi dan risiko merupakan pendekatan yang dianjurkan dalam penguatan sistem pengendalian mutu pangan nasional.
- Produk perikanan domestik yang beredar di pasar tradisional dan modern menjadi sasaran utama pengawasan mutu dan keamanan pangan.
- Data tersebut memperkuat urgensi pelaksanaan indikator Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen sebagai bagian integral dari implementasi Renstra KKP 2025–2029.

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam kegiatan perdagangan internasional. Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) yang diterbitkan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang terhadap volume ikan dan hasil perikanan yang diekspor ke pasar internasional, dengan jumlah HC yang ditolak atau tidak diterima oleh negara tujuan ekspor.

Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor, baik yang bersumber dari ketentuan nasional maupun standar internasional.

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor melalui wilayah kerja UPT Stasiun KIPM Palembang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan, pengujian, serta sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Proses tersebut meliputi verifikasi pemenuhan standar penanganan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi, serta pemenuhan persyaratan khusus dari negara tujuan ekspor. Dengan terpenuhinya seluruh persyaratan tersebut, produk perikanan yang diekspor dapat diterima oleh negara tujuan tanpa adanya penolakan.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan untuk konsumsi manusia. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa produk perikanan telah melalui proses pengawasan dan pengendalian mutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan oleh negara tujuan ekspor menjadi indikator utama keberhasilan pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor juga memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global. Keberhasilan mempertahankan tingkat penerimaan ekspor yang tinggi akan meningkatkan

kepercayaan negara mitra dagang terhadap sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan nasional. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai ekspor, pertumbuhan sektor perikanan, serta penguatan perekonomian nasional, khususnya dalam bidang perdagangan internasional.

CARA PENGUKURAN =

$$x \frac{A - B}{A}$$

x = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, pembinaan, dan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, guna memastikan bahwa setiap produk perikanan yang diekspor memenuhi standar yang dipersyaratkan dan dapat diterima oleh negara tujuan ekspor tanpa penolakan.

Perbandingan Realisasi Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Tahun 2024–2025 sebagai berikut:

Tabel 11. Target dan Realisasi IK4 Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Rasio ekspor Ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	99	100	101,01	99	100	101,01

SK.2 Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten sesuai standar merupakan tolok ukur utama dalam menilai dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pengendalian ini dilaksanakan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan telah memenuhi ketentuan standar mutu dan keamanan pangan yang berlaku.

Keberhasilan terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten tercermin dari tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan teknis, sanitasi, dan keamanan pangan, serta efektivitas pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh BPPMHKP beserta unit pelaksana teknis di daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana sasaran Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang konsisten dapat dicapai.

Indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur, objektif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyempurnaan strategi pengendalian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada periode berikutnya.

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Realisasi pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Mutu pada laboratorium pengujian lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selama Triwulan IV (Oktober–Desember) Tahun 2025 mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh persyaratan penerapan sistem manajemen mutu telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan Tabel 12, target dan realisasi Indikator Kinerja 5 (IK5) berupa Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Pada Tahun 2024, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium ditetapkan sebesar 70 persen, dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 142,85 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2025, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian ditingkatkan menjadi 75 persen. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 86,91, dengan tingkat capaian sebesar 115,88 persen. Meskipun target kinerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, UPT Stasiun KIPM Palembang tetap mampu melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode 2024–2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan meningkatkan mutu laboratorium pengujian sesuai dengan standar yang berlaku, serta mendukung terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 12. Target dan Realisasi IK5 Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu laboratorium penguji UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	75	86,91	115,88

Keterkaitan Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima Negara Tujuan Ekspor dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menetapkan arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berorientasi pada peningkatan daya saing global, nilai tambah produk, serta penguatan peran Indonesia dalam perdagangan internasional hasil perikanan. Dalam konteks tersebut, jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan menjadi prasyarat utama untuk menjaga keberterimaan produk Indonesia di pasar ekspor yang semakin kompetitif dan menerapkan standar teknis yang ketat.

Indikator Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena secara langsung mencerminkan keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dalam mendukung kelancaran ekspor. Tingginya rasio penerimaan ekspor menunjukkan bahwa produk perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan sanitasi, kesehatan, dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh negara tujuan, sehingga mendukung pencapaian visi KKP dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan.

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Melalui penerbitan Sertifikat Kesehatan (Health Certificate/HC) oleh UPT Stasiun KIPM Palembang, indikator ini memastikan bahwa setiap produk perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan efektivitas sistem jaminan mutu nasional dalam mendukung kinerja ekspor hasil perikanan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang relevan antara lain peningkatan volume dan nilai ekspor hasil perikanan, persentase produk perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional, serta penurunan tingkat penolakan produk perikanan di negara tujuan ekspor. Indikator Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut.

Rasio ini dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Sertifikat Kesehatan (HC) yang diterbitkan terhadap volume ikan dan hasil perikanan yang diekspor dengan jumlah HC yang ditolak atau tidak diterima oleh negara tujuan ekspor. Semakin tinggi rasio penerimaan, semakin menunjukkan keberhasilan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan oleh UPT KIPM Palembang sebagai bagian dari sistem nasional jaminan mutu hasil perikanan.

d. Tantangan Perdagangan Internasional sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2025–2029 mencatat bahwa perdagangan internasional hasil perikanan menghadapi tantangan berupa semakin ketatnya persyaratan sanitasi dan fitosanitasi (SPS), penerapan standar keamanan pangan yang dinamis, serta meningkatnya pengawasan dan audit oleh otoritas kompeten negara tujuan ekspor seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara mitra dagang lainnya. Selain itu, setiap penolakan produk di negara tujuan ekspor dapat berdampak langsung terhadap reputasi, biaya logistik, dan keberlanjutan usaha eksportir.

Dalam konteks tersebut, indikator rasio ekspor yang diterima oleh negara tujuan ekspor menjadi instrumen penting dalam mengendalikan risiko penolakan produk, menjaga kepercayaan pasar internasional, serta melindungi kepentingan pelaku usaha perikanan nasional. Capaian indikator ini berdampak langsung pada kelancaran ekspor, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan posisi Indonesia sebagai pemasok produk perikanan yang andal dan terpercaya.

Data Pendukung (Konteks Renstra KKP 2025–2029)

- Ekspor hasil perikanan Indonesia ditujukan ke pasar utama seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Tiongkok, yang mensyaratkan Health Certificate dan kepatuhan terhadap standar SPS internasional.
- Tingkat penolakan produk perikanan di negara tujuan ekspor menjadi salah satu indikator kepercayaan pasar dan efektivitas sistem jaminan mutu nasional.
- Mayoritas negara tujuan ekspor menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko dan ketertelusuran (traceability) sebagai prasyarat penerimaan produk.
- Peningkatan rasio penerimaan ekspor berkontribusi langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan nilai ekspor hasil perikanan nasional.
- Data tersebut menunjukkan bahwa indikator Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang Diterima oleh Negara Tujuan Ekspor memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029.

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Pada Tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi secara konsisten sesuai dengan ketentuan SNI ISO/IEC 17020:2012. Penerapan standar tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan inspeksi dilaksanakan berdasarkan prinsip independensi, ketidakberpihakan, kompetensi, konsistensi, dan akuntabilitas, sehingga hasil inspeksi yang dihasilkan dapat dipercaya serta diakui secara nasional dan internasional.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu terhadap seluruh persyaratan yang diatur dalam standar ISO/IEC 17020. Penilaian indikator ini dilakukan melalui evaluasi tingkat pemenuhan setiap klausa standar yang meliputi persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen. Nilai indikator diperoleh dari rata-rata tingkat pemenuhan seluruh klausa yang telah diverifikasi melalui kegiatan audit dan evaluasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di lingkup Stasiun KIPM Palembang mencapai 91, dengan tingkat capaian sebesar 121,33 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 75 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi telah berjalan secara efektif serta melampaui target kinerja yang direncanakan.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan peningkatan mutu penerapan sistem manajemen mutu, telah dilaksanakan kegiatan verifikasi (surveillance) terhadap penerapan SNI ISO/IEC 17020:2012 secara daring (remote verification) pada tanggal 28 Agustus 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan konsistensi penerapan standar, efektivitas pengendalian sistem manajemen mutu, serta kesesuaian pelaksanaan

kegiatan inspeksi dengan persyaratan akreditasi yang berlaku.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh komitmen organisasi dalam menerapkan sistem manajemen mutu secara berkelanjutan melalui pelaksanaan kaji ulang manajemen, kaji ulang dan pengendalian dokumen, pelaksanaan audit internal secara berkala, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Seluruh temuan hasil audit internal maupun eksternal, termasuk hasil surveillance, telah ditindaklanjuti secara sistematis sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Dengan capaian tersebut, Stasiun KIPM Palembang dinilai mampu mempertahankan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sekaligus menjaga status akreditasi SNI ISO/IEC 17020:2012. Ke depan, pengendalian dan peningkatan penerapan sistem manajemen mutu akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan guna mendukung terselenggaranya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten serta sesuai dengan standar yang berlaku.

Tabel 13. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai pemenuhan penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	70	100	142,85	75	91	121,3

Berdasarkan Tabel 13, nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Pada Tahun 2024, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu ditetapkan

sebesar 70 persen, dengan realisasi mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 142,85 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi pada Tahun 2024 telah melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.

Selanjutnya, pada Tahun 2025, target nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu ditingkatkan menjadi 75 persen. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 91, dengan tingkat capaian sebesar 121,3 persen. Meskipun terjadi peningkatan target kinerja, UPT Stasiun KIPM Palembang tetap mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mencerminkan keberlanjutan dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar SNI ISO/IEC 17020:2012.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam menjaga efektivitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi, serta mendukung terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan secara konsisten dan berkelanjutan.

Keterkaitan IKU Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 mengarahkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang andal dan terpercaya. Dalam konteks tersebut, keberadaan lembaga inspeksi yang profesional, kredibel, dan diakui secara internasional merupakan prasyarat utama dalam menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan.

Indikator Kinerja Utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan melalui penerapan standar internasional ISO/IEC 17020. Penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai standar internasional memastikan bahwa seluruh kegiatan inspeksi, pengawasan, dan sertifikasi dilaksanakan secara objektif, konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kredibilitas sistem jaminan mutu hasil perikanan nasional.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan serta meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan terhadap sistem pengendalian mutu nasional.

IKU Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut karena kualitas penerapan ISO/IEC 17020 menjadi dasar kepercayaan terhadap hasil inspeksi yang dilakukan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang. Semakin tinggi nilai penerapan sistem manajemen mutu, semakin terjamin bahwa hasil inspeksi dan pengawasan yang dihasilkan memiliki integritas, akurasi, dan konsistensi yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang relevan dengan penguatan kelembagaan antara lain peningkatan kualitas tata kelola pengawasan, peningkatan akuntabilitas dan profesionalitas aparatur, serta peningkatan pengakuan internasional terhadap sistem jaminan mutu hasil

perikanan. IKU Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut melalui penguatan sistem manajemen mutu internal lembaga inspeksi.

Penilaian indikator ini dilakukan melalui evaluasi tingkat pemenuhan seluruh klausa dalam standar ISO/IEC 17020 yang meliputi persyaratan umum, persyaratan struktural, persyaratan sumber daya, persyaratan proses, dan persyaratan sistem manajemen. Nilai indikator diperoleh dari rata-rata tingkat pemenuhan seluruh klausa yang telah diverifikasi melalui kegiatan audit internal, audit eksternal, serta evaluasi berkelanjutan, sehingga mencerminkan tingkat kematangan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi.

d. Tantangan dan Justifikasi Penerapan ISO/IEC 17020

Renstra KKP 2025–2029 menegaskan bahwa tantangan globalisasi perdagangan dan meningkatnya standar teknis internasional menuntut lembaga inspeksi pemerintah untuk memiliki sistem manajemen mutu yang setara dengan praktik terbaik internasional. Negara tujuan ekspor utama hasil perikanan Indonesia mensyaratkan bahwa proses inspeksi dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga yang kompeten, independen, dan terakreditasi sesuai standar internasional.

Dalam konteks tersebut, IKU Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi menjadi instrumen strategis untuk memastikan konsistensi penerapan ISO/IEC 17020, mengendalikan risiko ketidaksesuaian dalam proses inspeksi, serta menjaga pengakuan dan kepercayaan internasional terhadap sistem jaminan mutu hasil perikanan Indonesia. Pencapaian nilai indikator yang tinggi berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan negara mitra dagang, kelancaran ekspor hasil perikanan, serta penguatan reputasi kelembagaan KKP di tingkat global.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- ✓ Standar ISO/IEC 17020 merupakan standar internasional yang digunakan secara luas untuk menilai kompetensi lembaga inspeksi.
- ✓ Pengakuan internasional terhadap hasil inspeksi sangat bergantung pada konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dan hasil audit.
- ✓ Audit internal dan eksternal menjadi instrumen utama dalam menjaga keberlanjutan penerapan sistem manajemen mutu.
- ✓ Peningkatan kualitas tata kelola dan profesionalitas aparatur merupakan salah satu fokus penguatan kelembagaan dalam Renstra KKP 2025–2029.

Data tersebut menunjukkan bahwa IKU Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya dalam penguatan kelembagaan, jaminan mutu, dan daya saing produk kelautan dan perikanan.

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan salah satu sasaran strategis yang mencerminkan dampak keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan utama dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, UPT Stasiun KIPM Palembang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penataan tata laksana, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur, serta penguatan koordinasi internal dan eksternal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian serta pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

Keberhasilan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, kualitas akuntabilitas kinerja, serta kepatuhan terhadap standar dan prosedur yang berlaku. Indikator kinerja tersebut menjadi instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai capaian kinerja secara objektif dan terukur, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja di periode selanjutnya.

Dengan tercapainya sasaran terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan UPT Stasiun KIPM Palembang mampu memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian tujuan BPPMHKP secara keseluruhan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan.

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran IKPA dilakukan untuk menilai sejauh mana kualitas pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Penilaian IKPA mencakup kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan anggaran, serta dampak yang dihasilkan dari penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi.

Melalui penerapan dan pemantauan IKPA secara berkelanjutan, diharapkan Kementerian Negara/Lembaga, termasuk UPT Stasiun KIPM Palembang, mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi pencapaian tujuan organisasi.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4(empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dibagi ke dalam empat kategori penilaian. Kategori Sangat Baik diberikan apabila nilai IKPA mencapai 95 atau lebih (≥ 95). Kategori Baik diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang 89 hingga kurang dari 95 ($89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$). Kategori Cukup diberikan apabila nilai IKPA berada pada rentang

70 hingga kurang dari 89 ($70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$). Sementara itu, kategori Kurang diberikan apabila nilai IKPA kurang dari 70 (< 70).

FORMULA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran pada satuan kerja berdasarkan kelengkapan dan keakuratan data transaksi yang tersedia. Apabila seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai tersedia secara lengkap, maka bobot penilaian diberikan secara penuh. Sebaliknya, apabila terdapat indikator tertentu yang tidak memiliki data transaksi, maka bobot penilaian akan disesuaikan secara proporsional.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^n (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%

Aspek revisi DIPA digunakan untuk menilai konsistensi perencanaan anggaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan frekuensi revisi DIPA kewenangan pagu tetap yang dilakukan satuan kerja dalam setiap triwulan. Revisi yang merupakan kebijakan pemerintah, termasuk revisi refocusing dan revisi yang berkaitan langsung dengan pengaturan IKPA, tidak diperhitungkan dalam penilaian. Semakin minim jumlah revisi yang dilakukan, maka kualitas perencanaan anggaran dinilai semakin baik.

$$IKPA Rev = IKPA Rev = \frac{\sum_{i=1}^n RRev n}{n}$$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%

Deviasi Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA mencerminkan tingkat kesesuaian antara perencanaan kas dengan realisasi anggaran. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi penyerapan anggaran terhadap RDP pada setiap bulan berdasarkan jenis belanja. Ketepatan dalam menyusun dan memperbarui RDP menjadi faktor penting, karena semakin kecil deviasi yang terjadi, semakin tinggi pula nilai capaian indikator ini.

Belanja Pegawai

$$DevDIPA BPeg = \frac{||R BPeg n - RPD BPeg n||}{RPD BPeg n} \times 100$$

Belanja Barang

$$DevDIPA BBar = \frac{||R BBar n - RPD BBar n||}{RPD BBar n} \times 100$$

Belanja Modal

$$DevDIPA BMod = \frac{||R BMod n - RPD BMod n||}{RPD BMod n}$$

Seluruh Jenis Belanja

$$DevDIPA n = \frac{||Dev DIPA BPeg + Dev DIPA BBar + Dev DIPA BMod||}{3}$$

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	TW I	TW II	TW III	TW IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	100%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

3. Penyerapan Anggaran- Bobot Penilaian 20%

Penyerapan anggaran digunakan untuk menggambarkan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada setiap triwulan dibandingkan dengan target penyerapan yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran yang tinggi dan sesuai dengan target menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan secara tepat waktu dan terencana.

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu BPeg \times Target BPeg Tw ke - n$$

$$TPBelBar_n = Pagu BBar \times Target BBar Tw ke - n$$

$$TPBelMod_n = Pagu BMod \times Target BMod Tw ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} \times 100$$

4. Belanja Kontraktual -Bobot Penilaian 10%

Belanja kontraktual menilai kinerja satuan kerja dalam mengelola kegiatan yang bersifat kontrak. Penilaian indikator ini mempertimbangkan ketepatan waktu pendaftaran kontrak, percepatan pelaksanaan kontrak dini, serta akselerasi penyelesaian belanja modal. Kinerja belanja kontraktual yang baik mencerminkan kepatuhan administrasi serta efektivitas dalam mendorong percepatan realisasi anggaran.

$$KPA\ BK = (NK - Kw * 40 \%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30 \%)$$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%

- Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyempaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja)
- 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyempaian SPM LS kontraktual
- Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS} \right) \times 100$$

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%

- Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
- Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antar Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan Waktu (50%). (2) Komponen Persentase GUP (25%). Dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
- Komponen Ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit.

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^n KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

- Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

$$\%GUP \text{ disebulankan} = \% GUP \times (\text{jml hari sebulan}) / \Delta t GUP$$

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^n PGUP}{nGUP}$$

- Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikelola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{\text{Setoran TUP}}{TUP} \times 100$$

- Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

$$IKPAUPTUP = (NK - UPKW * 50\%) + (NK - PGUP * 25\%) + (NKSetor * 25\%)$$

- Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM \text{ Dispensasi}}{SPM T_{wUV}} \right) \times 1000$$

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%

- Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antar jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.

- Nilai IKPA diberikan secara bertingkat sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagai berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit(Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%

- Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
- Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja padabulan berikutnya.

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^n ROKW}{n}$$

- Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
- RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\frac{\sum_{i=1}^n \text{Capaian RO}}{\text{Target RO}}}{n} \right)$$

- Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW \times 30\%) + (NKCRO \times 70\%)$$

Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 111/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 10 Januari 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, capaian kinerja pelaksanaan anggaran UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang tercantum dalam daftar satuan kerja secara nasional pada **urutan ke-67**.

Capaian dimaksud menjadi dasar bagi UPT SKIPM Palembang untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh tahapan pelaksanaan anggaran, meliputi perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban anggaran. Hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sebagai bahan perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

Penyajian posisi tersebut tidak dimaksudkan sebagai pemeringkatan nasional secara formal, melainkan sebagai sarana pembanding capaian kinerja secara relatif antar satuan kerja. Data dan informasi lebih rinci mengenai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKJ) UPT SKIPM Palembang Tahun 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Tabel 14. Target dan Realisasi IK 7 Target dan Realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	93,76	94,05	100,30	92	96,60	105

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup SKIPM Palembang ditetapkan dengan target nilai sebesar 92. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut terealisasi sebesar 96,60, sehingga capaian kinerja mencapai 105% dan berada pada kategori Sangat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran SKIPM Palembang pada Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun perbandingan target dan realisasi IKPA SKIPM Palembang Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 14. Pada Tahun 2024, target IKPA sebesar 93,76 dengan realisasi 94,05, sehingga capaian mencapai 100,30%. Sementara itu, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan capaian dengan realisasi yang lebih tinggi dibandingkan target, mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin optimal.

Keterkaitan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi prasyarat penting agar seluruh program dan kegiatan KKP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan tersebut karena berfungsi sebagai instrumen pengukuran kualitas pengelolaan anggaran belanja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Melalui IKPA, kualitas pengelolaan anggaran UPT dinilai secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan melalui pengelolaan anggaran yang berkualitas.

IKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator kinerja operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai IKPA mencerminkan sejauh mana pengelolaan

anggaran UPT telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan, serta sejauh mana anggaran yang digunakan mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian IKPA yang baik menjadi salah satu prasyarat keberhasilan pelaksanaan Renstra KKP di tingkat unit pelaksana teknis.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek tata kelola dan akuntabilitas antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan dan kinerja. IKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan negara.

Penilaian IKPA mencakup tiga aspek utama, yaitu kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran, serta dampak penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi. Dengan demikian, IKPA menjadi alat ukur penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran UPT selaras dengan target dan sasaran Renstra KKP.

d. Tantangan Pengelolaan Anggaran sebagai Justifikasi IKPA

Renstra KKP 2025–2029 menggarisbawahi bahwa tantangan dalam pengelolaan anggaran pemerintah antara lain meningkatnya tuntutan efisiensi belanja, kebutuhan percepatan realisasi anggaran, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran publik. Selain itu, keterkaitan antara anggaran dan kinerja (*performance-based budgeting*) menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dibelanjakan memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Dalam konteks tersebut, IKPA berperan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kualitas pelaksanaan anggaran di tingkat UPT. Capaian IKPA yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan KKP serta pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- ✓ IKPA merupakan indikator resmi yang ditetapkan dan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.
- ✓ Penilaian IKPA mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting).
- ✓ Peningkatan nilai IKPA menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- ✓ Pengelolaan anggaran yang berkualitas mendukung efektivitas pelaksanaan program strategis KKP sesuai Renstra 2025–2029.

Data tersebut menunjukkan bahwa IKPA Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan anggaran.

IK8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM

Palembang (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kualitas dan efektivitas proses perencanaan anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang. Penilaian ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan dokumen perencanaan strategis, ketepatan pengalokasian anggaran, serta konsistensi antara rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran. Nilai tersebut menjadi tolok ukur dalam mengukur sejauh mana perencanaan anggaran telah disusun secara akuntabel, efisien, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Palembang.

- Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.
- Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya
- Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terj adi dalam Pemangku Kepentingan se bagai penerima manfaat atas penggunaan anggaranpada program Kernenterian / Lembaga
- Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah
- Pembobotan Nilai Kinerja Anggaran antara lain:
 - a. Aspek manfaat dan implementasi 50%
 - b. Rata-rata satker 50%

- Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain
 - a. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
 - b. Baik, apabila NKA >80 - 90;
 - c. Cukup, apabila NKA >60 - 80;
 - d. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
 - e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Aspek Implementasi

$$NKI = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (COP \times W_{COP}) \text{ atau } CRO \times W_{CRO} + (NE \times W_E)$$

FORMULASI PERHITUNGAN

Keterangan :

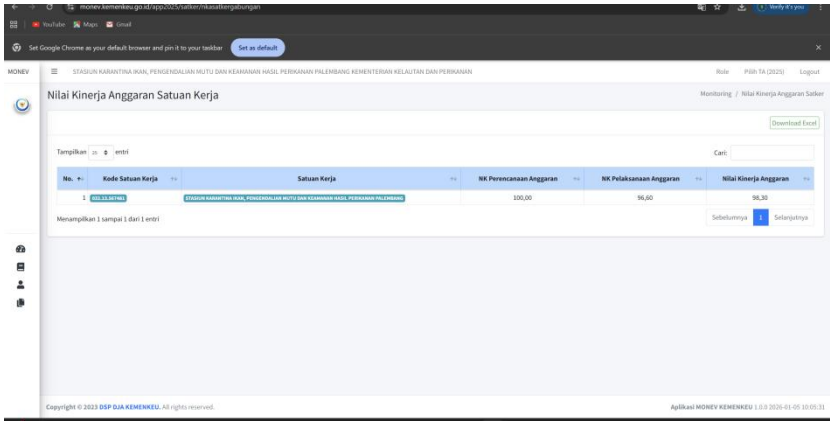
- NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi
- P : peneyerapan anggaran
- K : Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- COP : capaian output program
- CRO : capaian ro
- NE : nilai efesiensi unit eselon I atau satuan anggaran kerja
- Wp : bobot peneyerapan anggaran
- Wk : bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Wcop : bobot capaian Output Program
- Wcro : bobot capaian RO

Berdasarkan Gambar 3, SKIPM Palembang pada aplikasi MONEV Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian Nilai Kinerja Anggaran yang sangat baik, dengan Nilai Kinerja Anggaran sebesar 98,30, yang mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara optimal, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar **71,5**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, indikator tersebut terealisasi sebesar **98,30**, sehingga capaian kinerja mencapai **137,48%**, yang menunjukkan hasil **sangat baik** dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Gambar 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SKIPM Palembang Tahun 2025



Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini memiliki target sebesar **71** dengan realisasi sebesar **85**, sehingga capaian kinerja mencapai **119,71%**. Peningkatan capaian pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam kualitas perencanaan anggaran SKIPM Palembang.

Rincian target dan realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2024 dan 2025 sebagaimana disajikan pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Target dan Realisasi IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	71	85	119,71	71,5	100	120

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 138/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Tahun 2025, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang tercantum pada **urutan ke-9** dalam lingkup internal Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP).

Posisi tersebut mencerminkan capaian kinerja perencanaan anggaran UPT SKIPM Palembang secara relatif apabila dibandingkan dengan satuan kerja lain dalam lingkup BPPMHKP, serta memberikan gambaran mengenai kualitas perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan. Capaian ini menjadi dasar bagi UPT SKIPM Palembang untuk terus melakukan evaluasi dan penguatan perencanaan anggaran agar semakin selaras dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penyajian urutan dimaksud tidak merupakan pemeringkatan nasional secara formal, melainkan sebagai sarana pembandingan kinerja internal dalam lingkup BPPMHKP. Data dan informasi lebih rinci mengenai capaian NKPA UPT SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKJ) UPT SKIPM Palembang Tahun 2025.

Keterkaitan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satu pilar utama tata kelola tersebut adalah perencanaan anggaran yang berkualitas, terintegrasi, dan berbasis kinerja, sehingga setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan strategis KKP.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP karena berfungsi sebagai indikator kualitas perencanaan anggaran, mulai dari penyusunan rencana kegiatan dan anggaran, keselarasan dengan dokumen perencanaan strategis, hingga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Perencanaan anggaran yang berkualitas menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra KKP 2025–2029 di tingkat unit pelaksana teknis.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mendukung tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada seluruh unit kerja.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan anggaran UPT telah disusun secara tepat sasaran, selaras dengan prioritas pembangunan KKP, serta mampu mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek perencanaan dan tata kelola antara lain peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan, peningkatan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari

indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dilakukan dengan menilai kesesuaian antara rencana kegiatan dan anggaran dengan dokumen perencanaan strategis, ketepatan penetapan target kinerja, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, serta kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan anggaran UPT telah mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP secara optimal.

d. Tantangan Perencanaan Anggaran sebagai Justifikasi Indikator

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam perencanaan anggaran pemerintah antara lain meningkatnya tuntutan efisiensi belanja, keterbatasan sumber daya fiskal, serta kebutuhan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran benar-benar berorientasi pada hasil dan dampak. Selain itu, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan akuntabel.

Dalam konteks tersebut, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran berperan sebagai instrumen pengendalian kualitas perencanaan di tingkat UPT. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan KKP, sehingga meminimalkan risiko deviasi antara rencana dan realisasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menjadi salah satu fokus utama penguatan tata kelola dalam Renstra KKP 2025–2029.
- Kualitas perencanaan anggaran berpengaruh langsung terhadap nilai IKPA dan capaian kinerja organisasi.
- Integrasi antara Renstra, Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja menjadi indikator penting dalam penilaian kualitas perencanaan.
- Perencanaan anggaran yang baik mendukung efisiensi belanja dan optimalisasi capaian output dan outcome program.

Data tersebut menunjukkan bahwa Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek tata kelola, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

IK9. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator ini mencerminkan sejauh mana rekomendasi yang disampaikan oleh BPK atas Laporan Keuangan dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyelesaian temuan BPK atas Laporan Keuangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan wujud pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan. Penilaian tersebut didasarkan pada empat kriteria utama, yaitu kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi keuangan (adequate disclosure), tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta efektivitas sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas.

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang berupaya memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak hanya ditindaklanjuti secara administratif, tetapi juga dijadikan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap tata kelola keuangan dan pengendalian intern. Tindak lanjut temuan dilakukan secara terkoordinasi, terdokumentasi, dan berorientasi pada penyelesaian yang tuntas sesuai dengan arahan dan rekomendasi pemeriksa.

Pada Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK ditetapkan dengan target sebesar 100 persen, yang mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang untuk menindaklanjuti seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK secara menyeluruh tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, realisasi capaian indikator ini pada Tahun 2025 juga mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh temuan BPK atas Laporan Keuangan UPT Stasiun KIPM Palembang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Target dan Realisasi IK 9 Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 20245

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 82/ITJ/RC.610/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 tentang Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, disampaikan bahwa capaian IKU pada tingkat kementerian berada pada nilai 0,074 persen, lebih rendah dari batas tertinggi yang ditetapkan sebesar $\leq 0,5$ persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian atas temuan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan KKP telah berada dalam batas yang ditetapkan dan mencerminkan efektivitas pengendalian intern secara kelembagaan.

Sejalan dengan capaian tersebut, UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) secara konsisten melaksanakan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Persentase penyelesaian temuan BPK pada tingkat unit kerja digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan, efektivitas pengendalian intern, serta komitmen unit kerja dalam mendukung penerapan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Capaian IK9 ini menjadi dasar bagi UPT SKIPM Palembang untuk terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berkelanjutan,

sebagai bagian dari kontribusi unit kerja di bawah BPPMHKP dalam mendukung pencapaian kinerja pengelolaan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Data dan informasi lebih rinci mengenai penyelesaian temuan BPK disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKJ) UPT SKIPM Palembang Tahun 2025.

Keterkaitan IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Indikator Kinerja (IK) 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena berfungsi sebagai alat ukur tingkat kepatuhan dan tanggung jawab unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyelesaian temuan BPK secara tepat waktu dan tuntas mencerminkan komitmen UPT terhadap pengelolaan keuangan negara yang akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan negara dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pengawasan eksternal.

IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK merupakan indikator operasional di tingkat UPT yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Tingginya persentase penyelesaian temuan BPK menunjukkan bahwa UPT Stasiun KIPM Palembang mampu menindaklanjuti rekomendasi BPK secara efektif, sistematis, dan sesuai ketentuan, sehingga memperkuat akuntabilitas keuangan dan kinerja organisasi.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas antara lain peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kepatuhan terhadap hasil pengawasan dan audit, serta penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator kinerja tersebut.

Indikator ini mengukur perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dengan jumlah seluruh rekomendasi BPK yang diterima oleh UPT. Dengan demikian, IK 9 menjadi alat ukur konkret dalam menilai efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan komitmen UPT terhadap perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.

d. Tantangan Akuntabilitas dan Justifikasi IK 9

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain meningkatnya tuntutan transparansi publik, kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pengendalian intern. Temuan BPK yang tidak ditindaklanjuti secara optimal berpotensi menimbulkan risiko berulangnya permasalahan, menurunnya kualitas tata kelola, serta melemahnya kepercayaan pemangku kepentingan.

Dalam konteks tersebut, IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK hadir sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi yang memastikan bahwa

setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara tuntas dan berkelanjutan. Capaian indikator ini berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan SPIP, serta pencapaian opini audit yang lebih baik.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- ✓ Tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan salah satu indikator utama akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
- ✓ Penyelesaian temuan BPK menjadi bagian dari penilaian kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi.
- ✓ Peningkatan persentase penyelesaian temuan BPK berkontribusi pada perbaikan opini BPK atas laporan keuangan KKP.
- ✓ Sistem pengendalian intern yang kuat mendukung penurunan temuan berulang dan peningkatan kepatuhan regulasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa IK 9 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek akuntabilitas, tata kelola keuangan, dan penguatan pengawasan.

IK10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)

Profesionalitas merupakan cerminan mutu dan integritas aparatur dalam menjalankan peran dan tanggung jawab jabatannya, yang ditunjukkan melalui sikap, perilaku, serta tingkat penguasaan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan bidang tugasnya. Profesionalitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, tetapi juga mencakup komitmen terhadap etika kerja, tanggung jawab, dan konsistensi dalam memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah suatu indikator kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas ASN secara komprehensif. Indeks ini disusun berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menjadi landasan resmi dalam penilaian profesionalitas aparatur pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilai Indeks Profesionalitas ASN menjadi gambaran nyata kondisi dan kualitas sumber daya manusia aparatur yang dimiliki. Penilaian indeks ini dilakukan secara berkala setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (Biro SDMA) Sekretariat Jenderal KKP, dengan tujuan untuk memantau perkembangan profesionalitas ASN, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan kompetensi dan manajemen ASN.

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan melalui suatu formula yang mengintegrasikan beberapa komponen utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin pegawai. Setiap komponen memiliki bobot penilaian tertentu yang mencerminkan kontribusinya terhadap tingkat profesionalitas ASN secara keseluruhan. Hasil penghitungan indeks ini

selanjutnya digunakan sebagai alat evaluasi dan pengendalian mutu sumber daya manusia aparatur, sekaligus sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut:

1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) / D4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM(Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) / D-2 (Diploma-Dua) / SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 - g.

Dengan formula sebagai berikut :

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan SI	15
2	Pendidikan D 111 /SM	10
1	Pendidikan D 11/0 1/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran UP) satu tahun terakhir

dan Seminar /Workshop/ Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi	Nilai Kompetensi sesuai Jâbatan	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
		Kompetensi Struktural		
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsioanal	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 — ke atas	30
2	Baik	76 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:
- 5.

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

- b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perhitungan nilai DIKLAT PIM Diklat Fungsional/Teknis, Dildat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya
 - Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40
- Indikator indeks profesionalitas ASN SKIPM Palembang dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen,

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar 86 yang merupakan target semester. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi indikator tersebut mencapai 89,49 atau sebesar 104,05 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 82 dengan realisasi sebesar 89,35, sehingga capaian kinerja mencapai 108,96 persen. Rincian target dan realisasi Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 17

Tabel 17. Target dan Realisasi IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT SKIPM Palembang (Indeks);	86	89,49	104,05	82	89,35	108,96

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) tidak disusun dalam bentuk pemeringkatan atau ranking antar unit kerja. Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 2240/SJ.3/TU.210/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, yang menegaskan bahwa IP ASN merupakan instrumen pengukuran nilai indeks untuk menilai tingkat profesionalitas ASN secara komprehensif.

Oleh karena itu, capaian IP ASN UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang disajikan dalam bentuk nilai indeks, bukan peringkat, dan tidak menunjukkan urutan tertentu di antara unit-unit kerja dalam lingkup Eselon I BPPMHKP. Nilai IP ASN tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi internal dan perumusan langkah peningkatan profesionalitas ASN secara berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) secara aktif mengikuti proses pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025. Pengukuran IP ASN dilakukan berdasarkan kesesuaian kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN yang bersumber dari data pada aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN).

Capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT SKIPM Palembang menjadi gambaran kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Hasil pengukuran ini dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi dan perumusan langkah peningkatan profesionalitas ASN secara berkelanjutan, guna mewujudkan aparatur yang kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis BPPMHKP dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data dan informasi lebih rinci mengenai capaian Indeks Profesionalitas ASN disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKJ) UPT SKIPM Palembang Tahun 2025.

Keterkaitan IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menempatkan pembangunan sumber daya manusia aparatur sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas. Penguatan kapasitas dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Indikator Kinerja (IK) 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena berfungsi sebagai instrumen pengukuran kualitas ASN secara komprehensif. Profesionalitas ASN yang tercermin dari sikap, perilaku, kompetensi, dan kinerja menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas serta pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan yang andal, sebagaimana diamanatkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja organisasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya profesionalitas, kompetensi, dan integritas ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator operasional di tingkat UPT yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Indeks ini menggambarkan tingkat kesesuaian antara kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, capaian kinerja, serta tingkat kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Dengan meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas ASN, UPT Stasiun KIPM Palembang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan mutu dan

keamanan hasil perikanan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan penguatan SDM aparatur antara lain peningkatan kompetensi ASN, peningkatan kinerja individu dan organisasi, serta penguatan integritas dan disiplin aparatur. IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja tersebut, khususnya pada aspek kualitas dan profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018, yang menjadi landasan resmi penilaian profesionalitas aparatur pemerintah. Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan objektif berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, pengembangan kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN. Dengan pendekatan ini, IK 10 memberikan gambaran yang utuh mengenai kualitas ASN dan menjadi dasar perumusan kebijakan pengembangan SDM aparatur di lingkungan UPT.

d. Tantangan SDM Aparatur dan Justifikasi IK 10

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur, kebutuhan penguasaan kompetensi teknis yang spesifik, serta pentingnya penguatan etika kerja dan integritas ASN. Dalam konteks pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan, profesionalitas ASN menjadi faktor penentu kualitas hasil inspeksi, sertifikasi, dan pelayanan publik.

IK 10 Indeks Profesionalitas ASN hadir sebagai instrumen strategis untuk mengukur dan mendorong peningkatan kualitas ASN secara berkelanjutan.

Capaian indeks yang tinggi mencerminkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas, kinerja yang optimal, serta disiplin dan integritas yang kuat, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis Renstra KKP dan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator nasional yang ditetapkan melalui PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2018.
- Indeks disusun berdasarkan empat dimensi utama: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN.
- Peningkatan profesionalitas ASN menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- Kualitas SDM aparatur berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan KKP, termasuk pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Data tersebut menunjukkan bahwa IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, dan kinerja organisasi.

IK11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM

Palembang (Nilai)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada hakikatnya merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja instansi pemerintah secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP yang baik diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas penggunaan sumber daya, memperkuat budaya kinerja, serta mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya penguatan dan peningkatan kualitas implementasi SAKIP tersebut dilaksanakan, antara lain, melalui kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), baik secara mandiri maupun melalui evaluasi eksternal.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara internal di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana manajemen kinerja telah diimplementasikan secara sistematis, terintegrasi, dan berorientasi pada pencapaian hasil (outcomes), sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di sektor publik.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun KIPM Palembang dihitung dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam melakukan penilaian atas kualitas implementasi SAKIP, yang mencakup empat aspek utama. Aspek perencanaan kinerja memiliki bobot sebesar 30 persen dan menilai keselarasan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang direncanakan. Aspek pengukuran kinerja dengan bobot 30 persen menilai ketepatan dan konsistensi pengukuran capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, aspek pelaporan kinerja yang berbobot 15 persen menilai kualitas penyajian informasi kinerja dalam laporan, termasuk keandalan dan keterpaduan data. Adapun aspek evaluasi kinerja dengan bobot 25 persen menilai efektivitas

pemantauan, analisis, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025, Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar **86**. Berdasarkan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan, realisasi capaian pada Tahun 2025 mencapai nilai **88,05**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **102,35%**. Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang telah berjalan dengan sangat baik dan melampaui target yang ditetapkan.

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini ditetapkan dengan target sebesar **82** dan terealisasi sebesar **82,80**, dengan tingkat capaian sebesar **100,97%**. Peningkatan target dan realisasi pada Tahun 2025 mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam memperkuat akuntabilitas kinerja, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Target dan Realisasi IK 11 Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) Pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	82	82,80	100,97	86	88,05	102,35

Berdasarkan Surat Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor: 1/BPPMHKP.1/RC.610/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Hasil Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, diketahui bahwa Nilai Penilaian Mandiri SAKIP UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)

Palembang Tahun Anggaran 2025 mencapai sebesar 88,05 dengan predikat A. Capaian tersebut menempatkan UPT Stasiun KIPM Palembang pada peringkat ke-17 dari 51 unit kerja di lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Capaian nilai dan peringkat tersebut mencerminkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di UPT Stasiun KIPM Palembang telah dilaksanakan secara konsisten dan efektif, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, hingga evaluasi internal kinerja. Implementasi SAKIP juga menunjukkan keterkaitan yang selaras antara perencanaan strategis, penetapan indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan dengan sasaran dan target kinerja organisasi.

Hasil Penilaian Mandiri SAKIP ini sekaligus menunjukkan bahwa UPT Stasiun KIPM Palembang telah melampaui target nilai minimal yang ditetapkan dalam penilaian mandiri SAKIP dan berada pada kategori kinerja yang baik. Capaian tersebut menjadi dasar bagi unit kerja untuk terus melakukan penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta penyempurnaan pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Ke depan, hasil penilaian ini akan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan SAKIP, memperkuat budaya kinerja dan akuntabilitas di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang, serta mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara keseluruhan. Data dan informasi lebih rinci mengenai hasil Penilaian Mandiri SAKIP disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.

Keterkaitan IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil merupakan fondasi utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Indikator Kinerja (IK) 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP karena mengukur tingkat kualitas implementasi SAKIP di tingkat unit pelaksana teknis. Penerapan SAKIP yang baik mendukung terciptanya budaya kinerja, peningkatan akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, KKP menetapkan sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dan berbasis hasil.

IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP merupakan indikator operasional yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai SAKIP mencerminkan sejauh mana UPT Stasiun KIPM Palembang telah

mengintegrasikan perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kinerja secara konsisten dan berkelanjutan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas dan tata kelola antara lain peningkatan kualitas SAKIP, peningkatan efektivitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan akuntabilitas pelaporan kinerja instansi pemerintah. IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja tersebut.

Penilaian SAKIP dilakukan dengan mengacu pada komponen utama SAKIP, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Penilaian mandiri menjadi bagian penting dalam upaya penguatan implementasi SAKIP, sekaligus sebagai sarana identifikasi kelemahan dan perbaikan berkelanjutan sebelum dilakukan evaluasi eksternal oleh instansi pembina.

d. Tantangan Akuntabilitas Kinerja dan Justifikasi IK 11

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain memastikan keterkaitan yang kuat antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja, serta mendorong seluruh unit kerja untuk berorientasi pada hasil (*outcome*). Tanpa penerapan SAKIP yang konsisten dan berkualitas, terdapat risiko ketidaksinkronan antara rencana dan realisasi, serta rendahnya efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam konteks tersebut, IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi yang penting untuk memastikan bahwa UPT Stasiun KIPM Palembang telah menerapkan SAKIP secara optimal. Peningkatan nilai SAKIP berdampak langsung pada penguatan budaya kinerja, peningkatan akuntabilitas penggunaan sumber daya, serta peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- SAKIP merupakan sistem nasional yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dilakukan secara mandiri dan eksternal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SAKIP.
- Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator utama kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- Peningkatan kualitas SAKIP berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran strategis Renstra KKP.

Data tersebut menunjukkan bahwa IK 11 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan, akuntabilitas kinerja, dan efektivitas pelaksanaan program.

IK12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil pengawasan, baik yang berasal dari pengawasan internal maupun eksternal, telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini tidak hanya menilai tingkat penyelesaian rekomendasi secara administratif, tetapi lebih menekankan pada pemanfaatan substansi rekomendasi tersebut dalam mendorong perbaikan tata kelola, proses bisnis, serta kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Stasiun KIPM Palembang.

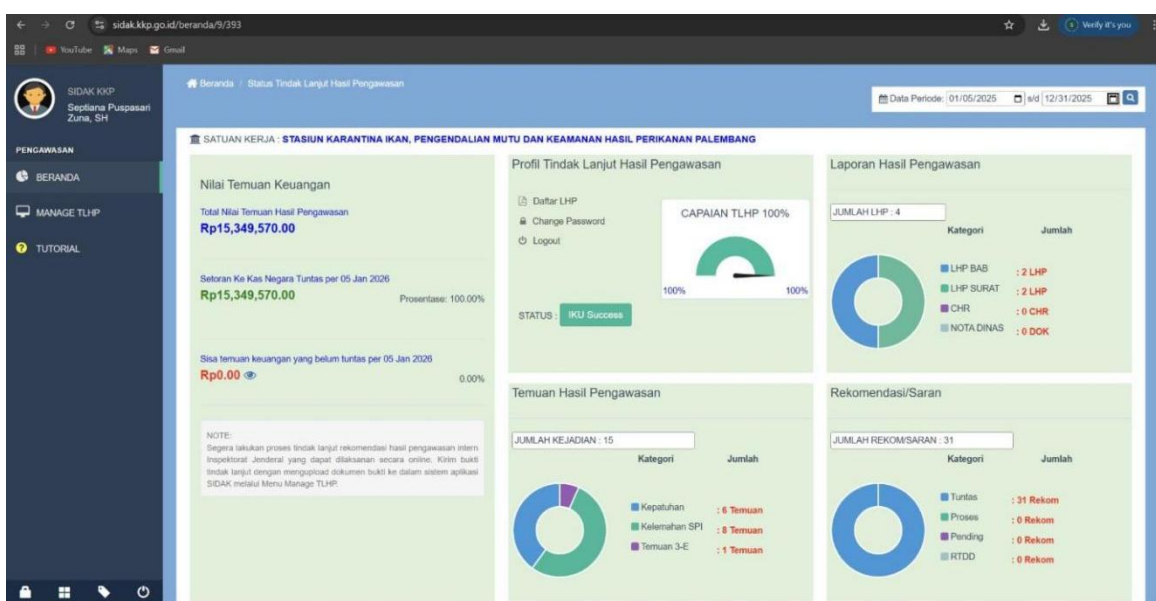
Rekomendasi hasil pengawasan pada umumnya memuat catatan, saran, dan perbaikan yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan ketidaksesuaian, kelemahan sistem, atau potensi risiko yang teridentifikasi dalam pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, pemanfaatan rekomendasi pengawasan menjadi bagian penting dalam siklus manajemen kinerja, karena berfungsi sebagai instrumen pengendalian sekaligus sarana pembelajaran organisasi untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Melalui indikator ini, UPT Stasiun KIPM Palembang berkomitmen untuk menjadikan setiap rekomendasi hasil pengawasan sebagai dasar dalam melakukan pembenahan kebijakan internal, penyempurnaan prosedur kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengendalian intern. Proses pemanfaatan rekomendasi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan terukur, sehingga hasil pengawasan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Persentase rekomendasi yang dimanfaatkan dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti dan digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja dengan total rekomendasi yang diterima dalam periode penilaian. Semakin tinggi

persentase capaian indikator ini, semakin menunjukkan tingginya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara sungguh-sungguh serta mengintegrasikannya ke dalam upaya perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang meliputi Audit, Reviu, dan Evaluasi, baik dalam bentuk surat maupun BAP, yang telah ditindaklanjuti dengan status proses dan/atau tuntas menjadi salah satu indikator kinerja pada Tahun 2025 dengan target sebesar 85%. Berdasarkan data pada aplikasi SIDAK Inspektorat Jenderal, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Palembang pada Tahun 2025 telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan capaian 100% tuntas, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan telah dilakukan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada gambar tersebut.



Gambar 4 . Nilai Rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK

Indikator ini mencerminkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola, penguatan sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan. Rekomendasi yang dimaksud dibatasi pada LHP kegiatan Audit, Reviu, dan Evaluasi, baik yang disampaikan dalam bentuk surat resmi maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan status tindak lanjut berupa proses maupun telah dinyatakan tuntas oleh Inspektorat Jenderal. Tindak lanjut rekomendasi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran untuk mencegah terulangnya permasalahan yang sama di masa mendatang.

Pada Tahun 2025, Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target capaian sebesar 85 persen. Target tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK) Inspektorat Jenderal, UPT Stasiun KIPM Palembang pada Tahun 2025 berhasil menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dengan realisasi capaian sebesar 100 persen. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini mencapai 117,65 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan.

Sebagai perbandingan, pada Tahun 2024 indikator ini memiliki target sebesar 80 persen dengan realisasi 100 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 125 persen. Capaian tersebut secara konsisten mencerminkan tingkat kepatuhan, akuntabilitas, serta komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang yang sangat baik dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja dan penguatan pengawasan internal, sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi IK 12 Target dan Realisasi IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	100	125	85	100	117,65

Keterkaitan IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menempatkan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pengendalian internal yang efektif sebagai prasyarat utama dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pengawasan yang efektif tidak hanya ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja organisasi.

Indikator Kinerja (IK) 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selaras dengan arah pembangunan KKP tersebut, karena menekankan pada pemanfaatan hasil pengawasan sebagai instrumen peningkatan kinerja, bukan sekadar penyelesaian administratif. Dengan demikian, indikator ini mendukung terwujudnya tata kelola yang transparan,

akuntabel, dan berorientasi pada hasil sebagaimana diarahkan dalam Renstra KKP 2025–2029.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya efektivitas pengendalian internal serta meningkatnya kualitas pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan.

IK 12 Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut. Melalui pengukuran tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan internal maupun eksternal, indikator ini memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola, proses bisnis, serta pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas antara lain peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan budaya perbaikan berkelanjutan. IK 12 berfungsi sebagai indikator turunan (cascading indicator) dari indikator-indikator tersebut di tingkat UPT.

Pengukuran IK 12 tidak hanya memperhitungkan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti, tetapi juga menilai sejauh mana substansi rekomendasi tersebut dimanfaatkan untuk mendorong perubahan dan perbaikan kinerja organisasi. Dengan demikian, capaian IK 12 menjadi bagian dari kontribusi data kinerja UPT terhadap pencapaian kinerja BPPMHKP dan KKP secara nasional.

d. Tantangan Pengawasan dan Justifikasi IK 12

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengawasan internal dan eksternal antara lain masih terbatasnya pemanfaatan hasil pengawasan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja, serta kecenderungan penyelesaian rekomendasi yang bersifat administratif. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi nilai tambah dari kegiatan pengawasan.

IK 12 hadir sebagai instrumen untuk memastikan bahwa hasil pengawasan benar-benar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka perbaikan kinerja. Peningkatan persentase pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan berdampak langsung pada penguatan tata kelola, peningkatan efektivitas proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan dan kinerja UPT Stasiun KIPM Palembang.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- Renstra KKP 2025–2029 menekankan pentingnya penguatan SPIP dan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- Hasil pengawasan internal (APIP) dan eksternal (BPK, Itjen, dan lembaga pengawas lainnya) menjadi sumber utama rekomendasi perbaikan tata kelola dan kinerja.
- Pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan yang efektif berkontribusi pada peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja.
- Indikator pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan menjadi salah satu ukuran kematangan tata kelola dan budaya perbaikan berkelanjutan di lingkungan KKP.

Berdasarkan data dan arah kebijakan tersebut, IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran Renstra KKP 2025–2029, khususnya pada aspek penguatan tata kelola pemerintahan, pengendalian internal, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang. Indikator ini menggambarkan sejauh mana seluruh tahapan pengadaan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal dilaksanakan melalui SPSE (30%)
3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Pada Tahun 2025, indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP ditetapkan dengan target nilai sebesar 76. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, capaian indikator ini pada Tahun 2025 mencapai nilai sebesar 91,98. Capaian tersebut menunjukkan bahwa UPT Stasiun KIPM Palembang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan tingkat kepatuhan yang sangat baik, melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 20. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tingkat kepatuhan pengadaan barang /jasa lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	80	91,98	114,97	76	100	131,5

Berdasarkan Surat/Nota Dinas Nomor: 41/SJ.7/PL.410/I/2026 tentang Penyampaian dan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup UPT Stasiun KIPM dan KHP Palembang, sebagaimana tercantum pada angka 31, diketahui bahwa seluruh rencana pengadaan pada Tahun Anggaran 2025 telah diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan demikian, persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP mencapai 100%.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen UPT Stasiun KIPM Palembang dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi PBJ, serta mendukung prinsip keterbukaan informasi publik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Data dan bukti pengumuman RUP PBJ pada SIRUP disajikan dalam lampiran Laporan Kinerja (LKjIP) UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025.

**Keterkaitan IK 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang
Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM
Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029**

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Salah satu aspek penting dari tata kelola tersebut adalah pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Indikator Kinerja (IK) 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang Diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang selaras dengan arah pembangunan

KKP tersebut, karena indikator ini mengukur tingkat kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan kewajiban pengumuman rencana pengadaan secara terbuka dan tepat waktu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta meningkatnya kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.

IK 13 Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis tersebut. Dengan memastikan seluruh RUP diumumkan pada SIRUP, UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan regulasi PBJ serta mendorong terciptanya proses pengadaan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek tata kelola dan pengelolaan keuangan antara lain peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. IK 13 berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator tersebut di tingkat unit pelaksana teknis.

Pengumuman RUP melalui SIRUP merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBJ dan menjadi salah satu parameter utama dalam penilaian kualitas pelaksanaan pengadaan. Capaian IK 13 menjadi bukti konkret penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan UPT Stasiun KIPM Palembang.

d. Tantangan Pengadaan Barang/Jasa dan Justifikasi IK 13

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa antara lain masih adanya risiko keterlambatan pengumuman rencana pengadaan, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, serta potensi rendahnya transparansi jika kewajiban pengumuman RUP tidak dilaksanakan secara optimal.

IK 13 hadir sebagai instrumen pengendalian untuk memastikan bahwa seluruh rencana pengadaan telah diumumkan secara terbuka melalui SIRUP. Peningkatan persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP berdampak langsung pada peningkatan transparansi, kepatuhan regulasi, serta kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yang pada akhirnya mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan UPT.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- Renstra KKP 2025–2029 menekankan penguatan tata kelola keuangan dan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
- Pengumuman RUP pada SIRUP merupakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Tingkat kepatuhan pengumuman RUP menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas PBJ di lingkungan KKP.
- Peningkatan kepatuhan PBJ berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penggunaan anggaran dan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan arah kebijakan dan data tersebut, IK 13 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki keterkaitan yang kuat dan strategis dengan Renstra KKP 2025–2029, khususnya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas (ZI) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan dan kesungguhan UPT Stasiun KIPM Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara sistematis dan berkelanjutan. Indikator ini menilai sejauh mana dokumen pendukung pembangunan ZI telah disusun, dilengkapi, dan diimplementasikan sesuai dengan pedoman serta ketentuan yang berlaku, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi persyaratan penilaian indikator proses dan indikator hasil, serta memperoleh nilai indikator hasil WBK di atas 75. Selain itu, unit kerja yang diusulkan untuk memperoleh predikat WBK harus telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya. Pengusulan unit kerja berpredikat WBK dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), sebagai bentuk komitmen pimpinan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Mengacu kepada Pedoman dalam PermenKP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM dilingkungan KKP : memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75

Dengan pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 26/PER-IRJEN/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani pada unit kerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Nilai Minimal yang Dipersyaratkan

untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) UPT Stasiun KIPM Palembang ditetapkan dengan target sebesar 75. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi indikator tersebut mencapai 75,65 atau sebesar 100,86 persen dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2025 target indikator ditetapkan sebesar 70 dengan realisasi sebesar 79,81, sehingga capaian kinerja mencapai 114 persen. Rincian target dan realisasi indikator tersebut disajikan pada Tabel 21.

Tabel 21. Target dan Realisasi IK 14 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	75	75,65	100,86	70	79,81	114

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor: B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026, UPT Stasiun KIPM dan KHP Palembang memperoleh hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dengan capaian yang menempatkan unit kerja pada peringkat ke-19 dari 47 unit kerja lingkup BPPMHKP. Capaian tersebut menunjukkan komitmen UPT Stasiun KIPM dan KHP Palembang dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagai penutup, hasil penilaian dan rincian capaian setiap komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam nota dinas tersebut disajikan secara lengkap pada Lampiran Laporan Kinerja (LKjIP) UPT Stasiun KIPM dan KHP Palembang Tahun 2025, dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

IK15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan instrumen yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. IKM disusun berdasarkan hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas persepsi, penilaian, serta pengalaman masyarakat atau pengguna jasa dalam menerima pelayanan. Dengan demikian, IKM mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan objektif mengenai kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh suatu unit kerja.

Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada UPT di lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik Survei Kepuasan Masyarakat (e-Survey SKM). Melalui sistem ini, masyarakat atau pengguna jasa diberikan kemudahan untuk menyampaikan penilaian dan persepsinya terhadap layanan yang diterima secara langsung, cepat, dan transparan. Akses pengisian survei dilakukan melalui Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat yang tersedia pada alamat <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login>, yang dapat diakses oleh pengguna jasa pada masing-masing dari 47 UPT lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Pemanfaatan sistem elektronik ini juga mendukung peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam proses pengumpulan serta pengolahan data survei.

Instrumen survei kepuasan masyarakat disusun dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang merepresentasikan unsur-unsur utama pelayanan publik. Unsur penilaian tersebut meliputi persyaratan pelayanan, sistem dan

prosedur, waktu penyelesaian pelayanan, biaya atau tarif, kesesuaian produk atau spesifikasi layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Penilaian terhadap unsur-unsur tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara menyeluruh, terukur, dan objektif, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, diperoleh capaian nilai IKM yang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun. Pada Triwulan I Tahun 2025, nilai IKM tercatat sebesar 93,36, kemudian mengalami peningkatan pada Triwulan II menjadi 93,41. Tren positif tersebut berlanjut pada Triwulan III dengan capaian sebesar 93,43, serta mencapai nilai tertinggi pada Triwulan IV sebesar 93,44.

Secara keseluruhan, rata-rata nilai IKM Tahun 2025 tercatat sebesar 93,41, yang jika dikonversikan ke dalam nilai indeks menghasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,74. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang berada pada kategori sangat baik, serta mencerminkan keberhasilan unit kerja dalam menjaga konsistensi mutu pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan serta harapan pengguna jasa. Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 22, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2025, target IKM ditetapkan sebesar 3,36 dan berhasil direalisasikan sebesar 3,74 atau mencapai 111,31 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2024, dengan realisasi IKM sebesar 3,73 atau mencapai 111,01 persen dari target, sehingga mencerminkan adanya tren peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 22. Target dan Realisasi IK15 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks) pada Tahun 2025

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	3,36	3,73	111,01	3,36	3,74	111,31

Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang melampaui target tersebut mencerminkan keberhasilan UPT Stasiun KIPM Palembang dalam menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa. Peningkatan kepuasan masyarakat tersebut didukung oleh penerapan standar pelayanan secara konsisten, peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia, optimalisasi proses pelayanan, serta perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Hasil survei kepuasan masyarakat ini selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan bagi UPT Stasiun KIPM Palembang dalam rangka melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Melalui tindak lanjut yang terarah dan berkesinambungan, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan UPT Stasiun KIPM Palembang dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor: 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPT Stasiun KIPM Palembang menunjukkan capaian yang menempatkan unit kerja pada **urutan ke-35** di antara UPT lingkup BPPMHKP. Capaian ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan

publik yang diberikan oleh UPT Stasiun KIPM Palembang serta menjadi dasar evaluasi dalam peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Sebagai penutup, data dan informasi lebih rinci terkait hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), termasuk nilai indeks dan komponen penilaian, disajikan dalam Lampiran Laporan Kinerja (LKjIP) UPT Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik pada periode selanjutnya.

Keterkaitan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang dengan Renstra KKP 2025–2029

a. Kesesuaian dengan Visi dan Arah Pembangunan KKP

Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025–2029 menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi dan daya saing, tetapi juga harus diiringi dengan pelayanan publik yang prima, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang sejalan dengan arah pembangunan KKP tersebut karena indikator ini mengukur secara langsung persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Melalui IKM, UPT memperoleh gambaran objektif mengenai kinerja pelayanan publik yang telah diberikan serta area perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

b. Keterkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra KKP

Salah satu tujuan strategis Renstra KKP 2025–2029 adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di bidang kelautan dan perikanan. Sasaran strategis yang relevan dengan tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas layanan publik yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

IKM Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang merupakan indikator operasional yang mendukung secara langsung pencapaian sasaran strategis tersebut. Nilai IKM mencerminkan tingkat keberhasilan UPT dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna jasa, sekaligus menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Keterkaitan dengan Indikator Kinerja Renstra KKP

Dalam Renstra KKP 2025–2029, indikator kinerja yang berkaitan dengan aspek pelayanan publik antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan KKP, serta penguatan budaya pelayanan prima. Indeks Kepuasan Masyarakat berfungsi sebagai indikator turunan (*cascading indicator*) dari indikator kinerja tersebut di tingkat unit pelaksana teknis.

Pengukuran IKM dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan persepsi, penilaian, dan pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran IKM menjadi sumber data penting bagi KKP dalam menilai kualitas pelayanan publik secara nasional serta sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan pelayanan.

d. Tantangan Pelayanan Publik dan Justifikasi IKM

Renstra KKP 2025–2029 mengidentifikasi bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan, kemudahan, kepastian, dan kualitas layanan, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi. Tanpa pengukuran kepuasan masyarakat yang sistematis, perbaikan pelayanan berpotensi tidak tepat sasaran.

Dalam konteks tersebut, IKM menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat sekaligus memetakan aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan nilai IKM berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik, penguatan citra institusi, serta peningkatan efektivitas pelayanan karantina ikan, pengendalian mutu,

dan keamanan hasil perikanan.

Data dan Konteks Pendukung (Renstra KKP 2025–2029)

- Renstra KKP 2025–2029 menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan.
- Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik berdasarkan persepsi pengguna layanan.
- Hasil pengukuran IKM menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak lanjut perbaikan pelayanan serta peningkatan standar pelayanan publik.
- Peningkatan nilai IKM berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis KKP dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan dan data tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang memiliki keterkaitan yang kuat dan strategis dengan Renstra KKP 2025–2029, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan KKP.

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Alokasi anggaran UPT Stasiun KIPM Palembang yang tercantum dalam DIPA pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.504.122.000,00. Dalam pelaksanaannya, realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 mencapai Rp5.240.368.818,00, atau setara dengan 95,21 persen dari pagu anggaran yang tersedia.

Capaian realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Stasiun KIPM Palembang telah berjalan secara efektif dan optimal, sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Rincian realisasi penyerapan anggaran Stasiun KIPM Palembang berdasarkan jenis kegiatan serta jenis belanja selanjutnya disajikan pada tabel berikut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Selanjutnya, rincian penyerapan anggaran per kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Penyerapan Anggaran Per Kegiatan Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP pada Stasiun KIPM Palembang	5.137.042.000	5.038.472.114	98.08
2	Manajemen Mutu	182.080.000	162.079.995	89.02
3	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	185.000.000	39.816.709	21.52
Total		5.504.122.000	5.240.368.818	95.21

**Tabel 24. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Stasiun KIPM
Palembang Tahun 2025**

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	3.515.359.0000	3.490.390.685	99,29
2	Belanja Barang	1.775.497.000	1.721.689.198	96.67
3	Belanja Modal	-	-	-
4	PNBP	213.266.000	28.279.935	13.26
Total		5.504.122.000	5.240.359.818	95,21

D. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen perencanaan yang memuat rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja dilengkapi dengan target yang jelas sebagai tolok ukur capaian kinerja yang harus diwujudkan. Dalam rangka mencapai target tersebut, dirumuskan berbagai langkah strategis dan operasional yang dituangkan secara rinci ke dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi disusun dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendukung yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, lengkap dengan jadwal atau tahapan waktu pelaksanaannya. Penyusunan rencana aksi ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, pelaksanaan rencana aksi tersebut dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini merupakan bagian dari fungsi pengendalian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul, serta melakukan langkah perbaikan apabila diperlukan agar target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja UPT Stasiun KIPM Palembang telah dilaksanakan

secara keseluruhan. Secara lebih rinci, realisasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 25 berikut. Tabel tersebut disusun sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara indikator kinerja, target yang ditetapkan, kegiatan pendukung yang dilaksanakan, serta capaian kinerja yang direalisasikan sepanjang Tahun 2025.

Tabel ini menyajikan informasi mengenai Indikator Kinerja Kegiatan, target tahunan, kegiatan pendukung, serta realisasi capaian kinerja yang diukur dan dipantau secara bertahap pada setiap triwulan. Penyajian data secara periodik dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan capaian kinerja, sekaligus sebagai dasar dalam melakukan pengendalian, evaluasi, dan perbaikan pelaksanaan kegiatan apabila diperlukan.

Tabel 25. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2025		Realisasi %
					T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Kelautan Perikanan	70	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	0	0	70	100	70	100	70	100	70	100	142,9
		70	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	0	0	70	100	70	100	70	100	70	100	142,9
		1	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	1	1	0	0	1	1	1	1	1	2	200

		99	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	99	100	99	100	99	100	99	100	99	100	101
2 3	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	75	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	%	75	89,91	75	85,75	75	87,8	75	88,2	75	86,91	115,88
		75	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	%	-	-	-	-	-	-	75	91	75	91	121,33
	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian	92	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Indeks	-	-	85	94,45	-	-	92	96,60	92	96,60	105
		71,5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Indeks	-	-	-	-	-	-	71,5	100	71,5	100	120
		100	Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Nilai	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100

		82	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	Nilai	-	-	75	85,77	-	-	82	89,35	82	89,35	108,96
		86	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Nilai)	Nilai	-	-	-	-	-	-	86	88,05	86	88,05	102,35
		85	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	Nilai	85	100	85	100	85	100	85	100	85	100	117,64
		76	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	131,5
		70	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)	%	-	-	-	-	-	70	79,81	114	70	79,81	114
		3,36	Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (Indeks)	%	88	90,87	88	93,41	88	93,43	3,36	3,74	3,36	3,74	111,30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan terhadap seluruh program dan kegiatan Stasiun KIPM Palembang selama Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja yang dilakukan melalui aplikasi manajemen kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun KIPM Palembang sepanjang Tahun 2025 berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Capaian tersebut tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 114,74 %, yang menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi dalam merealisasikan sasaran, indikator kinerja, serta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Capaian ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja secara terintegrasi.
2. Nilai Kinerja Organisasi tersebut merupakan akumulasi dan rata-rata capaian dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Stasiun KIPM Palembang, yang masing-masing sasaran diukur keberhasilannya melalui 15 (lima belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 14 (empat belas) Indikator Kinerja Kegiatan berhasil dicapai melebihi target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan dapat direalisasikan sesuai dengan target. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, terarah, dan konsisten dengan kebijakan serta standar yang berlaku, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan pada indikator tertentu.
3. Dari aspek pengelolaan keuangan, realisasi anggaran Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp 5.240.368.818,00. atau 95.21 % dari total alokasi anggaran sebesar Rp5.504.122.000,00. Tingginya tingkat realisasi anggaran tersebut mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran secara tertib, efisien,

dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila realisasi anggaran tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja organisasi yang mencapai 114,74 %, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya anggaran telah dilakukan secara cukup efisien dan efektif, karena dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif lebih kecil mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan.

4. Secara keseluruhan, capaian kinerja Stasiun KIPM Palembang Tahun 2025 mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan. Hasil evaluasi ini sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi organisasi untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai, meningkatkan kualitas layanan publik, serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

B. Rencana Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas hasil pengukuran dan evaluasi kinerja serta untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, Stasiun KIPM Palembang menyusun rencana perbaikan yang diarahkan pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja pada periode berikutnya. Rencana perbaikan ini disusun sebagai bentuk komitmen organisasi terhadap perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain melalui percepatan pencapaian target dan realisasi kinerja pada tahun anggaran berikutnya, dengan melakukan penguatan perencanaan kegiatan sejak awal tahun, penyusunan jadwal pelaksanaan yang lebih terukur, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dan pemangku kepentingan terkait. Percepatan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi keterlambatan pelaksanaan kegiatan serta memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal dan tepat waktu.

Selain itu, Stasiun KIPM Palembang akan melakukan peningkatan kualitas pengendalian internal melalui pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman terhadap target kinerja. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi pencapaian kinerja, memperbaiki indikator yang belum optimal, serta mendukung terwujudnya kinerja organisasi yang lebih baik dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM PALEMBANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)

T / R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	0	70	70	70	70	70	70	70	70
Realisasi	0	100	100	100	100	100	100	100	
% Capaian	0	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	

Catatan :

Q1,Q2,Q3Q4 = Capaian selama Triwulan 1, TW 2, TW 3 dan TW 4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon I lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP

ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan

- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Palembang saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan, optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
 - Pada Triwulan IV tahun 2025 BPPMHKP Palembang melakukan sertifikasi terhadap :
 - 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu: Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di UPR Rendi Robiansyah dan UPR Muhammad Ramadani
 - 5 (lima) sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
 - 1 (satu) Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) di PT. Bina San Prima Cabang Palembang
 - Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :

$$\% \text{ Sektor Produksi Prtmer} = \frac{CBIB + CPIB \text{ Benih} + CDOIB}{3} \times 100 \%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB

B = Persentase Unit menerapkan CPIB

C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB

D = Persentase Usaha menerapkan CPOIB

E = Persentase Usaha menerapkan CDOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

F = Persentase Usaha menerapkan CPIB Kapal

xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*)

$$\% x = \frac{3}{3} \times 100 \% = 100 \%$$

- Output dari kegiatan ini terdiri dari :

1. 2 (dua) jenis sertifikasi yaitu: Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di UPR Rendi Robiansyah dan UPR Muhammad Ramadani
2. 5 (lima) sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
3. 1 (satu) Sertifikasi Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) di PT. Bina San Prima Cabang Palembang

- Realisasi anggaran sampai dengan TW IV Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Lembaga Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang di Validasi	95.000.000	16.560.340	469.660

- Anggaran Sertifikasi Produksi Primer total Rp.95.000.000 (Sembilan puluhh lima juta rupiah), namun karena di blokir anggaran yang dapat di gunakan hanya sebanyak Rp. 17.030.000 (Tujuh belas juta tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 16.560.340 (enam belas juta lima ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah)
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi CPIB pada TW IV sebanyak 20 orang Inspektur Mutu dan melibatkan penyuluh perikanan di kabupaten /kota lokasi sertifikasi

Akar Masalah

1. Kapal Perikanan yang melaut di Perairan Sumatera Selatan tidak memiliki ijin resmi yang di keluarkan baik oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah daerah setempat karena tidak memiliki PAS KECIL
2. Awak kapal perikanan belum memiliki sertifikat Bimbingan Teknis Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas kapal perikanan yang merupakan salah satu persyaratan untuk permohonan Sertifikasi CPIB Kapal perikanan
3. Beberapa wilayah di kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki Manajer Pengendali Mutu (MPM)
4. Kurangnya pelatihan ke pembudidaya ikan terkait dengan Cara Budidaya Ikan yang Baik

Tindakan Yang Telah di Laksanakan

1. BPPMHKP Palembang membuka layanan jemput bola agar dapat membantu Pembudidaya Ikan, Pembenih Ikan, Pemilik Kapal, Distributor Obat Ikan, dan Pengolahan Ikan untuk sertifikasi hulu hilir
2. BPPMHKP Palembang telah melakukan Rapat koordinasi dengan SATWAS PSDKP Palembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, Pelabuhan Perikanan Sungsang, Syahbandar Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten / Kota terkait dengan Proses Perijinan Kapal Perikanan yang beroperasi di perairan Sumatera Selatan sebagai salah satu syarat dasar pengajuan sertifikasi CPIB Kapal. Pelaksanaan di laksanakan tanggal Kamis 27 November 2025

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melakukan koordinasi dengan PPN Sungai Liat dan Dinas Kelautan Perikanan terkait akselerasi Sertifikasi awak kapal sebagai bagian dari upaya pembinaan dari Dirjen Teknis	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Mengetahui,
Kepala SKIPM Palembang,


Moyok Triyanto, SE, S.Pi, M.Pi

Palembang, 30 Desember 2025
Penanggungjawab Indikator Kinerja


Erik Ariyanto, S.Pi

**DOKUMENTASI INSPEKSI
CARA PEMBENIHAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)
CARA DISTRIBUSI OBAT IKAN YANG BAIK (CDOIB)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS

KKP KKP
2024

BADAN MUTU KKP PALEMBANG INSPEKSI DAN SERTIFIKASI CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB)

SELASA, 28 OKTOBER 2023



BPP
MMPK BADAN MUTU KKP
PALEMBANG

f o x e BPPMPPALEMBANG



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



KKP

KKP
2019

BADAN MUTU KKP PALEMBANG
RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PERCEPATAN SERTIFIKASI CARA PENANGANAN
IKAN YANG BAIK (CPIB) DIATAS KAPAL

KAMIS, 27 NOVEMBER 2015



BPP
BADAN MUTU KKP
PALEMBANG





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



EKONOMI BIRU
INDONESIA EMAS



BPP
MHPK
BADAN MUTU KKP
PALEMBANG

f o X e BPPHPPALDIKAM

PALEMBANG



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN
KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KIPM PALEMBANG
TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IKU : Ratio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99	101	99
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100		
%Capaian	101	101	101	101	101	101	101		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Ratio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).
- Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Ratio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.
- Sertifikasi Kesehatan adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.
- Capaian IKU ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$X = (A-B) / A$$

X : rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)
A : HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP
B : jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan
Xn : jumlah dari unsur pembentuk
- Capaian kegiatan sertifikasi ekspor pada triwulan 4 tahun 2025 ini adalah: terdapat sertiifikat ekspor produk perikanan dan semuanya tidak tertolak di negara tujuan.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Tidak ada masalah sertifikasi ekspor

Tindakan yang telah dilaksanakan
Membuka forum komunikasi dengan UPI melalui saluran komunikasi grup Whatsapp

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Terus mensosialisasikan aturan terbaru dari negara tujuan ekspor	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4

Hasil TL Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab	Periode
Komunikasi antara Stasiun KIPM Palembang dan UPI selalu terjaga untuk mengupdate aturan-aturan yang berlaku	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4



Palembang, 05 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Pengendalian
Kesehatan Ikan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

drh. Arief Sulistiyono, M.Sc

Sertifikasi SMKHP:

Daftar Permohonan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Selesai

Id	No. Aji	Tanggal Aji	NPWP	Nama	Tujuan	Jenis Kom...	Perikanan	Status	Action
+	AE08.0X020.2500024	2025-12-27 15:47:39	0014618961312000	PT. Agung Jayasari Sakti	Italy	Ikan Non Hidup	Konsumsi	Terbil Sertifikat	Cetak Lihat Batal Sertifikat History Cetak Lihat
+	AE08.0X020.2500022	2025-12-23 08:33:54	0015424732048000	PT. LESTARI MAGRIS	Belgium	Ikan Non Hidup	Konsumsi	Terbil Sertifikat	Batal Sertifikat History Cetak Lihat
+	AE08.0X020.5000021	2025-10-21 14:43:53	0015424732048000	PT. LESTARI MAGRIS	JAPAN	Ikan Non Hidup	Konsumsi	Terbil Sertifikat	Batal Sertifikat History Cetak Lihat

Layanan Laboratorium & Jasa Lainnya

Layanan Billing Simponi

The screenshot displays a WhatsApp web interface on a Windows 10 desktop. The browser's address bar shows 'web.whatsapp.com'. The left sidebar lists several contacts, with 'UPI DAN UMKM BADAN MUTU KKP PALEMBANG' selected. The main chat area shows a conversation with this contact. The messages are as follows:

- Message 1 (from contact):**

Assalamualaikum, selamat pagi Bapak/Ibu,

Kami informasikan bahwa PT. LESTARI MAGRIS telah mengajukan permohonan Traces dengan nomor ajuk: IMPORT EU ID.2025.0096252

Official Certificate tersebut mohon dapat di cetak hari ini ya Bapak/Ibu.

Terima kasih 🙏

Selasa, 08:40
- Message 2 (from contact):**

Assalamualaikum, selamat siang Bapak/Ibu,

Wassalamualaikum siap mas yodi

08:55
- Message 3 (from contact):**

Assalamualaikum, selamat siang mas yodi

Wassalamualaikum siap mas yodi

Terimakasih bu Ena

18:33

The Windows taskbar at the bottom shows the Start button, a search bar, and several application icons. The system clock in the bottom right corner indicates the date is 05/11/2024 and the time is 9:48.

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN
KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KIPM PALEMBANG
TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IKU : Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Palembang (%)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	0	70	70	70	70	70	70	142,9	70
Realisasi	0	100	100	100	100	100	100		
%Capaian	0	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9	142,9		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen yang meliputi: HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar mutu dan keamanan pangan hasil kelautan dan perikanan dicapai melalui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Capaian IKU ini diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\%X = ((A+B) / x_n) \times 100\%$$

$$\%X : \text{persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen}$$

$$A : \text{jumlah penerbitan sertifikat HACCP ruang lingkup produk}$$

$$B : \text{jumlah penerbitan sertifikat SKP yang menerapkan GMP SSOP}$$

$$X_n : \text{jumlah dari unsur pembentuk}$$
- Capaian kegiatan sertifikasi pasca panen pada triwulan 4 tahun 2025 ini adalah: 2 sertifikasi HACCP (PT. Cek Molek Indonesia dan CV. Pesona Musi) dan 10 sertifikasi SKP (PT. Satu Putra Barokah Makmur, Pempek Cek Ya, Pempek Umiabi, IKM Rizkyanti ruang lingkup kerupuk ikan dan pempek ikan, Poklahsar JM Ponton Lame, Izu Pempek, PT. Cek Molek Indonesia, Pempek Bunda Rara dengan ruang lingkup pempek ikan dan pempek kriuk).

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Unit Pengolahan skala UMKM belum mengetahui prosedur penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik

Tindakan yang telah dilaksanakan

Berkoordinasi dengan instansi lain (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi) dan Penyuluh Perikanan dalam hal sosialisasi/pelatihan SKP terhadap UMKM.
Stasiun KIPM Palembang telah melaksanakan kegiatan inspeksi dan/atau surveillance SKP dan HACCP di UPI dan UMKM

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Berkolaborasi dengan instansi terkait dan UPI/UMKM terkait regulasi terbaru tentang penerbitan sertifikat HACCP dan SKP	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4

Hasil TL Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab	Periode
Stasiun KIPM Palembang telah berhasil menerbitkan sertifikat HACCP dan SKP, serta sertifikat keterangan HACCP kepada UPI atau UMKM yang ada di Sumatera Selatan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4



Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Palembang

Yoyok Fibrianto, SE., S.Pi., M.Pi

Palembang, 05 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Pengendalian
Kesehatan Ikan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan

drh. Arief Sulistiyono, M.Sc

Sertifikasi SKP:

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your toolbar

Set as default

Search Keyword: Nama UPI

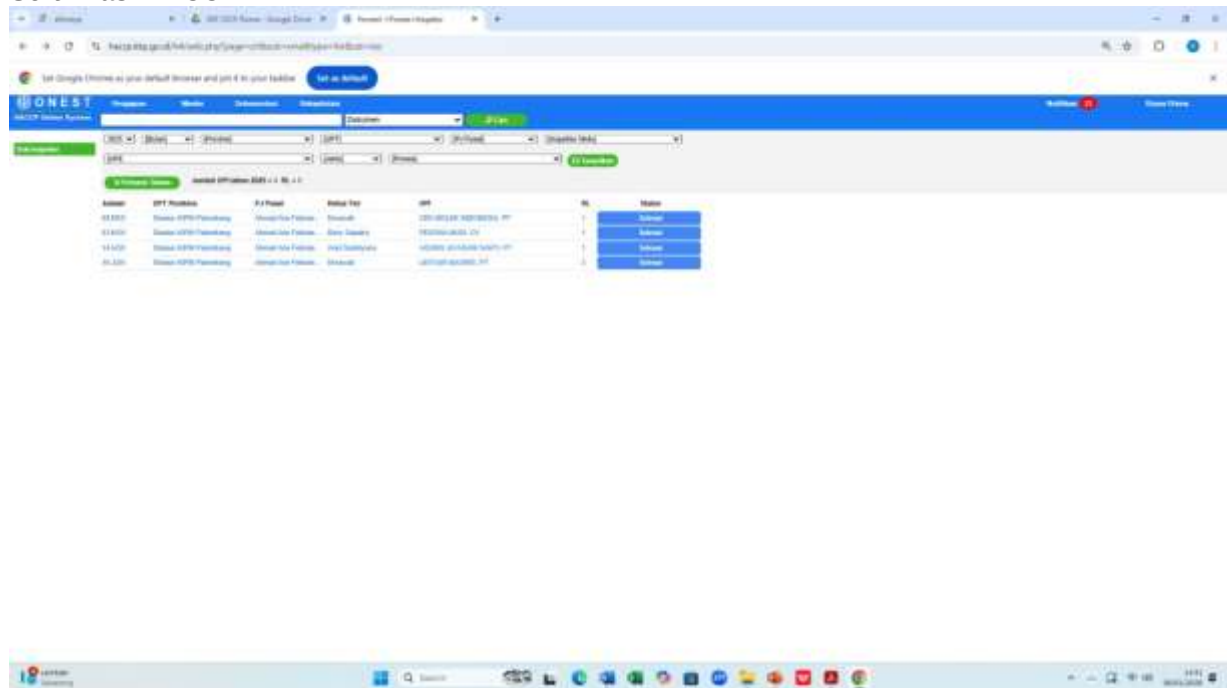
Show: 25

#	Nama UPI	Produk ID	Produk EM	No. Seri	No. SKP	Tgl Terbit / Expired	Rank	Alamat	Provinsi	Status/DIRO lain DIR	Product SKP Product SKP
1	PT. SATU PUTRA BAROKAH MANASSA	Daging Rusa Lantai	Fish Meat	43173	411051619471983032025	31-12-2025 / 31-12-2027	B	Jl. Pengiran Ratu Jakabaring, Komplek Pagar Ratu Higienis, Kot. 18 Ulu, Kec. Jakabaring, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-252508194519300411543 NO: 021301024018100010004	Product SKP Product SKP
2	PERMEX CUK V6	Pempok Katak	Chicken Pempok	43154	413861619471983032025	31-12-2025 / 31-12-2027	C	Jalan Sedukuh Puri, Komplek No.18, Kot. 08 Ulu, Kec. 08 Ulu, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-2021111121199632379 NO: 027801030027880000001	Product SKP Product SKP
3	PERMEX BARAK	Pempok Rusa	Fish Pempok	43056	408661619471983032025	29-12-2025 / 29-12-2027	B	Jl. ARBP N, Uluw No.596, DesaWakurubah Arie Mawung Kot. Mawung Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-202102130005320126061 NO: 1103023005260000010001	Product SKP Product SKP
4	KSM BUKUMAH	Pempok Rusa	Fish Chicken	42076	408661619471983032025	03-12-2025 / 03-12-2027	A	Jl. KSM Anyik RT 025 RW 005, Kot. 3-4 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-202111052112288601989 NO: 140621001943100000003	Product SKP Product SKP
5	KSM BUKUMAH	Pempok Rusa	Fish Pempok	42075	408671619471983032025	03-12-2025 / 03-12-2027	A	Jl. KSM Anyik RT 025 RW 005, Kot. 3-4 Ulu, Kec. Seberang Ulu 1, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-202508220054264174033 NO: 140621001943100010005	Product SKP Product SKP
6	PURBAWATI DORICOR LAM	Rasa Rapa	Smoked Fish	42062	403341619471983032025	25-11-2025 / 25-11-2027	C	Jl. Sekejo Pedemp, Kot. Sook Baru Kec. Sekejo Kac. Muih Kemapanan Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Dirajuga ID: 1-202510230040119794280 NO: 08062251126640010001	Product SKP Product SKP

2:11 PM 1/5/2026

Set Google Chrome as your default browser and pin it to your taskbar												
	I	IZDI PEMBUKA	Pengpek Ikan	Fish Pengpek	42517	404491659011.N/O/2025	10-11- 2025 / 10-11- 2027	C	Jalan Mayor Zeti Rumpok Pusat Jalan Cendekian 10, Desa/Kelurahan Kaditoni, Kam. Kaditoni, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Desatupul ID 1 20251013091138571940 NO 28522964341000010008	View
	II	PT CSR MOLEK INDONESIA	Pengpek Ikan	Fish Pengpek	42300	403001659011.N/O/2025	10-11- 2025 / 10-11- 2027	B	Jalan Wreghyn V Imendusan no 71368 , Kam. Sriyag Agung , Kec. Sri Serot 1, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Desatupul ID 1 202506041540075722049 NO 101222004730000020000	View
	III	PEMPEK BUNDA RAHA	Pengpek Ikan	Fish Pengpek	42035	300601659011.N/O/2025	24-10- 2025 / 24-10- 2027	C	Jl Haskelulang 2 gg anyelir no 56 rt rw992/002, Kam. Bontobato, Kec. Sri Serot Sala, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Desatupul ID 1 202508081912000403766 NO 91201110200000010000	View
	IV	PEMPEK BUNDA RAHA	Pengpek Ikan	Crunchy Pengpek	42034	300001659011.N/O/2025	24-10- 2025 / 24-10- 2027	C	Jl Haskelulang 2 gg anyelir no 56 rt rw992/002, Kam. Bontobato, Kec. Sri Serot Sala, Kota Palembang Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Desatupul ID 1 202508111004300003013 NO 01201110200000010000	View

Sertifikasi HACCP:



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) KETUA TIM KERJA PENGENDALIAN
KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
STASIUN KIPM PALEMBANG
TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan									
Nama IKU : Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT SKIPM Palembang (lokasi)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	1	0	1	1	1	1	1	2	1
Realisasi	1	0	1	1	1	2	2		
%Capaian	1 (100%)	0	1 (100%)	1 (100%)	1 (100%)	2 (200%)	2 (200%)		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoksin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP
- Lokasi kegiatan pengawasan ini dilakukan di Kota/kabupaten yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Kegiatan dilakukan melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, dan bahan berbahaya (formalin).
- Capaian kinerja IKU ini dihitung dengan rumus:

$$\%X = A/B \times 100\%$$

$$= 1/1 \times 100\%$$

$$= 100\%$$

%X : persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI
A : jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI
B : jumlah kab/kota yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Terjadi efisiensi anggaran pada perjalanan dinas dalam rangka pengawasan mutu produk hasil perikanan ke kabupaten yang rentan menjadi sumber bahan baku industri maupun konsumsi domestik yang bebas dan cemaran marine biotoksin dan cemaran kimia berbahaya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Dalam rangka menjalankan Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pengawasan mutu produk hasil perikanan tetap dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern yang berada di Kota Palembang. Pada triwulan 4 ini kegiatan dilakukan di supplier Budiman dan supplier Romi yang beralamat di Banyuasin. Sehingga pada tahun 2025 capaian kegiatan inpres 01 tahun 2017 adalah 2 (Kota Palembang pada triwulan 1 dan 3, dan Kabupaten Banyuasin pada triwulan 4).

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4

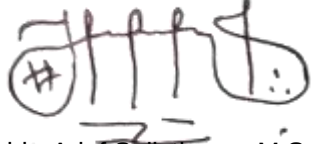
Hasil TL Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab	Periode
Hasil parameter uji organoleptik, mikrobiologi, dan bahan berbahaya (formalin) tidak ditemukan pada produk perikanan	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Palembang



Yoyok Fiorianto, SE., S.Pi., M.Pi

Palembang, 05 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Pengendalian
Kesehatan Ikan, Mutu, dan
Keamanan Hasil Perikanan



drh. Arief Sulistyono, M.Sc

PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM NEGERI

DALAM RANGKA IMPLEMENTASI INPRES 01 TAHUN 2017

Nama Kegiatan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Dalam Negeri di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
	Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kegiatan ini dilaksanakan pada unit pengumpul / supplier di Kota Palembang dan sekitarnya. Adapun lokus kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik Tahap 3 2025 di unit pengumpul / supplier di Desa Sungsang Kabupaten Banyuasin adalah : 1 . Unit Pengumpul / Supplier : Budiman Group a. Udang Pink b. Ikan Bawal putih c. Ikan Kakap batu d. Ikan Parang-parang e. Ikan Tenggiri f. Ikan Malong g. Cumi-cumi h. Ikan Botan i. Udang Tiger j. Ikan Sebelah k. Ikan Kembung l. Ikan Selar m. Ikan Bandeng n. Ikan Ekor kuning o. Ikan Salam 2. Unit Pengumpul / Supplier : Romi a. Udang Tiger b. Udang Pink c. Ikan Malong d. Ikan Sebelah e. Ikan Bawal Putih f. Cumi-cumi g. Ikan Botan h. Ikan Kembung i. Ikan Selar j. Ikan Bandeng k. Ikan Kakap Batu l. Ikan Tenggiri m. Ikan Parang-parang n. Ikan Ekor kuning o. Ikan Salam

Unit Kerja yang Terlibat	1. Stasiun KIPM Palembang
Petugas	1. Bony Saputra, S. St. Pi 2. Sri Indriastri, S. Si 3. Siti Aidia Mutia, S. Pi 4. Rama Delfansyah, A. Md 5. Yusuf Yudhaperwira, A.Md 6. Mega Deswita
Waktu Pelaksanaan	30 Oktober 2025 Pukul : 08:00 WIB s.d 16.00 WIB
Dasar Pelaksanaan Kegiatan	1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor, 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 3. Keputusan Kepala BKIPM No. 45/KEP-BKIPM/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Penyediaan Pangan Sehat 4. DIPA Stasiun KIPM No DIPA-032.13.2.567481/2025 5. Surat Tugas dari Kepala Stasiun KIPM Palembang No. B.616/SKIPM.PLG/KP.440/IX/2025 tanggal 29 Oktober 2025.

DOKUMENTASI KEGIATAN INPRES 01/2017

Unit Pengumpul / Supplier: Budiman Group









Unit Pengumpul / Supplier : Romi







C

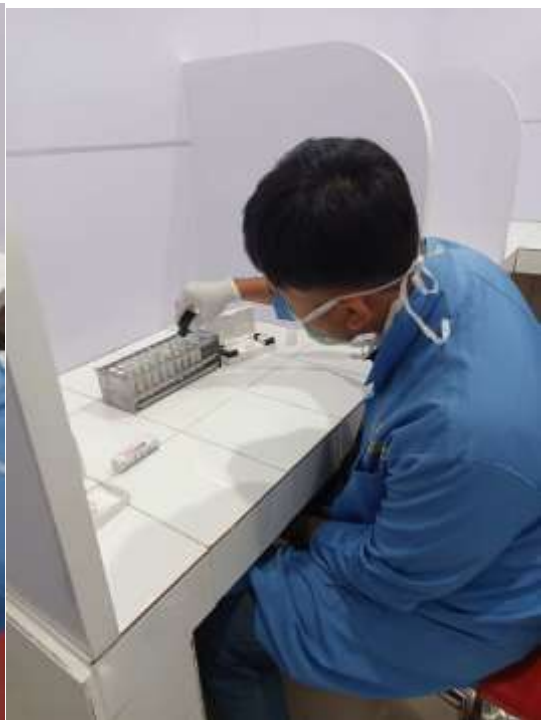




Pengujian Organoleptik



Pengujian Formalin



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) KETUA TIM KERJA PENERAPAN
STANDAR DAN METODE UJI KESEHATAN IKAN, MUTU, DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN STASIUN KIPM PALEMBANG TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis : Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar									
Nama IKU : Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Palembang (Nilai)									
T/R	Tahun 2025							Capaian Th.2025	Target Th.2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	121,33	75%
Realisasi	-	-	-	-	91	91	91	-	
%Capaian	-	-	-	-	121,33	121,33	121,33	-	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

- Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
- ISO/IEC 17020 merupakan standar yang mengatur persyaratan untuk lembaga inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis. Standar ini bertujuan memastikan bahwa lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai standar yang ditetapkan.
- Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:
 1. Persyaratan Umum
 2. Persyaratan Struktural
 3. Persyaratan Sumber Daya
 4. Persyaratan Proses
 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Untuk menghitung nilai IKU pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi, maka digunakan rumus :

$$X = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Rata -rata nilai tingkat pemenuhan klausa dalam ISO 17020 yang terverifikasi

X^- = Rata rata
 $\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$ = Nilai tingkat pemenuhan ke – 1, 2 , 3, ..., n
n = Banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi memerlukan komitmen dan konsistensi lembaga dalam penerapannya. Untuk itu perbaikan secara terus menerus perlu dilaksanakan agar standar penerapan ISO 17020 dapat terus berjalan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Stasiun KIPM Palembang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu ke hilir di Kalimantan Utara terus menerapkan ISO 17020 secara konsisten. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai kegiatan penerapan ISO diantaranya Kaji Ulang Manajemen, Kaji Ulang Dokumen, Audit Internal, Peningkatan kompetensi personil, dsb. Temuan-temuan audit internal dan eksternal terus dilakukan perbaikan agar peningkatan secara berkelanjutan dapat dipertahankan di Stasiun KIPM Palembang.

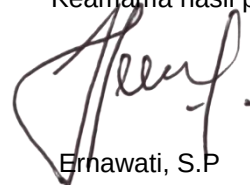
Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Mempertahankan status akreditasi pada penerapan system manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Ketua Tim Kerja Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan Mutu dan Keamama hasil perikanan	Q4
Hasil TL Rekomendasi Rencana Aksi Triwulan Sebelumnya	Penanggung Jawab	Periode
Telah dilakukan penerapan system manajemen mutu SNI ISO/IEC 17020:2012	Ketua Tim Kerja Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan Mutu dan Keamama hasil perikanan	Q4

Mengetahui,
Kepala Stasiun PPMHKP Palembang



Yoyok Fibranto, SE., S.Pi., M.Pi

Palembang, 05 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Penerapan Standard dan Metode Uji Kesehatan Ikan Mutu dan Keamama hasil perikanan



Ernawati, S.P



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

SURAT TUGAS

NOMOR: B.1046/BPPMHKP.2/KP.440/VIII/2025

Menimbang : Bahwa demi kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Pusat Manajemen Mutu.

Dasar : DIPA Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan TA 2025 Nomor DIPA: 032.13.1.440807/2025. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

Memberi Tugas :

Kepada : (Daftar Nama Terlampir).

Untuk : 1. Melaksanakan verifikasi penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012 secara jarak jauh (*virtual/remote verification*) pada Stasiun KIPM Palembang pada tanggal 28 Agustus 2025.
2. Setelah selesai melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan kepada atasan langsung.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Jakarta, 20 Agustus 2025
Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Lampiran Surat Tugas
 Nomor : B.1046/BPPMHKP.2/KP.440/VIII/2025
 Tanggal : 20 Agustus 2025

NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUGASKAN

No.	Nama	Gol.	NIP	Jabatan	Tujuan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Mardiani, S.Pi., M.Si	IV/a	197503082001122002	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Madya Pusat Manajemen Mutu	Stasiun KIPM Palembang	28 Agustus 2025	Verifikasi secara jarak jauh (<i>virtual/remote verification</i>)
2	Anita Yuni Praptiwi, S. Pi	III/c	198110232005022001	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Muda Pusat Manajemen Mutu	Stasiun KIPM Palembang	28 Agustus 2025	Verifikasi secara jarak jauh (<i>virtual/remote verification</i>)
3	Nur Lailiyah, S.Sos., S.Pi	III/d	197811252003122004	Inspektur Mutu Hasil Perikanan Ahli Pertama Balai KIPM Surabaya II	Stasiun KIPM Palembang	28 Agustus 2025	Verifikasi secara jarak jauh (<i>virtual/remote verification</i>)

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

Jakarta, 20 Agustus 2025
 Kepala Pusat Manajemen Mutu,



Woro Nur Endang Sariati

	PROSEDUR		OTORITAS KOMPETEN
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
FL/05/PMM/014	Tanggal : 1 Juli 2025	Edisi : 1 / Revisi : 1	Hal : 1 dari 2

LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

Nama Unit Kerja	: Stasiun KIPM Palembang	Tanggal : 28 Agustus 2025
Alamat	: Jl. Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang	
Pimpinan Unit Kerja	: Yoyok Fibrianto	
Nama Verifikator	: Mardiani, Anita Yuni Praptiwi, Nur Lailiyah	
Hasil Verifikasi	Acuan (Regulasi) SNI ISO/IEC 17020:2012	Rencana Tanggal Penyelesaian (Diisi Unit Kerja)
LI telah melakukan identifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan namun belum terlihat identifikasi risiko yang timbul karena kerelasian atau hubungan antar personil	4.1. Ketidakberpihakan dan kemandirian	
LI belum menyediakan gambaran kegiatan inspeksi sesuai ruang lingkup yaitu surveilan HACCP dengan output SKHS	5.1 Persyaratan Administratif	
SK Kepala UPT tentang Penunjukkan Tim Struktur Organisasi LI bagian mengingat masih mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku yaitu Permen KP No 5 tahun 2024	5.2 Organisasi dan Manajemen	
SK Kepala UPT tentang Penetapan Inspektur Mutu bagian mengingat masih mencantumkan regulasi yang sudah tidak berlaku yaitu Permen KP No 5 tahun 2024 Uraian tugas Inspektur Mutu dan Tim Teknis Evaluasi Surveilans/sertifikasi belum dijelaskan dalam SK Kepala UPT	5.2 Organisasi dan Manajemen	
Penunjukkan ketua inspektur dan anggota inspektur belum ada kriteria yang jelas, hanya berdasarkan penunjukkan ST dari Kepala UPT (PK/OK/PLG/07/02)	6.1 Personil	
Hasil observasi lapangan inspektur pada kesimpulan inspektur menyiratkan inspektur mutu tidak kompeten karena kata kompeten dicoret Penilaian Inspektur Mutu a.n. Arief Sulistiyono belum ditandatangani Inspektur Penilai	6.1 Personil	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)

	PROSEDUR		OTORITAS KOMPETEN
	LAPORAN KETIDAKSESUAIAN		
FL/05/PMM/014	Tanggal : 1 Juli 2025	Edisi : 1 / Revisi : 1	Hal : 2 dari 2

	Penilaian Inspektur Mutu a.n. Rizma Olivia diberi nilai akhir 26,4 yang tidak ada dalam range/keterangan nilai		
7	Pada IK/OK/PLG/07/07 tentang penanganan barang dan sampel inspeksi pada bagian 3 yaitu transportasi contoh masih belum menjelaskan secara rinci bagaimana transportasi contoh dilakukan dalam kondisi aman, dipastikan disimpan dan di bawah dalam kondisi baik dan pengecekan kondisi contoh oleh petugas penerima meliputi apa saja	7.2 Penanganan Barang dan Sampel Inspeksi.	
8	Pelaksanaan dan rekaman Audit Internal tahun 2025 belum tersedia. Audit internal terakhir dilaksanakan Februari 2024 sehingga audit internal selanjutnya dilaksanakan tidak lebih dari 12 bulan sejak Februari 2024	8.6 Audit Internal	
5	Lembaga inspeksi Palembang telah menetapkan prosedur tindakan korektif pada PK/OK/PLG/10/01 namun rekaman yang tersedia tidak dilengkapi dengan identitas	8.7 Tindakan Korektif	
10	Lembaga inspeksi Palembang telah menetapkan prosedur tindakan korektif pada PK/OK/PLG/10/01 dan telah membuat tindakan pencegahan dengan identifikasi ketidaksesuaian potensial, penyebab, pengendalian namun belum terlihat waktu penyelesaian dan evaluasi pengendalian serta evaluasi efektivitas pengendalian	8.8 Tindakan Pencegahan	
Penilaian hasil verifikasi : 91			
Batas Maksimal Tanggal Tindakan Perbaikan : 28 September 2025			
Pimpinan Unit Kerja  Yoyok Fibrianto		Verifikator    Mardiani Anita Yuni Praptiwi Nur Lailiyah	

Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001 : 2015

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh (*Uncontrolled when downloaded*)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 111/SJ.2/RC.610/II/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Plt. Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
7. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Lampiran : Satu berkas

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Semester II Tahun 2025

Tanggal : 10 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 3953/SJ.1/RC.610/XII/2025 hal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2025 pukul 11.30 WIB.
2. Capaian IKU IKPA KKP Semester II tahun 2025 sebesar 90,31 dari target nilai 92.
3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Semester II tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara **Smart**, **Akuntabel**, **Integritas**, **Loyalitas**, dan **Sinergi** (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Sutrisno Subagyo

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Inspektur Jenderal



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	012	032	109131	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	70.00	70%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
2	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
3	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
4	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
5	039	032	249169	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	80%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

6	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.84	100.00	99.98	100%	0.00	99.98
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.96				100.00				
7	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	99.67	100.00	79.97	80%	0.00	99.96
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.83				100.00				
8	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	98.67	100.00	79.87	80%	0.00	99.83
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.33				100.00				
9	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.18	100.00	99.72	100%	0.00	99.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.29				100.00				
10	039	032	649551	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	97.68	100.00	79.77	80%	0.00	99.71
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.77	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.84				100.00				
11	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.95	100.00	99.69	100%	0.00	99.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.24				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

12	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	96.51	100.00	99.65	100%	0.00	99.65
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	9.65	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		99.13				100.00				
13	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	Nilai	100.00	100.00	98.88	0.00	0.00	98.18	100.00	79.59	80%	0.00	99.49
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.78	0.00	0.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.53				100.00				
14	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	100.00	98.93	100.00	100.00	95.65	100.00	99.35	100%	0.00	99.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	19.79	10.00	10.00	9.57	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		98.65				100.00				
15	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	Nilai	100.00	94.20	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	89.13	90%	0.00	99.03
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.13	20.00	0.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	97.10		100.00				100.00				
16	001	032	649589	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	Nilai	100.00	94.66	100.00	0.00	0.00	99.94	100.00	79.19	80%	0.00	98.99
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.20	20.00	0.00	0.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	97.33		99.97				100.00				
17	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.93	100%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

18	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	Nilai	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	91.43	100.00	79.14	80%	0.00	98.93
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	9.14	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		95.72				100.00				
19	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	Nilai	100.00	92.71	99.61	100.00	100.00	100.00	100.00	98.83	100%	0.00	98.83
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.92	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.36		99.90				100.00				
20	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	Nilai	100.00	91.98	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	100%	0.00	98.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.80	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.99		100.00				100.00				
21	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	Nilai	100.00	91.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.78	100%	0.00	98.78
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.78	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.94		100.00				100.00				
22	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	Nilai	100.00	94.07	100.00	100.00	100.00	96.42	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.11	20.00	10.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	97.04		99.10				100.00				
23	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	Nilai	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	94.16	100.00	98.75	100%	0.00	98.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	9.33	10.00	9.42	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

24	062	032	649767	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TERNATE	Nilai	100.00	94.55	99.03	0.00	0.00	98.88	100.00	78.88	80%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.18	19.81	0.00	0.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	97.28		98.96				100.00				
25	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	Nilai	100.00	100.00	100.00	86.00	100.00	100.00	100.00	98.60	100%	0.00	98.60
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	8.60	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		96.50				100.00				
26	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	94.39	100.00	100.00	100.00	94.07	100.00	98.57	100%	0.00	98.57
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.16	20.00	10.00	10.00	9.41	25.00				
					Nilai Aspek	97.20		98.52				100.00				
27	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	Nilai	100.00	91.12	100.00	100.00	100.00	98.22	100.00	98.49	100%	0.00	98.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.67	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	95.56		99.55				100.00				
28	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	91.48	100.00	100.00	100.00	97.43	100.00	98.46	100%	0.00	98.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.72	20.00	10.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	95.74		99.36				100.00				
29	045	032	649593	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANJARMASIN	Nilai	100.00	92.75	97.28	100.00	100.00	99.88	100.00	98.36	100%	0.00	98.36
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.91	19.46	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	96.38		99.29				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

30	134	032	649661	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG	Nilai	100.00	92.85	99.20	100.00	100.00	95.64	100.00	98.33	100%	0.00	98.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	19.84	10.00	10.00	9.56	25.00				
					Nilai Aspek	96.43		98.71				100.00				
31	012	032	649636	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBI	Nilai	100.00	92.54	100.00	93.33	100.00	99.38	100.00	98.15	100%	0.00	98.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.88	20.00	9.33	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.27		98.18				100.00				
32	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	Nilai	100.00	92.84	100.00	100.00	100.00	92.12	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.93	20.00	10.00	10.00	9.21	25.00				
					Nilai Aspek	96.42		98.03				100.00				
33	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	Nilai	100.00	88.86	99.05	100.00	100.00	100.00	100.00	98.14	100%	0.00	98.14
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.81	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.43		99.76				100.00				
34	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	Nilai	100.00	88.59	99.36	100.00	100.00	99.69	100.00	98.13	100%	0.00	98.13
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.87	10.00	10.00	9.97	25.00				
					Nilai Aspek	94.30		99.76				100.00				
35	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	Nilai	100.00	89.74	100.00	100.00	100.00	96.63	100.00	98.12	100%	0.00	98.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.46	20.00	10.00	10.00	9.66	25.00				
					Nilai Aspek	94.87		99.16				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

36	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	Nilai	100.00	91.73	100.00	100.00	100.00	93.55	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.76	20.00	10.00	10.00	9.36	25.00				
					Nilai Aspek	95.87		98.39				100.00				
37	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	Nilai	100.00	87.68	100.00	100.00	100.00	99.56	100.00	98.11	100%	0.00	98.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	93.84		99.89				100.00				
38	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	Nilai	100.00	87.28	100.00	100.00	100.00	99.98	100.00	98.09	100%	0.00	98.09
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.09	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.64		99.99				100.00				
39	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.02	95.51	100.00	100.00	99.78	100.00	98.03	100%	0.00	98.03
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.95	19.10	10.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	96.51		98.82				100.00				
40	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	Nilai	100.00	91.78	99.87	100.00	100.00	92.64	100.00	98.01	100%	0.00	98.01
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.77	19.97	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	95.89		98.13				100.00				
41	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	Nilai	100.00	87.92	100.00	100.00	100.00	98.09	100.00	98.00	100%	0.00	98.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	93.96		99.52				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

42	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	Nilai	100.00	88.38	100.00	0.00	100.00	99.14	100.00	88.17	90%	0.00	97.97
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.26	20.00	0.00	10.00	9.91	25.00				
					Nilai Aspek	94.19		99.71				100.00				
43	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	Nilai	100.00	86.28	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.94	100%	0.00	97.94
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.94	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.14		100.00				100.00				
44	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	Nilai	100.00	86.14	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.92	100%	0.00	97.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.07		100.00				100.00				
45	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	88.24	99.27	100.00	100.00	98.11	100.00	97.90	100%	0.00	97.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.24	19.85	10.00	10.00	9.81	25.00				
					Nilai Aspek	94.12		99.35				100.00				
46	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	94.96	100.00	100.00	100.00	85.62	100.00	97.81	100%	0.00	97.81
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.24	20.00	10.00	10.00	8.56	25.00				
					Nilai Aspek	97.48		96.40				100.00				
47	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	Nilai	100.00	89.27	99.00	100.00	100.00	96.08	100.00	97.80	100%	0.00	97.80
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.80	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	94.64		98.77				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

48	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	Nilai	100.00	91.04	98.68	0.00	100.00	100.00	100.00	58.66	60%	0.00	97.76
					Bobot	10	15	0	0	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.66	0.00	0.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	95.52		100.00				100.00				
49	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	Nilai	100.00	89.26	98.38	100.00	100.00	96.88	100.00	97.75	100%	0.00	97.75
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.39	19.68	10.00	10.00	9.69	25.00				
					Nilai Aspek	94.63		98.81				100.00				
50	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	Nilai	100.00	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.72	100%	0.00	97.72
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.72	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.39		100.00				100.00				
51	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	Nilai	100.00	91.62	98.54	0.00	0.00	97.12	100.00	78.16	80%	0.00	97.70
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.71	0.00	0.00	9.71	25.00				
					Nilai Aspek	95.81		97.83				100.00				
52	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	Nilai	100.00	84.86	100.00	100.00	100.00	99.59	100.00	97.69	100%	0.00	97.69
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.73	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.43		99.90				100.00				
53	038	032	567758	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATARAM	Nilai	100.00	89.05	98.73	0.00	0.00	99.83	100.00	78.09	80%	0.00	97.61
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.36	19.75	0.00	0.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.53		99.28				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

54	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	Nilai	100.00	87.71	100.00	0.00	0.00	99.26	100.00	78.08	80%	0.00	97.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.16	20.00	0.00	0.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	93.86		99.63				100.00				
55	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	Nilai	100.00	84.74	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	97.56	100%	0.00	97.56
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.71	19.85	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.37		99.81				100.00				
56	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	88.30	99.97	100.00	100.00	100.00	100.00	68.25	70%	0.00	97.49
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.25	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	94.15		100.00				100.00				
57	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	Nilai	100.00	87.95	100.00	100.00	100.00	92.56	100.00	97.45	100%	0.00	97.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.19	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	93.98		98.14				100.00				
58	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	Nilai	100.00	90.81	96.25	100.00	100.00	95.31	100.00	97.40	100%	0.00	97.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.62	19.25	10.00	10.00	9.53	25.00				
					Nilai Aspek	95.41		97.89				100.00				
59	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	Nilai	100.00	86.78	98.46	100.00	100.00	97.36	99.45	97.31	100%	0.00	97.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.02	19.69	10.00	10.00	9.74	24.86				
					Nilai Aspek	93.39		98.96				99.45				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

60	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	83.45	98.66	100.00	100.00	100.00	100.00	97.25	100%	0.00	97.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.52	19.73	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.73		99.67				100.00				
61	042	032	567538	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	Nilai	100.00	87.84	98.92	0.00	0.00	97.84	100.00	77.74	80%	0.00	97.18
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	19.78	0.00	0.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	93.92		98.38				100.00				
62	123	032	427567	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN I	Nilai	100.00	85.21	99.71	0.00	0.00	99.65	100.00	77.69	80%	0.00	97.11
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.78	19.94	0.00	0.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	92.61		99.68				100.00				
63	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nilai	100.00	85.87	99.59	100.00	100.00	91.92	100.00	96.99	100%	0.00	96.99
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.88	19.92	10.00	10.00	9.19	25.00				
					Nilai Aspek	92.94		97.88				100.00				
64	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	Nilai	100.00	85.34	97.45	100.00	100.00	0.00	100.00	67.80	70%	0.00	96.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.80	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.67		100.00				100.00				
65	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	Nilai	100.00	81.38	97.81	100.00	100.00	99.92	100.00	96.76	100%	0.00	96.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.21	19.56	10.00	10.00	9.99	25.00				
					Nilai Aspek	90.69		99.43				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

66	051	032	649601	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	Nilai	100.00	84.44	95.79	100.00	100.00	98.41	100.00	96.66	100%	0.00	96.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.67	19.16	10.00	10.00	9.84	25.00				
					Nilai Aspek	92.22		98.55				100.00				
67	014	032	567481	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	Nilai	100.00	81.84	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	77.28	80%	0.00	96.60
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.28	20.00	0.00	0.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.92		100.00				100.00				
68	137	032	427649	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATAM	Nilai	100.00	87.66	98.00	0.00	0.00	100.00	97.96	77.24	80%	0.00	96.55
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.15	19.60	0.00	0.00	10.00	24.49				
					Nilai Aspek	93.83		99.00				97.96				
69	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	Nilai	100.00	88.99	99.30	93.33	100.00	99.78	100.00	97.52	100%	1.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.35	19.86	9.33	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	94.50		98.10				100.00				
70	015	032	649699	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	77.98	100.00	100.00	100.00	98.18	100.00	96.52	100%	0.00	96.52
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.70	20.00	10.00	10.00	9.82	25.00				
					Nilai Aspek	88.99		99.55				100.00				
71	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	Nilai	100.00	81.35	98.40	100.00	100.00	96.14	100.00	96.50	100%	0.00	96.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.20	19.68	10.00	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	90.68		98.64				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

72	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	Nilai	100.00	77.28	99.49	100.00	100.00	100.00	100.00	96.49	100%	0.00	96.49
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.59	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.64		99.87				100.00				
73	061	032	649750	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	100.00	82.79	100.00	0.00	0.00	97.46	100.00	77.16	80%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.42	20.00	0.00	0.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	91.40		98.73				100.00				
74	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	Nilai	100.00	81.48	98.61	100.00	100.00	95.15	100.00	96.46	100%	0.00	96.46
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.72	10.00	10.00	9.51	25.00				
					Nilai Aspek	90.74		98.44				100.00				
75	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	Nilai	100.00	86.23	100.00	100.00	100.00	84.63	100.00	96.40	100%	0.00	96.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.93	20.00	10.00	10.00	8.46	25.00				
					Nilai Aspek	93.12		96.16				100.00				
76	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	Nilai	100.00	93.49	100.00	82.00	100.00	91.70	100.00	96.39	100%	0.00	96.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.02	20.00	8.20	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	96.75		93.43				100.00				
77	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	Nilai	100.00	81.96	95.38	100.00	100.00	100.00	100.00	96.37	100%	0.00	96.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.29	19.08	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	90.98		98.85				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

78	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	Nilai	100.00	87.56	100.00	88.00	100.00	93.71	100.00	96.31	100%	0.00	96.31
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	8.80	10.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	93.78		95.43				100.00				
79	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	Nilai	100.00	94.57	99.23	80.00	100.00	92.22	100.00	96.25	100%	0.00	96.25
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.19	19.85	8.00	10.00	9.22	25.00				
					Nilai Aspek	97.29		92.86				100.00				
80	048	032	649572	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN	Nilai	100.00	81.11	99.02	0.00	100.00	96.40	100.00	86.61	90%	0.00	96.23
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.17	19.80	0.00	10.00	9.64	25.00				
					Nilai Aspek	90.56		98.47				100.00				
81	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	Nilai	100.00	85.02	95.40	96.00	100.00	96.11	100.00	96.04	100%	0.00	96.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.75	19.08	9.60	10.00	9.61	25.00				
					Nilai Aspek	92.51		96.88				100.00				
82	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	78.62	98.69	0.00	100.00	97.45	100.00	86.28	90%	0.00	95.86
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.74	0.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	89.31		98.71				100.00				
83	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	Nilai	100.00	82.52	97.22	100.00	100.00	90.29	100.00	95.85	100%	0.00	95.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.38	19.44	10.00	10.00	9.03	25.00				
					Nilai Aspek	91.26		96.88				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

84	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	Nilai	100.00	82.26	100.00	93.33	100.00	91.14	100.00	95.79	100%	0.00	95.79
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.34	20.00	9.33	10.00	9.11	25.00				
					Nilai Aspek	91.13		96.12				100.00				
85	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	93.07	84.98	100.00	100.00	97.78	100.00	95.73	100%	0.00	95.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	17.00	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	96.54		95.69				100.00				
86	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	Nilai	100.00	70.60	100.00	100.00	100.00	99.36	100.00	95.53	100%	0.00	95.53
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.59	20.00	10.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	85.30		99.84				100.00				
87	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	Nilai	100.00	69.39	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.41	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	84.70		100.00				100.00				
88	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	Nilai	100.00	83.62	94.46	100.00	100.00	100.00	95.88	95.41	100%	0.00	95.41
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.54	18.89	10.00	10.00	10.00	23.97				
					Nilai Aspek	91.81		98.62				95.88				
89	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	Nilai	100.00	85.28	98.92	0.00	0.00	87.24	100.00	76.30	80%	0.00	95.38
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.79	19.78	0.00	0.00	8.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.64		93.08				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

90	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	Nilai	100.00	78.93	92.78	100.00	100.00	99.56	100.00	95.35	100%	0.00	95.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.84	18.56	10.00	10.00	9.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.47		98.08				100.00				
91	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	Nilai	100.00	78.79	100.00	100.00	100.00	83.49	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.82	20.00	10.00	10.00	8.35	25.00				
					Nilai Aspek	89.40		95.87				100.00				
92	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	Nilai	100.00	75.52	95.35	100.00	100.00	97.76	100.00	95.17	100%	0.00	95.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.33	19.07	10.00	10.00	9.78	25.00				
					Nilai Aspek	87.76		98.28				100.00				
93	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	Nilai	100.00	73.49	100.00	100.00	100.00	91.28	99.69	95.07	100%	0.00	95.07
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.02	20.00	10.00	10.00	9.13	24.92				
					Nilai Aspek	86.75		97.82				99.69				
94	165	032	427542	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA I	Nilai	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	99.17	100.00	94.92	100%	0.00	94.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	5.00	10.00	9.92	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		87.29				100.00				
95	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	Nilai	100.00	78.97	93.88	100.00	100.00	89.61	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.85	18.78	10.00	10.00	8.96	25.00				
					Nilai Aspek	89.49		95.87				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

96	136	032	427598	BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR	Nilai	100.00	77.86	99.48	80.00	100.00	100.00	100.00	94.58	100%	0.00	94.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.68	19.90	8.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	88.93		94.87				100.00				
97	030	032	049097	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	Nilai	100.00	74.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	66.18	70%	0.00	94.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.28		100.00				100.00				
98	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	Nilai	100.00	71.32	100.00	88.00	100.00	100.00	100.00	94.50	100%	0.00	94.50
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.70	20.00	8.80	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	85.66		97.00				100.00				
99	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	Nilai	100.00	79.65	99.91	100.00	100.00	98.23	90.67	94.42	100%	0.00	94.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.95	19.98	10.00	10.00	9.82	22.67				
					Nilai Aspek	89.83		99.54				90.67				
100	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	Nilai	100.00	80.39	91.65	100.00	100.00	88.38	100.00	94.23	100%	0.00	94.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.06	18.33	10.00	10.00	8.84	25.00				
					Nilai Aspek	90.20		95.01				100.00				
101	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	Nilai	100.00	74.41	99.89	100.00	100.00	80.82	100.00	94.22	100%	0.00	94.22
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.16	19.98	10.00	10.00	8.08	25.00				
					Nilai Aspek	87.21		95.18				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

102	178	032	645691	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	Nilai	100.00	71.92	100.00	0.00	0.00	95.78	100.00	75.37	80%	0.00	94.21
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.79	20.00	0.00	0.00	9.58	25.00				
					Nilai Aspek	85.96		97.89				100.00				
103	178	032	340150	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	Nilai	100.00	72.73	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	65.91	70%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.91	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	86.37		100.00				100.00				
104	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	88.89	95.03	80.00	100.00	88.24	100.00	94.16	100%	0.00	94.16
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.33	19.01	8.00	10.00	8.82	25.00				
					Nilai Aspek	94.45		90.82				100.00				
105	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	Nilai	100.00	85.45	86.22	93.33	100.00	97.18	100.00	94.11	100%	0.00	94.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.82	17.24	9.33	10.00	9.72	25.00				
					Nilai Aspek	92.73		94.18				100.00				
106	037	032	427624	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	Nilai	100.00	74.12	98.73	93.33	92.31	95.95	100.00	94.02	100%	0.00	94.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.12	19.75	9.33	9.23	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	87.06		95.08				100.00				
107	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	100.00	60.00	100.00	97.94	100.00	93.97	100%	0.00	93.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.18	20.00	6.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	93.93		89.49				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

108	024	032	649732	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIREBON	Nilai	100.00	92.77	100.00	50.00	100.00	99.43	100.00	93.86	100%	0.00	93.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	5.00	10.00	9.94	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		87.36				100.00				
109	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	Nilai	100.00	79.43	100.00	0.00	0.00	81.61	100.00	75.08	80%	0.00	93.84
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.91	20.00	0.00	0.00	8.16	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.81				100.00				
110	068	032	649704	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE	Nilai	100.00	79.44	100.00	0.00	0.00	80.22	100.00	74.94	80%	0.00	93.67
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.92	20.00	0.00	0.00	8.02	25.00				
					Nilai Aspek	89.72		90.11				100.00				
111	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	Nilai	100.00	76.73	92.89	93.33	100.00	92.43	100.00	93.66	100%	0.00	93.66
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.51	18.58	9.33	10.00	9.24	25.00				
					Nilai Aspek	88.37		94.66				100.00				
112	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	Nilai	100.00	86.36	96.77	100.00	100.00	84.16	90.67	93.39	100%	0.00	93.39
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.95	19.35	10.00	10.00	8.42	22.67				
					Nilai Aspek	93.18		95.23				90.67				
113	030	032	649725	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA	Nilai	100.00	90.30	100.00	50.00	100.00	94.27	100.00	92.97	100%	0.00	92.97
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.55	20.00	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	95.15		86.07				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

114	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	Nilai	100.00	100.00	99.67	50.00	100.00	96.54	100.00	65.00	70%	0.00	92.86
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	0.00	5.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				
115	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	Nilai	100.00	56.25	100.00	100.00	100.00	92.58	100.00	92.70	100%	0.00	92.70
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.44	20.00	10.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	78.13		98.15				100.00				
116	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	Nilai	100.00	92.90	70.90	100.00	100.00	95.15	100.00	92.63	100%	0.00	92.63
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.94	14.18	10.00	10.00	9.52	25.00				
					Nilai Aspek	96.45		91.51				100.00				
117	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	Nilai	100.00	88.01	90.64	60.00	100.00	98.71	100.00	92.20	100%	0.00	92.20
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.20	18.13	6.00	10.00	9.87	25.00				
					Nilai Aspek	94.01		87.34				100.00				
118	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	Nilai	100.00	80.59	95.11	66.67	100.00	93.94	100.00	92.17	100%	0.00	92.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.09	19.02	6.67	10.00	9.39	25.00				
					Nilai Aspek	90.30		88.93				100.00				
119	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	Nilai	100.00	63.30	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	64.50	70%	0.00	92.14
					Bobot	10	15	0	10	10	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.50	0.00	10.00	10.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	81.65		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

120	043	032	649657	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	Nilai	100.00	84.20	97.42	50.00	100.00	100.00	100.00	92.11	100%	0.00	92.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.63	19.48	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	92.10		86.86				100.00				
121	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	Nilai	100.00	85.79	100.00	50.00	100.00	91.30	100.00	92.00	100%	0.00	92.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.87	20.00	5.00	10.00	9.13	25.00				
					Nilai Aspek	92.90		85.33				100.00				
122	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nilai	100.00	75.67	99.61	50.00	100.00	100.00	100.00	91.27	100%	0.00	91.27
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.35	19.92	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	87.84		87.40				100.00				
123	050	032	649678	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	Nilai	100.00	75.84	99.54	50.00	100.00	97.36	100.00	91.02	100%	0.00	91.02
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.38	19.91	5.00	10.00	9.74	25.00				
					Nilai Aspek	87.92		86.73				100.00				
124	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	81.28	78.39	100.00	98.30	95.44	94.75	90.93	100%	0.00	90.93
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.19	15.68	10.00	9.83	9.54	23.69				
					Nilai Aspek	90.64		93.03				94.75				
125	017	032	649615	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	Nilai	100.00	85.65	100.00	50.00	100.00	99.60	92.22	90.86	100%	0.00	90.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.85	20.00	5.00	10.00	9.96	23.06				
					Nilai Aspek	92.83		87.40				92.22				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

126	047	032	567610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN	Nilai	100.00	87.54	100.00	50.00	100.00	77.19	100.00	90.85	100%	0.00	90.85
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.13	20.00	5.00	10.00	7.72	25.00				
					Nilai Aspek	93.77		81.80				100.00				
127	016	032	649622	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU	Nilai	100.00	73.17	100.00	50.00	100.00	94.79	100.00	90.45	100%	0.00	90.45
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.98	20.00	5.00	10.00	9.48	25.00				
					Nilai Aspek	86.59		86.20				100.00				
128	020	032	649688	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAK	Nilai	100.00	81.45	98.15	50.00	100.00	94.29	100.00	91.28	100%	1.00	90.28
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.22	19.63	5.00	10.00	9.43	25.00				
					Nilai Aspek	90.73		85.61				100.00				
129	008	032	099325	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	Nilai	100.00	54.55	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	63.18	70%	0.00	90.26
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.28		100.00				100.00				
130	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	62.64	82.57	100.00	100.00	93.17	100.00	90.23	100%	0.00	90.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.40	16.51	10.00	10.00	9.32	25.00				
					Nilai Aspek	81.32		93.94				100.00				
131	175	032	649682	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA II	Nilai	100.00	79.26	100.00	50.00	100.00	81.86	100.00	90.08	100%	0.00	90.08
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.89	20.00	5.00	10.00	8.19	25.00				
					Nilai Aspek	89.63		82.97				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

132	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	74.46	96.46	50.00	100.00	93.02	100.00	89.76	100%	0.00	89.76
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.17	19.29	5.00	10.00	9.30	25.00				
					Nilai Aspek	87.23		84.87				100.00				
133	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	Nilai	100.00	83.18	65.99	93.33	100.00	97.26	100.00	89.73	100%	0.00	89.73
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.48	13.20	9.33	10.00	9.73	25.00				
					Nilai Aspek	91.59		89.14				100.00				
134	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.64	86.67	82.00	98.08	74.10	100.00	89.55	100%	0.00	89.55
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.80	17.33	8.20	9.81	7.41	25.00				
					Nilai Aspek	89.32		85.21				100.00				
135	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	76.50	95.75	0.00	0.00	0.00	93.00	44.73	50%	0.00	89.45
					Bobot	10	15	0	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25				
					Nilai Aspek	88.25		95.75				93.00				
136	008	032	567453	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKANBARU	Nilai	100.00	66.20	99.37	50.00	100.00	95.96	100.00	89.40	100%	0.00	89.40
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.93	19.87	5.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	83.10		86.33				100.00				
137	066	032	649711	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	Nilai	100.00	70.29	100.00	50.00	100.00	86.84	100.00	89.23	100%	0.00	89.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.54	20.00	5.00	10.00	8.68	25.00				
					Nilai Aspek	85.15		84.21				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

138	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	78.53	61.97	100.00	100.00	100.00	100.00	89.17	100%	0.00	89.17
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.78	12.39	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	89.27		90.49				100.00				
139	060	032	567694	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	Nilai	100.00	70.52	99.38	60.00	100.00	94.48	93.00	89.15	100%	0.00	89.15
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.58	19.88	6.00	10.00	9.45	23.25				
					Nilai Aspek	85.26		88.47				93.00				
140	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	Nilai	100.00	65.67	100.00	50.00	100.00	92.57	100.00	89.11	100%	0.00	89.11
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.85	20.00	5.00	10.00	9.26	25.00				
					Nilai Aspek	82.84		85.64				100.00				
141	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	Nilai	100.00	70.82	72.20	100.00	100.00	98.89	100.00	89.95	100%	1.00	88.95
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.62	14.44	10.00	10.00	9.89	25.00				
					Nilai Aspek	85.41		92.77				100.00				
142	063	032	567812	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAYAPURA	Nilai	100.00	73.29	96.94	50.00	100.00	84.86	100.00	88.87	100%	0.00	88.87
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.99	19.39	5.00	10.00	8.49	25.00				
					Nilai Aspek	86.65		82.95				100.00				
143	049	032	567631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	Nilai	100.00	93.04	99.66	0.00	0.00	99.28	68.89	71.04	80%	0.00	88.80
					Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.96	19.93	0.00	0.00	9.93	17.22				
					Nilai Aspek	96.52		99.47				68.89				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

144	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	Nilai	100.00	100.00	35.27	87.00	100.00	99.28	100.00	85.68	100%	0.00	85.68
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	7.05	8.70	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		80.39				100.00				
145	049	032	179113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	Nilai	100.00	30.86	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.63	70%	0.00	85.18
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.63	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.43		100.00				100.00				
146	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	Nilai	100.00	71.73	99.96	93.33	100.00	81.07	67.70	85.12	100%	0.00	85.12
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	10.76	19.99	9.33	10.00	8.11	16.92				
					Nilai Aspek	85.87		93.59				67.70				
147	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	Nilai	100.00	94.26	38.97	90.00	100.00	91.67	100.00	85.10	100%	0.00	85.10
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	14.14	7.79	9.00	10.00	9.17	25.00				
					Nilai Aspek	97.13		80.16				100.00				
148	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	Nilai	100.00	76.64	54.66	86.00	100.00	88.68	100.00	84.90	100%	0.00	84.90
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.50	10.93	8.60	10.00	8.87	25.00				
					Nilai Aspek	88.32		82.33				100.00				
149	060	032	209117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGERA	Nilai	100.00	28.92	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.34	70%	0.00	84.77
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.34	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.46		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

150	009	032	329087	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Nilai	100.00	28.84	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.33	70%	0.00	84.75
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.33	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.42		100.00				100.00				
151	136	032	199137	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	Nilai	100.00	28.36	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.25	70%	0.00	84.65
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.18		100.00				100.00				
152	020	032	299391	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	Nilai	100.00	27.89	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.18	70%	0.00	84.55
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.18	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.95		100.00				100.00				
153	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	Nilai	100.00	76.37	41.75	100.00	100.00	97.01	100.00	84.51	100%	0.00	84.51
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.46	8.35	10.00	10.00	9.70	25.00				
					Nilai Aspek	88.19		84.69				100.00				
154	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	80.00	55.39	78.45	88.80	100.00	85.54	100.00	84.43	100%	0.00	84.43
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.31	15.69	8.88	10.00	8.55	25.00				
					Nilai Aspek	67.70		88.20				100.00				
155	038	032	239138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

156	061	032	219098	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	59.09	70%	0.00	84.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				100.00				
157	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	Nilai	100.00	62.21	64.61	60.00	100.00	99.81	100.00	83.23	100%	0.00	83.23
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.33	12.92	6.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	81.11		81.10				100.00				
158	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	80.00	55.08	64.34	84.00	100.00	93.28	100.00	81.86	100%	0.00	81.86
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	8.00	8.26	12.87	8.40	10.00	9.33	25.00				
					Nilai Aspek	67.54		85.40				100.00				
159	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	Nilai	100.00	54.47	57.19	50.00	100.00	100.00	100.00	79.61	100%	0.00	79.61
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.17	11.44	5.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	77.24		76.80				100.00				
160	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	53.74	71.34	93.33	99.64	97.24	68.07	78.37	100%	0.00	78.37
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.06	14.27	9.33	9.96	9.72	17.02				
					Nilai Aspek	76.87		90.39				68.07				
161	043	032	149124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Nilai	100.00	30.96	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.64	70%	0.00	78.06
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.64	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	65.48		75.00				100.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

162	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	Nilai	100.00	62.43	54.97	63.33	100.00	63.47	100.00	78.04	100%	0.00	78.04
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	9.36	10.99	6.33	10.00	6.35	25.00				
					Nilai Aspek	81.22		70.44				100.00				
163	014	032	119114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	Nilai	100.00	28.14	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.22	70%	0.00	77.46
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.22	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.07		75.00				100.00				
164	095	032	029172	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	Nilai	100.00	27.67	75.00	0.00	0.00	0.00	100.00	54.15	70%	0.00	77.36
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.15	15.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	63.84		75.00				100.00				
165	042	032	139138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	29.59	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.44	70%	0.00	70.63
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.44	10.00	0.00	0.00	0.00	25.00				
					Nilai Aspek	64.80		50.00				100.00				
166	134	032	039163	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Nilai	100.00	75.95	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	48.89	70%	0.00	69.85
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.39	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	87.98		100.00				30.00				
167	175	032	019062	DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	30.00	41.59	70%	0.00	59.42
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				30.00				

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

168	037	032	229110	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	Nilai	100.00	75.72	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.36	70%	0.00	59.08
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.36	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	87.86		100.00				0.00				
169	051	032	189143	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	Nilai	100.00	47.81	75.00	0.00	0.00	0.00	30.00	39.67	70%	0.00	56.67
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.17	15.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	73.91		75.00				30.00				
170	010	032	089143	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	Nilai	100.00	28.98	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.35	70%	0.00	49.07
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.35	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.49		100.00				0.00				
171	017	032	129123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	Nilai	100.00	28.33	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.25	70%	0.00	48.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.25	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	64.17		100.00				0.00				
172	015	032	309170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				
173	135	032	059190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	Nilai	100.00	27.27	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09	70%	0.00	48.70
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	4.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					Nilai Aspek	63.64		100.00				0.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

174	123	032	079136	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	Nilai	100.00	36.36	25.00	0.00	0.00	0.00	30.00	27.95	70%	0.00	39.93
					Bobot	10	15	20	0	0	0	25				
					Nilai Akhir	10.00	5.45	5.00	0.00	0.00	0.00	7.50				
					Nilai Aspek	68.18		25.00				30.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode ES1	Nama ES1	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.91	97.29	100.00	100.00	99.60	100.00	97.30	100%	0.00	97.30
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.89	19.46	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	92.96		99.22				100.00				
2	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	88.95	95.26	100.00	100.00	96.30	100.00	97.02	100%	0.50	96.52
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.34	19.05	10.00	10.00	9.63	25.00				
			Nilai Aspek	94.48		97.89				100.00				
3	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	Nilai	100.00	70.82	100.00	100.00	100.00	99.57	100.00	95.58	100%	0.00	95.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	10.62	20.00	10.00	10.00	9.96	25.00				
			Nilai Aspek	85.41		99.89				100.00				
4	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	84.35	98.96	82.80	98.98	95.15	100.00	95.14	100%	0.50	94.64
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.65	19.79	8.28	9.90	9.51	25.00				
			Nilai Aspek	92.18		93.97				100.00				
5	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	Nilai	100.00	87.86	98.04	60.00	100.00	97.94	100.00	93.58	100%	0.00	93.58
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	13.18	19.61	6.00	10.00	9.79	25.00				
			Nilai Aspek	93.93		89.00				100.00				



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

6	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	100.00	85.36	82.22	97.48	99.62	94.93	100.00	93.45	100%	0.00	93.45
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	12.80	16.44	9.75	9.96	9.49	25.00				
			Nilai Aspek	92.68		93.56				100.00				
7	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	Nilai	98.46	60.52	85.06	88.13	100.00	98.21	100.00	89.57	100%	0.00	89.57
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.85	9.08	17.01	8.81	10.00	9.82	25.00				
			Nilai Aspek	79.49		92.85				100.00				
8	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	Nilai	100.00	63.26	72.22	90.48	99.96	98.06	90.87	85.50	100%	0.00	85.50
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	10.00	9.49	14.44	9.05	10.00	9.81	22.72				
			Nilai Aspek	81.63		90.18				90.87				
9	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	Nilai	97.78	61.16	65.41	85.50	100.00	93.50	100.00	84.93	100%	0.75	84.18
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.78	9.17	13.08	8.55	10.00	9.35	25.00				
			Nilai Aspek	79.47		86.10				100.00				



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nilai	99.76	70.61	82.69	90.82	99.89	96.56	99.91	90.81	100%	0.50	90.31
			Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
			Nilai Akhir	9.98	10.59	16.54	9.08	9.99	9.66	24.98				
			Nilai Aspek	85.19		92.49				99.91				

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 138/SJ.2/RC.610/I/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Para Sekretaris Badan
5. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan BMN

Hal : Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Level Unit Eselon I dan Level Satker di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

Tanggal : 13 Januari 2026

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan berdas, dengan ini kami sampaikan capaian IK Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Capaian seluruh Unit Eselon I sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,5 dan Capaian seluruh Satuan Kerja (Satker) sudah mencapai target sebesar 71,5 sebagaimana data terlampir.
2. Capaian IK NKPA level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IK NKPA Tahun 2025 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP (terlampir).
3. Capaian IK NKPA level 0 (KKP) masih dalam proses koordinasi perbaikan system aplikasi Monev Kemenkeu sehubungan tidak dapat dilakukan penginputan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada aplikasi SAKTI dengan keterangan error.
4. Penyampaian capaian IK NKPA level 0 (KKP) paling lambat kami sampaikan tanggal 15 Januari 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

Sutrisno Subagyo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
Nomor : 138/SJ.2/RC.610/I/2026
Tanggal : 13 Januari 2026

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) PER ESELON I
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
NK Perencanaan Eselon I									
Tampilkan 10 dari 10									
No.	Kode UBL	UBL	NK Perencanaan Anggaran	Strukturisasi		Efisiensi		Efisiensi SDA	
				RUP	CRD	Penggunaan SDA			
1	01	Salah satu dari...	81.00	000.00	00.00	00.00		00.00	
2	02	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
3	03	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
4	04	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
5	05	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
6	06	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
7	07	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
8	08	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
9	09	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	
10	10	Salah satu dari...	81.00	00.00	00.00	00.00		00.00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ⁺⁺	Kode Satuan Kerja ⁺⁺	Satuan Kerja ⁺⁺	NK Perencanaan Anggaran ⁺⁺	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ⁺⁺	Penggunaan SBK ⁺⁺	Efisiensi SBK ⁺⁺
1	032.01.022001	BINDA UMUM DAN PERSAJAAN BARANG/JASA	95,63	100,00	77,78	85,70
2	032.01.032004	BALAI PENYELIDIKAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00
3	032.01.000006	LEMBAGA PEMERLOK MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	79,70	87,93	100,00	25,00
4	032.01.000005	DINAS KETANAMAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTAMBAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	032.01.000008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
6	032.01.000007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	032.01.000003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	032.01.000009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
9	032.01.000030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROEC ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00
10	032.01.000001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	032.01.000032	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
12	032.01.000033	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
13	032.01.000034	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00
14	032.01.000035	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
15	032.01.000036	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
16	032.01.000037	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
17	032.01.000038	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
18	032.01.000039	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
19	032.01.000040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
20	032.01.000041	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
21	032.01.000042	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
22	032.01.000043	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
23	032.01.000044	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
24	032.01.000045	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
25	032.01.000046	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANGSA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	032.01.000047	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
27	032.01.000048	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
28	032.01.000049	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
29	032.01.000050	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BONGOLULU	0,00	0,00	0,00	0,00
30	032.01.000051	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	032.01.000052	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
32	032.01.000053	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
33	032.01.000054	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	032.01.000055	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGSA	0,00	0,00	0,00	0,00
35	032.01.000056	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
36	032.01.000057	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
37	032.01.000058	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
38	032.01.000059	DINAS PERTAMBAN, PANGKON, KELAUTAN DAN PERIKANAN PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
39	032.01.000060	DINAS PERTAMBAN, PANGKON DAN PERIKANAN PAPUA PEGUNUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
40	032.01.000061	DINAS PANGKON, PERTAMBAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
41	032.01.000062	DINAS PANGKON, PERTAMBAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP INSPEKTORAT JENDERAL
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	RK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RK	Penggunaan SKK	Effisiensi SKK	
1	INSPEKTORAT JENDERAL	INSPEKTORAT JENDERAL	110,00	110,00	110,00	110,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ↑	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	001.03.010002	DINAS KELAUTAN DAN PERTAMBAN PROVINSI DKI JAKARTA	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	001.03.010173	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	001.03.010181	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	001.03.010187	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	001.03.010190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	001.03.010245	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	001.03.010126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	001.03.010142	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	001.03.010121	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	001.03.100121	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBU	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	001.03.110124	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	001.03.120123	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	001.03.130138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	001.03.140134	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	001.03.150138	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	001.03.160138	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	001.03.170113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	001.03.180163	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	001.03.180127	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	001.03.180117	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	001.03.210046	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	001.03.220119	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	001.03.220720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	81,52	91,13	95,24	24,30	
24	001.03.230126	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. BATA TENGGARA BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	001.03.230146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGMUTU	97,00	100,00	100,00	80,00	
26	001.03.230160	BALAI BESAR PENGANGKAPAN IKAN	97,00	100,00	100,00	80,00	
27	001.03.230171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PERALINGAN	94,25	100,00	80,00	75,00	
28	001.03.230216	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	97,00	100,00	100,00	80,00	
29	001.03.230221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TAJURUNG PANDAR	97,00	100,00	100,00	80,00	
30	001.03.230235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	94,25	100,00	80,00	75,00	
31	001.03.230091	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	94,53	100,00	100,00	63,55	
32	001.03.240168	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. BATA TENGGARA TIMUR	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	001.03.250107	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROPINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	001.03.260120	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	001.03.260113	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALINDI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	001.03.260091	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	001.03.300170	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	001.03.310739	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEMANDINGAN	96,25	100,00	100,00	75,00	
39	001.03.310006	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	001.03.310007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN NIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
41	001.03.310008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	001.03.340190	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT	100,00	100,00	100,00	100,00	
43	001.03.417033	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SELATAN	52,52	100,00	100,00	52,80	
44	001.03.417061	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERATE	88,14	100,00	50,00	54,25	
45	001.03.417070	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	94,93	100,00	100,00	66,20	

46	632.03.427003	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA BRONDONG	90,50	100,00	80,00	50,00
47	632.03.518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	93,57	100,00	100,00	57,15
48	632.03.531409	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA SUNGUR	95,00	100,00	100,00	66,65
49	632.03.537613	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NISAN TACHIMAN	100,00	100,00	100,00	100,00
50	632.03.537906	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	93,57	100,00	100,00	57,15
51	632.03.900703	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PELABUHAN RAPI	97,00	100,00	100,00	80,00
52	632.03.989001	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA SIBOLGA	94,25	100,00	80,00	75,00
53	633.03.422401	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA AMBON	96,67	100,00	66,67	100,00
54	633.03.422476	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA TUAL	86,57	92,31	83,33	60,00
55	633.03.422403	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA RIJAUANAN	97,00	100,00	100,00	80,00
56	632.03.432330	DIRAAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROSISI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	632.03.432903	PELABUHAN PERIKANAN MUSANTARA PONDAMBEUNAN	91,41	100,00	100,00	42,70
58	632.03.432707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	90,50	100,00	80,00	50,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

				Efektivitas	Efisiensi
No. ++	Kode Satuan Kerja ++	Satuan Kerja ++	RK Perencanaan Anggaran ++	Capaian RO ++	Penggunaan SBK ++ Efisiensi SBK ++
1	001.04.110900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00
2	001.04.120010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00
3	001.04.120100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00
4	001.04.140000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00
5	001.04.150100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00
6	001.04.160100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KANGGUEK ACEH DARULHAJAH	0,00	0,00	0,00
7	001.04.170000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00
8	001.04.180100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00
9	001.04.190100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU	0,00	0,00	0,00
10	001.04.190200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00
11	001.04.190300	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00
12	001.04.190400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00
13	001.04.190500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00
14	001.04.190600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00
15	001.04.190700	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00
16	001.04.190800	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00
17	001.04.191100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00
18	001.04.191000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00
19	001.04.191200	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00
20	001.04.191200	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00
21	001.04.210000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI HALUOJA	0,00	0,00	0,00
22	001.04.220100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00
23	001.04.220200	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUMBA SELATAN	91,76	96,93	83,33
24	001.04.220300	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUMBA UTARA	95,33	100,00	83,33
25	001.04.230100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00
26	001.04.230200	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JERANG	95,00	100,00	50,00
27	001.04.230300	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00
28	001.04.240100	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DASARA PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00
29	001.04.240200	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00
30	001.04.240300	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI HALUOJA UTARA	0,00	0,00	0,00
31	001.04.240400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00
32	001.04.240500	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN	0,00	0,00	0,00
33	001.04.240600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SORONG	0,00	0,00	0,00
34	001.04.240700	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN MALU	0,00	0,00	0,00
35	001.04.240800	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00
36	001.04.240900	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00
37	001.04.420100	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	94,00	100,00	100,00
38	001.04.440100	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BUDIDAYA KAKAWAN)	95,33	100,00	83,33
39	001.04.440200	BALAI PRODUKSI IKAN LAYANAN USAHA (BUDIDAYA KAKAWAN)	96,92	100,00	100,00
40	001.04.440300	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATULU	97,30	100,00	75,00
41	001.04.440300	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SITUNGGUNG	97,30	100,00	75,00
42	001.04.440500	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR LAMPUNG	95,00	100,00	50,00
43	001.04.440600	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT SAMPUNG	96,56	100,00	100,00
44	001.04.440600	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR KENDAL	94,25	100,00	80,00
45	001.04.440800	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TIRAN	74,39	99,98	0,00
46	001.04.440700	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT ANJAS	91,84	98,56	66,67
47	001.04.440700	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	97,00	100,00	100,00
48	001.04.440800	BALAI PERALATAN KEBUDIDAYA IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA	72,30	96,67	0,00
49	001.04.430400	STASIUN PERIKANAN BUDIDAYA	90,91	100,00	75,00
50	001.04.440900	DINAS PERTANIAN, PANGSA, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	0,00	0,00	0,00
51	001.04.440900	DINAS PERTANIAN, PANGSA, DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA SELATAN	0,00	0,00	0,00
52	001.04.440900	DINAS PANGSA, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA TENGAH	0,00	0,00	0,00
53	001.04.440900	DINAS PANGSA, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA UTARA	0,00	0,00	0,00
54	001.04.441000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1.	033.05.430000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	033.05.431000	STASIS POKP CILACAP	90,09	100,00	90,91	40,00	
3.	033.05.430011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	033.05.440003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	033.05.500130	PANGKALAN POKP LAMPUNG	88,76	100,00	72,73	43,25	
6.	033.05.500004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	033.05.130000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	033.05.130004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	033.05.130007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	033.05.130004	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	033.05.130000	STASIS POKP TANGGA	84,16	84,13	84,63	34,05	
12.	033.05.130006	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	033.05.130000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	033.05.130013	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	033.05.133001	STASIS POKP AMBON	89,50	100,00	100,00	30,00	
16.	033.05.130000	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	033.05.130130	PANGKALAN POKP BENGK	89,77	100,00	72,73	50,00	
18.	033.05.130001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	033.05.430100	STASIS POKP KUPANG	89,62	100,00	81,67	36,35	
20.	033.05.130004	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	033.05.130000	STASIS POKP BAKI	89,77	100,00	72,73	50,00	
22.	033.05.130030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI NAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	033.05.130030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	033.05.130030	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	033.05.130033	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	033.05.130130	PANGKALAN POKP BAKI	89,26	99,19	81,67	36,35	
27.	033.05.130013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	033.05.130004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NAPIA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	033.05.130130	STASIS POKP TIRUHAH	89,66	100,00	81,67	36,60	
30.	033.05.440010	PANGKALAN PENGAWASAN SDAP JAKARTA	92,62	99,81	100,00	31,75	
31.	033.05.440033	PANGKALAN PENGAWASAN SDAP SITUNG	89,78	99,37	75,00	45,00	
32.	033.05.440031	STASIS PENGAWASAN SDAP BELANGA	90,63	100,00	83,33	50,00	
33.	033.05.440001	STASIS PENGAWASAN SDAP PONTIANAK	89,41	100,00	80,00	42,70	
34.	033.05.440001	PANGKALAN PENGAWASAN SDAP TULI	91,36	100,00	100,00	42,40	
35.	033.05.440030	DIREKTORAT DIREKTORAT JENDRAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	89,58	100,00	80,95	43,25	
36.	033.05.430010	DINAS KETANANAN, HUKUM, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	033.05.430011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	033.05.430013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
39.	033.05.430013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA DAN SARAWAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
42.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
43.	033.05.430011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
45.	033.05.430010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	

46	022.06.000000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
47	022.06.000001	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00
48	022.06.000002	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GALIUNGUTAN SAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
49	022.06.000003	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GALIUNGUTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
50	022.06.000004	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GALIUNGUTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
51	022.06.000005	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GALIUNGUTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
52	022.06.000006	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
53	022.06.000007	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00
54	022.06.000008	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
55	022.06.000009	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	022.06.000010	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00
57	022.06.000011	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00
58	022.06.000012	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
59	022.06.000013	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00
60	022.06.000014	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (MABAH PROVINSI) PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00
61	022.06.000015	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKALU	0,00	0,00	0,00	0,00
62	022.06.000016	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALIKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00
63	022.06.000017	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00
64	022.06.000018	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
65	022.06.000019	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SINGKAPURA	0,00	0,00	0,00	0,00
66	022.06.000020	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0,00	0,00	0,00	0,00
67	022.06.000021	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
68	022.06.000022	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00
69	022.06.000023	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GALIUNGUTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. +	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RD	Penggunaan SBK	Effisiensi SBK	
1	002.06.407000	BALAI BESAR PENELITIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BPP3AP)	100,00	100,00	100,00	100,00	
2	002.06.402001	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,23	100,00	100,00	61,55	
3	002.06.400000	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROEC ACEH DARULISALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BATAVIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JABAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALAKA UTAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RANGKAI MELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SORONGALLO	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN MALU	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	002.06.400000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT KKP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ¹⁾	Kode Satuan Kerja ²⁾	Satuan Kerja ³⁾	NK Perencanaan Anggaran ⁴⁾	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ⁵⁾	Penggunaan SBK ⁶⁾	Efisiensi SBK ⁷⁾	
1	002.07.200143	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT BERANGKAS	98,33	100,00	83,33	100,00	
2	002.07.277428	SALAI PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT DEWASAR	97,86	100,00	100,00	85,70	
3	002.07.277429	SALAI PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT PORTIANAK	98,57	100,00	85,71	100,00	
4	002.07.277431	SALAI PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	002.07.277440	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT KUBOWA	98,57	100,00	85,71	100,00	
6	002.07.277454	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PERAKHARU	99,24	100,00	100,00	94,95	
7	002.07.700346	SALAI PENGELOLAAN SUMBER DATA PESISIR DAN LAUT (BSPSL) PADANG	97,14	100,00	71,43	100,00	
8	002.07.700353	SALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (SKKPN) KUPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	002.07.622149	SEKRETARIAT DINAS PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	98,68	100,00	100,00	91,20	
10	002.07.801046	SINAS KETANAMAN RUMAH, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	002.07.801047	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	002.07.801048	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	002.07.801049	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI DI YOGYAKARTA	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	002.07.801050	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	002.07.801051	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGROE ACEH DARUSALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	002.07.801052	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	002.07.801053	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	002.07.801054	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BATAK	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	002.07.801055	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	002.07.801056	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	002.07.801057	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	002.07.801058	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	002.07.801059	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	002.07.801060	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	002.07.801061	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	002.07.801062	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	002.07.801063	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	002.07.801064	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	002.07.801065	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	002.07.801066	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	002.07.601067	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	002.07.601068	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	002.07.601069	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	002.07.601070	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DAERAH) PROVINSI PAPUA	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	002.07.601071	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	002.07.601072	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	002.07.601073	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	002.07.601074	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	002.07.601075	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	002.07.601076	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BAWA	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	002.07.601077	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	002.07.601078	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	002.07.601079	SINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP BADAN PENYULUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN PERIKANAN KKP DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No. ⁺⁺	Kode Satuan Kerja ⁺⁺	Satuan Kerja ⁺⁺	NK Perencanaan Anggaran ⁺⁺	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO ⁺⁺	Penggunaan SBK ⁺⁺	Efisiensi SBK ⁺⁺	
1	002.03.037373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	92,50	100,00	100,00	50,00	
2	002.03.038010	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	002.03.038741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	002.03.038750	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	002.03.038702	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	002.03.038189	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	002.03.038360	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	002.03.003380	AAAREMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATUBI (AK KP WAKATUBI)	84,42	99,22	100,00	0,00	
9	002.03.400817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KESEKUTANAN PESIR	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	002.03.400820	LOKA PERKAYASAA TEKNOLOGI KELAUTAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
11	002.03.400801	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	002.03.400802	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	002.03.400803	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
14	002.03.400804	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	002.03.400806	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	002.03.400807	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	002.03.400808	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
18	002.03.400809	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	002.03.400810	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	002.03.400812	BALAI RISET PEMULIHAN IKAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	002.03.400813	LOKA RISET BUDIDAYA BIMPUDI LAUT	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	002.03.400814	LOKA RISET WERATIASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
23	002.03.400815	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN Bioteknologi KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
24	002.03.400816	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	002.03.400817	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN KARANG	92,50	100,00	100,00	50,00	
26	002.03.400818	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMPANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	002.03.400819	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	002.03.400870	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN SUMAI (POLITE KP SUMAI)	90,00	100,00	100,00	33,35	
29	002.03.400879	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKASABAN (POLITE KP PANGKASABAN)	75,00	100,00	0,00	0,00	
30	002.03.427011	POLITERKIM AHLI USAHA PERIKANAN (POLITEK ALUP) JABAR	92,50	100,00	100,00	50,00	
31	002.03.437900	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	002.03.437970	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
33	002.03.437982	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00	
34	002.03.437618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH MAJEMBU	92,50	100,00	100,00	50,00	
35	002.03.437630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	002.03.440010	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLITE KP JEMBRANA)	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	002.03.432000	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	100,00	100,00	100,00	100,00	
38	002.03.439402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,48	100,00	87,50	71,50	
39	002.03.434140	POLITERKIM KELAUTAN DAN PERIKANAN SONOMO	75,00	100,00	0,00	0,00	
40	002.03.003880	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA ADUNG LAMPUNG	75,00	100,00	0,00	0,00	
41	002.03.003026	BALAI PENGIDUKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDU	100,00	100,00	100,00	100,00	
42	002.03.000620	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	100,00	100,00	100,00	100,00	

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) TA. 2025
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KKP
DATA PER TANGGAL 13 JANUARI 2025

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	032.33.427943	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA	95,00	100,00	50,00	100,00	
2	032.33.427951	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MESAR I	92,50	100,00	100,00	50,00	
3	032.33.427986	BALAI BESAK KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN NAKASSAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	032.33.427924	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	032.33.427948	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BATANG	97,23	96,30	100,00	100,00	
6	032.33.440007	BERBENTUK BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	94,47	100,00	87,50	71,45	
7	032.33.387433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00	
8	032.33.387433	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PEKABARU	100,00	100,00	100,00	100,00	
9	032.33.387461	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALEMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	032.33.387338	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PONTIANAK	75,00	100,00	0,00	0,00	
11	032.33.387610	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKAPAPAN	75,00	100,00	0,00	0,00	
12	032.33.387631	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO	99,83	99,77	100,00	100,00	
13	032.33.387689	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI	87,50	90,00	50,00	100,00	
14	032.33.387788	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MATANAH	100,00	100,00	100,00	100,00	
15	032.33.387813	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JEPARA	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	032.33.349381	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAMUJU	100,00	100,00	100,00	100,00	
17	032.33.349381	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN RIJANG	95,00	100,00	100,00	66,65	
18	032.33.349372	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TONKAWAN	100,00	100,00	100,00	100,00	
19	032.33.349389	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN ACEH	100,00	100,00	100,00	100,00	
20	032.33.349393	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAN JARASIN	100,00	100,00	100,00	100,00	
21	032.33.349381	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU	100,00	100,00	100,00	100,00	
22	032.33.349318	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LAMPUNG	67,48	69,03	66,67	60,25	
23	032.33.349323	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BEMONGOLU	92,50	100,00	100,00	50,00	
24	032.33.349336	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAMBANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
25	032.33.349387	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALANGKARAYA	100,00	100,00	100,00	100,00	
26	032.33.349361	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DOMASANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
27	032.33.349379	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO	100,00	100,00	100,00	100,00	
28	032.33.349381	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA B	92,51	96,68	50,00	100,00	
29	032.33.349386	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MESAR	95,00	100,00	50,00	100,00	
30	032.33.349389	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PANGKAL PINANG	100,00	100,00	100,00	100,00	
31	032.33.349384	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN HIBALUNG	100,00	100,00	100,00	100,00	
32	032.33.349371	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SORONG	93,18	90,91	100,00	100,00	
33	032.33.349388	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN POLYKARTATA	100,00	100,00	100,00	100,00	
34	032.33.349382	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN CIBINONG	92,50	100,00	100,00	50,00	
35	032.33.349388	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	100,00	100,00	100,00	100,00	
36	032.33.349387	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TYRANET	100,00	100,00	100,00	100,00	
37	032.33.362387	BALAI USA STANDBY KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	75,00	100,00	0,00	0,00	

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS
NOMOR 82/ITJ/RC.610/X/2025

Yth. : 1. Sekretaris Jenderal KKP
2. Para Dirjen lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP
Dari : Inspektur Jenderal
Lampiran : Satu Halaman
Hal : Capaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP
Tanggal : 07 Oktober 2025

Bersama ini disampaikan capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan" lingkup KKP sebagai berikut :

1. Realisasi capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU "Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP" sebesar 0,074%, realisasi tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan $\leq 0,5\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran I.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ade Tajudin Sutiawarman

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran
 Nomor : 82/ITJ/RC.610/X/2025
 Tanggal : 07 Oktober 2025

**Rincian Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
 atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024**

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074

Ade Tajudin Sutiawarman

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 2240/SJ.3/TU.210/XII/2025

Yth. : 1. Kepala Biro dan Pusat lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Rapat Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) Tahun 2025 di Lingkungan KKP
Tanggal : 24 Desember 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Monitoring Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2025, secara daring *zoom meeting*, berdasarkan undangan Kami Nomor B.5290/SJ.3/TU.330/XII/2025, tanggal 19 Desember 2025, hal Undangan Rapat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rapat di buka oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi/diwakilan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai, dengan dihadiri secara daring oleh peserta dari pengelola kepegawaian baik di unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal, unit kerja Eselon I, unit kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Agenda rapat yaitu monitoring capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025 di Lingkungan KKP, mengatasi kendala teknis dalam penginputan data kompetensi, khususnya diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis dan diklat 20 JP pada aplikasi MyASN/SIASN dan proses sinkronisasi SIASN ke dashboard IP ASN KKP, serta menetapkan batas akhir pengukuran IP ASN Tahun 2025;
3. Tim Kerja Pengelolaan Kinerja Pegawai sebagai tim kerja yang menangani pengelolaan pengukuran IP ASN di Lingkungan KKP mendapatkan hasil nilai capaian IP ASN sudah melebihi target yaitu prosentase 103% (Target 81 s.d 84), realisasi 85,41 di tanggal 22 Desember 2025, sehingga sudah cukup menjadi dasar dalam penutupan batas akhir Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan KKP Tahun 2025 di tanggal **31 Desember 2025**;
4. Sumber data IP ASN mengambil data profile, data jabatan terakhir, data pendidikan terakhir, data kompetensi (pelatihan dan kinerja), data nilai SKP, dan data hukuman disiplin dari aplikasi SIASN dan ditampilkan pada dashboard IP ASN di Portal Pegawai KKP.

Apabila terdapat kendala teknis dalam input dan updating data di SIASN serta kendala proses sinkronisasi data SIASN ke Dashboard IP ASN, dapat di koordinasikan kepada sdr. Ari Wicaksana (08129284428) dan sdr. Gigih Aji Ibrahim (087782199011).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dida Daniarsyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran

Nomor : 2240/SJ.3/TU.210/XII/2025

Tanggal : 24 Desember 2025

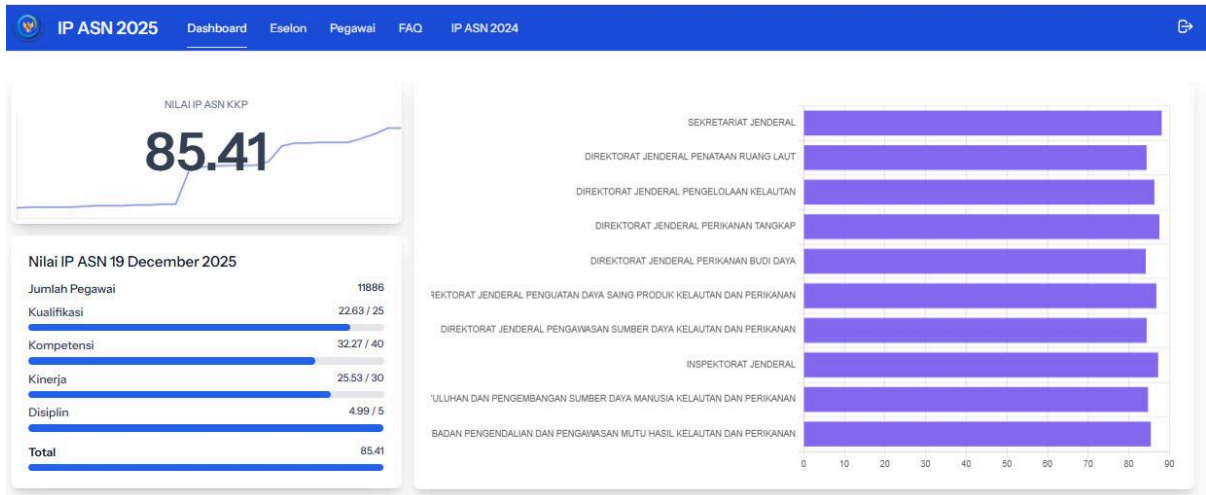
Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Instansi	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
KKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

Unit Organisasi Level I	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
SETJEN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
DJPKRL*	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPT	77	84	77	84,5	78	85	78	85,5	79	86
DJPB	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPDSPKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
DJPSPDKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
ITJEN	76	83	76	83,5	77	84	77	84,5	78	85
BPPSDMKP	74	81	74	81,5	75	82	75	82,5	76	83
BPPMHKP	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

Unit Organisasi Level II SETJEN	2025		2026		2027		2028		2029	
	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester	Semester
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
Biro Perencanaan	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Keuangan dan BMN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro SDMAO	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Hukum	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Humas dan KLN	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Biro Umum dan PBJ*	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84
Pusdatin	75	82	75	82,5	76	83	76	83,5	77	84

Capaian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Data Tanggal 22 Desember 2025



IP ASN 2025												
Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2024												
Silakan ketik Nama Unit Kerja												
Cari												
No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT JENDERAL	546	22.71	90.84 %	34.18	85.45 %	26.23	87.43 %	5	100 %	88.12	TINGGI
2	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	125	23.08	92.32 %	31.08	77.7 %	25.24	84.13 %	5	100 %	84.4	TINGGI
3	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	583	22.49	89.96 %	32.69	81.72 %	26.15	87.17 %	4.99	99.8 %	86.32	TINGGI
4	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1582	22.7	90.8 %	33.1	82.75 %	26.76	89.2 %	4.99	99.8 %	87.55	TINGGI
5	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1194	22.17	88.68 %	31.34	78.35 %	25.68	85.6 %	5	100 %	84.19	TINGGI
6	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	403	23.45	93.8 %	33.14	82.85 %	25.22	84.07 %	5	100 %	86.81	TINGGI
7	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1496	22.84	91.36 %	31.49	78.72 %	25.1	83.67 %	4.99	99.8 %	84.42	TINGGI
8	INSPEKTORAT JENDERAL	195	22.59	90.36 %	34.51	86.27 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.25	TINGGI
9	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4861	22.53	90.12 %	32.02	80.05 %	25.2	84 %	4.99	99.8 %	84.75	TINGGI
10	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	901	22.85	91.4 %	32.51	81.27 %	25.1	83.67 %	4.98	99.6 %	85.44	TINGGI

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	STAF AHLI MENTERI	2	25	100 %	25	62.5 %	27.5	91.67 %	5	100 %	82.5	TINGGI
2	PUSAT KEBUAKAN STRATEGIS	7	25	100 %	36.39	90.98 %	27.14	90.47 %	5	100 %	93.54	SANGAT TINGGI
3	BIRO PERENCANAAN	50	23.8	95.2 %	33.3	83.25 %	25.6	85.33 %	5	100 %	87.7	TINGGI
4	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	51	23.14	92.56 %	34.52	86.3 %	26.47	88.23 %	5	100 %	89.13	TINGGI
5	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI	70	21.93	87.72 %	35.95	89.88 %	27.57	91.9 %	5	100 %	90.45	TINGGI
6	BIRO HUKUM	37	23.11	92.44 %	36.49	91.22 %	29.19	97.3 %	5	100 %	93.78	SANGAT TINGGI
7	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI	56	22.68	90.72 %	31.98	79.95 %	25.98	86.6 %	5	100 %	85.64	TINGGI
8	BIRO UMUM	100	23.15	92.6 %	34.15	85.38 %	25.15	83.83 %	5	100 %	87.45	TINGGI
9	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA	76	21.78	87.12 %	35.25	88.13 %	25.39	84.63 %	5	100 %	87.42	TINGGI
10	PUSAT DATA DAN INFORMASI	81	22.22	88.88 %	32.92	82.3 %	26.23	87.43 %	5	100 %	86.38	TINGGI
11	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	16	23.44	93.76 %	32.06	80.15 %	25.62	85.4 %	5	100 %	86.12	TINGGI

Dida Daniarsyah



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/II/2026 02 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai penyesuaian atas Peraturan Menteri PAN-RB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP serta memperhatikan Surat Deputy RB Kunwas Nomor B/641/AA.05/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Poin 10 yang menyebutkan untuk mendorong peningkatan evaluasi AKIP internal unit organisasi Level II serta Surat Sekretaris BPPMHKP B.5339 / BPPMHKP.1/RC.610 /XI/2025 tanggal 18 November 2025 tentang Hasil Sementara Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penilaian Mandiri SAKIP ditujukan untuk melihat aspek Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi sebagaimana pedoman evaluasi PM SAKIP (yang dapat dilihat pada link <https://bit.ly/3K8mezW>) di seluruh unit kerja lingkup UPT BPPMHKP dalam hal meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas sehingga dapat menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.
2. Target kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Tahun 2025 sebesar **Nilai 86, Sebanyak 49 UPT (96,07%) telah memenuhi target kinerja dan sisanya 2 UPT (3,93%) belum memenuhi target kinerja karena rendahnya capaian pada komponen Perencanaan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP per Satker (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP adalah sebagai berikut :

NO	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	BKIPM MATARAM	27.6	27.6	13.8	25	94	AA
2	SEKRETARIAT BPPMHKP	27	27	13.5	22.5	90	A
3	BBKIPM MAKASSAR	27	27	13.5	22.5	90	A
4	SKIPM BANDUNG	27	27	13.05	22.5	89.55	A
5	SKIPM ACEH	27.6	27	13.5	21.25	89.35	A
6	SKIPM JAMBI	27	27	12.15	23	89.15	A
7	PUSAT MANAJEMEN MUTU	27	27	12.6	22.5	89.1	A
8	SKIPM LUWUK BANGGAI	26.1	27	13.5	22.5	89.1	A
9	BUS-PM	27.6	25.2	13.5	22.5	88.8	A
10	BKIPM MEDAN I	27	27	12.15	22.5	88.65	A
11	SKIPM PALANGKARAYA	27	27	12.6	22	88.6	A
12	BKIPM TARAKAN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
13	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	27	27	13.5	21	88.5	A
14	PUSAT MUTU PASCA PANEN	27	27	13.5	21	88.5	A
15	BKIPM BANJARMASIN	27	25.5	13.5	22.5	88.5	A
16	SKIPM CIREBON	26.1	27	12.6	22.5	88.2	A
17	SKIPM PALEMBANG	27	25.5	13.05	22.5	88.05	A
18	SKIPM PONTIANAK	27	27	12.75	21.25	88	A
19	SKIPM PEKANBARU	27	27	13.5	20.5	88	A
20	SKIPM PALU	27	27	11.4	22.5	87.9	A
21	BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
22	SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
23	SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
24	BKIPM ENTIKONG	27	25.5	13.8	21.25	87.55	A
25	BKIPM BALIKPAPAN	27	27	13.5	20	87.5	A
26	SKIPM GORONTALO	27.6	24.6	12.6	22.5	87.3	A
27	SKIPM TAHUNA	26.1	27	11.7	22.5	87.3	A
28	BKIPM AMBON	27	25.5	13.5	21.25	87.25	A
29	SKIPM SORONG	25.5	26.1	13.05	22.5	87.15	A
30	SKIPM KUPANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
31	SKIPM PANGKAL PINANG	27	27	11.85	21.25	87.1	A
32	BKIPM MANADO	27	24	13.5	22.5	87	A
33	BKIPM SEMARANG	27	24	13.5	22.5	87	A
34	SKIPM YOGYAKARTA	27	24	13.5	22.5	87	A
35	BBKIPM JAKARTA I	27	27	12.9	20	86.9	A
36	SKIPM KENDARI	27	27	10.35	22.5	86.85	A
37	SKIPM TERNATE	27	27	12.3	20.5	86.8	A
38	SKIPM BENGKULU	27	25.5	13.05	21.25	86.8	A
39	SKIPM T.J. BALAI ASAHAN	25.2	27	11.85	22.5	86.55	A
40	SKIPM BIMA	25.5	25.5	13.05	22.5	86.55	A
41	BKIPM SURABAYA I	26.1	26.1	13.05	21.25	86.5	A
42	SKIPM MERAUKE	25.5	27	12.75	21.25	86.5	A
43	BKIPM LAMPUNG	27	25.2	13.5	20.75	86.45	A
44	SKIPM BATAM	27	25.5	12.9	21	86.4	A
45	BKIPM JAKARTA II	27	27	11.25	21	86.25	A
46	SKIPM MERAK	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
47	SKIPM MAMUJU	25.5	25.5	12.75	22.5	86.25	A
48	SKIPM BAU-BAU	26.1	27	11.85	21.25	86.2	A
49	BKIPM TANJUNG PINANG	24.9	27	12.75	21.5	86.15	A
50	BKIPM DENPASAR	27	24	12.6	21	84.6	A
51	BKIPM JAYAPURA	20.7	20.7	12	15.5	68.9	B

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥86 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2025.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP, khususnya untuk 20 Satker dengan dibawah target (**≤86 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2026;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMHKP Tahun 2025 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n Kepala BPPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan.

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM PALEMBANG
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Indikator : Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Nama Timja : Dukungan Manajerial

Periode Laporan : Triwulan IV (Tahunan)

Nama Sasaran Strategis	:	Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Palembang (%)

T/R	Tahun 2025							Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	85	85	170	85	85	85	85		85
Realisasi	100	100	200	100	100	100	100	100	
%Capaian	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	

Catatan:

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan

Tw4 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025

Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
- Berdasarkan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BKIPM berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang terbit pada Triwulan I tahun 2024 s.d Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BKIPM yang menjadi objek pengawasan. - Nilai Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Lingkup BPPMHKP menggunakan nilai Eselon I BPPMHKP. - Adapun cara pengukurannya sebagai berikut : $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itien yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh Unit Kerja}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Unit Kerja}} \times 100\%$ $\frac{31}{31} \times 100\% = 100\%$

Capaian Indikator Kinerja Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Palembang pada Triwulan IV (Tahunan) yaitu sebesar 100% dari target pada Triwulan IV (tahunan) sebesar 85%, Capaian nilai Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Palembang ini diperoleh dari data Aplikasi SIDAK KKP, berdasarkan penyelesaian LHP (Laporan Hasil Pengawasan) dari Audit Kinerja Inspektorat IV Tahun 2024. Penyelesaian LHP sudah diselesaikan hingga 100%.

Akar Masalah	PenanggungJawab
Pada TW IV 2025 tidak ada permasalahan karena semua temuan dan rekomendasi sudah ditindaklanjuti.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Tindakan yang dilaksanakan	PenanggungJawab
Melakukan monitoring secara berkala minimal setiap bulan di aplikasi SIDAK Itjen KKP. Dan jika ada temuan segera melakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan oleh Irjen KKP (Pengawas Internal KKP) dan Pengawasan Eksternal Lainnya	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	PenanggungJawab
Pada TW IV 2025 setiap bulannya dilakukan monitoring aplikasi SIDAK KKP. Dan apabila ada temuan dari Inspektorat Jenderal KKP atau audit eksternal lainnya yang masuk dalam aplikasi SIDAK untuk segera di tindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan	PenanggungJawab
Pada TW IV 2025 telah dilakukan monitoring temuan pada aplikasi SIDAK KKP dengan hasil tidak ada temuan dan seluruh temuan dan rekomendasi dari TW IV 2024 sampai dengan TW IV 2025 sdh ditindaklanjuti	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial



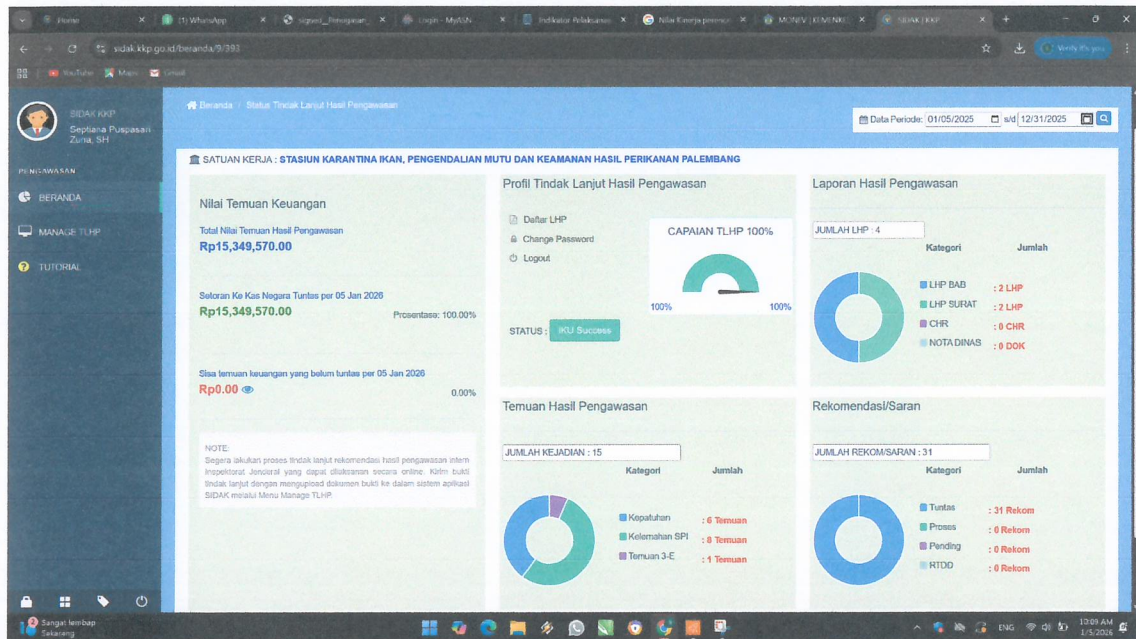
Mengetahui
Kepala Stasiun KIPM Palembang

Yoyok Florianto, SE., S. Pi., M. Si

Palembang, 07 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial

Septiana Puspasari Zuna, SH

DOKUMENTASI KEGIATAN TW IV 2025
REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA DI
STASIUN KIPM PALEMBANG



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025

Lampiran : Satu berkas

Tanggal : 13 Januari 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini memiliki 149 Satuan kerja (satker) pengelola DIPA Aktif Tahun Anggaran 2025 yang tersebar di 9 unit kerja eselon I. Seluruh satuan kerja tersebut telah melakukan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada aplikasi SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya adalah sebagai berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada aplikasi SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Saat ini telah dilakukan kompilasi dan rekapitulasi data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan pada setiap Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 4 Tahun Anggaran 2025. Sebagai informasi, sampai dengan waktu *cut off* data untuk perhitungan persentase RUP Terumumkan pada tanggal 11 Januari 2026 pukul 23:59 WIB, dan dilanjutkan dengan OLAP (*Online Analytical Processing*) dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak akses terakhir inputan data pada SIRUP selesai dilakukan oleh satuan kerja. Dari hasil perhitungan dan olah data, dapat disampaikan secara keseluruhan satuan kerja lingkup KKP telah mencapai persentase RUP Terumumkan 100,00% pada periode penilaian capaian IKU Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran 1

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

**REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM
PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 4	% Capaian Target IKU TW 4	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
01	Sekretariat Jenderal	3	357,549,859,996	448,763,141,996	91,213,282,000	Sesuai	76.00%	91.19%	Capaian Target Maksimal
02	Inspektorat Jenderal	1	3,868,642,000	3,868,642,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	3,092,504,918,600	3,092,504,918,600	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,461,299,259,718	1,461,299,259,718	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,404,052,006,574	1,404,052,006,574	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	62,082,313,281	62,082,313,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	2,377,171,057,536	2,377,171,057,536	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	208,693,653,108	208,693,653,108	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	100,936,435,522	100,936,435,522	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
TOTAL		149	9,068,158,146,335	9,159,371,428,335	91,213,282,000			99.02%	

Teguh Wibowo

Lampiran 2

Nomor : 41/SJ.7/PL.410/I/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 4 TAHUN ANGGARAN 2025 PER SATUAN KERJA

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	9,069,898,000	-	9,069,898,000			9,069,898,000	9,069,898,000	0	100.00%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	422,159,781,996	14,006,635,000	436,166,416,996			344,953,134,996	344,953,134,996	91,213,282,000	126.44%
3	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,526,827,000		3,526,827,000			3,526,827,000	3,526,827,000	0	100.00%
TOTAL		434,756,506,996	14,006,635,000	448,763,141,996	-	-		357,549,859,996	91,213,282,000	108.81%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 91.19%	

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	3,868,642,000	-	3,868,642,000			3,868,642,000	3,868,642,000	0	100.00%
TOTAL		3,868,642,000	-	3,868,642,000	-	-		3,868,642,000	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,654,763,000	450,642,000	5,105,405,000		109,857,000	4,995,548,000	5,105,405,000	0	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,500,368,000	1,726,822,000	4,227,190,000		173,053,000	4,054,137,000	4,227,190,000	0	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,299,090,000	-	6,299,090,000		208,227,000	6,090,863,000	6,299,090,000	0	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	5,026,187,000	-	5,026,187,000		216,547,000	4,809,640,000	5,026,187,000	0	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	463,513,809,000	-	463,513,809,000		457,069,402,000	6,444,407,000	463,513,809,000	0	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	4,000,680,000	-	4,000,680,000		269,268,000	3,731,412,000	4,000,680,000	0	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	3,066,333,000	-	3,066,333,000		107,070,000	2,959,263,000	3,066,333,000	0	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,391,089,000	-	4,391,089,000		686,480,000	3,704,609,000	4,391,089,000	0	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,338,592,000	-	2,338,592,000		44,900,000	2,293,692,000	2,338,592,000	0	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,160,369,582,000	-	1,160,369,582,000		1,156,224,800,000	4,144,782,000	1,160,369,582,000	0	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	3,096,535,000	-	3,096,535,000		143,086,000	2,953,449,000	3,096,535,000	0	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	2,174,331,000	2,026,728,000	4,201,059,000		149,001,000	4,052,058,000	4,201,059,000	0	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	2,103,023,000	6,400,000	2,109,423,000		7,744,000	2,101,679,000	2,109,423,000	0	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,017,529,000	2,082,335,000	3,099,864,000		201,385,000	2,898,479,000	3,099,864,000	0	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,871,854,000	-	4,871,854,000		611,181,000	4,260,673,000	4,871,854,000	0	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	3,309,753,000	51,637,000	3,361,390,000		40,946,000	3,320,444,000	3,361,390,000	0	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,956,661,000	-	2,956,661,000		56,249,000	2,900,412,000	2,956,661,000	0	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,045,920,000	2,346,994,000	5,392,914,000		444,154,000	4,948,760,000	5,392,914,000	0	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,243,950,000	31,000,000	61,274,950,000		55,630,617,000	5,644,333,000	61,274,950,000	0	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000	-	2,358,509,000		0	2,358,509,000	2,358,509,000	0	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,382,333,600	-	6,382,333,600		548,134,000	5,834,199,600	6,382,333,600	0	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	38,627,180,000	-	38,627,180,000		31,472,039,000	7,155,141,000	38,627,180,000	0	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	20,507,865,000	-	20,507,865,000		3,614,615,000	16,893,250,000	20,507,865,000	0	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,259,136,398,836	16,790,025,164	1,275,926,424,000		1,252,038,840,210	23,887,583,790	1,275,926,424,000	0	100.00%
TOTAL		3,066,992,335,436	25,512,583,164	3,092,504,918,600	-	2,960,067,595,210	132,437,323,390	3,092,504,918,600	-	100.0000%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note :		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%										
= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%										

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	14,153,419,615	118,921,000	14,272,340,615		6,523,696,615	7,748,644,000	14,272,340,615	0	100.00%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	23,779,406,000	-	23,779,406,000		18,389,599,000	5,389,807,000	23,779,406,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	14,509,226,000	1,101,106,000	15,610,332,000		11,268,723,000	4,341,609,000	15,610,332,000	0	100.00%
4	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	42,758,045,000	11,655,239,000	54,413,284,000		24,328,660,000	30,084,624,000	54,413,284,000	0	100.00%
5	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	4,388,427,000	-	4,388,427,000		1,128,953,000	3,259,474,000	4,388,427,000	0	100.00%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	17,324,561,000	7,151,046,000	24,475,607,000		5,342,752,000	19,132,855,000	24,475,607,000	0	100.00%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	10,819,324,000	976,321,000	11,795,645,000		6,766,620,000	5,029,025,000	11,795,645,000	0	100.00%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,244,294,000	-	9,244,294,000		5,564,366,000	3,679,928,000	9,244,294,000	0	100.00%
9	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	6,885,546,000	3,379,211,000	10,264,757,000		7,134,462,000	3,130,295,000	10,264,757,000	0	100.00%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	9,742,232,000	5,638,145,000	15,380,377,000		10,457,450,000	4,922,927,000	15,380,377,000	0	100.00%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	5,054,907,000	2,061,297,000	7,116,204,000		5,387,502,000	1,728,702,000	7,116,204,000	0	100.00%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	9,787,646,000	4,338,000	9,791,984,000		6,646,293,000	3,145,691,000	9,791,984,000	0	100.00%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	4,507,731,000	4,183,662,000	8,691,393,000		4,424,860,000	4,266,533,000	8,691,393,000	0	100.00%
14	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	5,293,648,000	2,703,818,000	7,997,466,000		6,797,648,000	1,199,818,000	7,997,466,000	0	100.00%
15	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	3,761,994,000	1,942,249,000	5,704,243,000		2,157,558,000	3,546,685,000	5,704,243,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	1,236,302,182,103	2,071,318,000	1,238,373,500,103		1,218,838,384,103	19,535,116,000	1,238,373,500,103	0	100.00%
TOTAL		1,418,312,588,718	42,986,671,000	1,461,299,259,718	-	1,341,157,526,718	120,141,733,000	1,461,299,259,718	-	100.00%

FORMULA PERHITUNGAN

Note :

= (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100%

= (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi

100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	29,445,819,000	-	29,445,819,000		25,192,451,000	4,253,368,000	29,445,819,000	0	100.00%
2	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	12,662,396,999	-	12,662,396,999		7,770,543,000	4,891,853,999	12,662,396,999	0	100.00%
3	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,896,368,000	-	21,896,368,000		16,792,289,000	5,104,079,000	21,896,368,000	0	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	17,612,902,000	-	17,612,902,000		13,374,397,000	4,238,505,000	17,612,902,000	0	100.00%
5	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	19,452,293,500	-	19,452,293,500		17,312,873,500	2,139,420,000	19,452,293,500	0	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	16,739,797,500	-	16,739,797,500		14,367,938,500	2,371,859,000	16,739,797,500	0	100.00%
7	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP	1,202,705,796,575	-	1,202,705,796,575		1,191,786,130,000	10,919,666,575	1,202,705,796,575	0	100.00%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	14,929,268,000	-	14,929,268,000		11,918,715,000	3,010,553,000	14,929,268,000	0	100.00%
9	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,169,047,000	-	18,169,047,000		15,535,927,000	2,633,120,000	18,169,047,000	0	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,104,332,000	-	9,104,332,000		7,403,801,000	1,700,531,000	9,104,332,000	0	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	9,355,502,000	-	9,355,502,000		7,660,581,000	1,694,921,000	9,355,502,000	0	100.00%
12	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	6,463,175,000	-	6,463,175,000		3,524,502,000	2,938,673,000	6,463,175,000	0	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	9,899,835,000	-	9,899,835,000		8,610,962,000	1,288,873,000	9,899,835,000	0	100.00%
14	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,415,150,000	-	8,415,150,000		7,097,827,000	1,317,323,000	8,415,150,000	0	100.00%
15	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	7,200,324,000	-	7,200,324,000		4,931,464,000	2,268,860,000	7,200,324,000	0	100.00%
TOTAL		1,404,052,006,574	-	1,404,052,006,574	-	1,353,280,401,000	50,771,605,574	1,404,052,006,574	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR menjadi 100.00%								

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,499,025,000	-	13,499,025,000	5,947,202,000		7,551,823,000	13,499,025,000	0	100.00%
2	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP	48,583,288,281	-	48,583,288,281	36,065,535,000		12,517,753,281	48,583,288,281	0	100.00%
TOTAL		62,082,313,281	-	62,082,313,281	42,012,737,000	-	20,069,576,281	62,082,313,281	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								
		NILAI CAPAIAN INDIKATOR 100.00%								

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	815,181,000	1,030,758,000	1,845,939,000	576,115,000		1,269,824,000	1,845,939,000	0	100.00%
2	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	2,534,284,000	-	2,534,284,000	-		2,534,284,000	2,534,284,000	0	100.00%
3	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KP	6,063,515,000	-	6,063,515,000			6,063,515,000	6,063,515,000	0	100.00%
4	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	114,882,000	-	114,882,000	-		114,882,000	114,882,000	0	100.00%
5	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	630,829,000	1,492,437,000	2,123,266,000	47,589,000		2,075,677,000	2,123,266,000	0	100.00%
6	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,716,863,000	5,714,647,000	9,431,510,000	5,753,200,000		3,678,310,000	9,431,510,000	0	100.00%
7	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	2,313,249,000	-	2,313,249,000	289,374,000		2,023,875,000	2,313,249,000	0	100.00%
8	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	2,124,597,000	-	2,124,597,000	276,203,000		1,848,394,000	2,124,597,000	0	100.00%
9	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	19,799,969,000	-	19,799,969,000	16,630,596,000		3,169,373,000	19,799,969,000	0	100.00%
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	1,453,775,000	-	1,453,775,000			1,453,775,000	1,453,775,000	0	100.00%
11	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,579,025,000	-	2,579,025,000			2,579,025,000	2,579,025,000	0	100.00%
12	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	3,697,213,000	-	3,697,213,000			3,697,213,000	3,697,213,000	0	100.00%
13	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	2,085,628,000	-	2,085,628,000			2,085,628,000	2,085,628,000	0	100.00%
14	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	7,756,209,000	197,855,000	7,954,064,000	1,611,115,000		6,342,949,000	7,954,064,000	0	100.00%
15	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	4,935,402,000	-	4,935,402,000	-		4,935,402,000	4,935,402,000	0	100.00%
16	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,514,000	-	904,514,000			904,514,000	904,514,000	0	100.00%
17	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,671,292,000	543,937,000	6,215,229,000	-		6,215,229,000	6,215,229,000	0	100.00%
18	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	219,049,000	1,237,094,000	1,456,143,000			1,456,143,000	1,456,143,000	0	100.00%
19	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBR	1,223,254,000	74,096,000	1,297,350,000			1,297,350,000	1,297,350,000	0	100.00%
20	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	442,411,000	483,225,000	925,636,000			925,636,000	925,636,000	0	100.00%
21	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,941,830,000	-	1,941,830,000			1,941,830,000	1,941,830,000	0	100.00%
22	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,035,654,000	1,053,546,000	2,089,200,000			2,089,200,000	2,089,200,000	0	100.00%
23	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	15,571,107,000	-	15,571,107,000	5,777,684,000		9,793,423,000	15,571,107,000	0	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,209,869,000	-	2,209,869,000	1,086,997,000		1,122,872,000	2,209,869,000	0	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	1,538,411,000	3,197,761,000	4,736,172,000	1,451,020,000		3,285,152,000	4,736,172,000	0	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	2,539,286,000	2,389,850,000	4,929,136,000	3,316,996,000		1,612,140,000	4,929,136,000	0	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	711,207,000	1,923,054,000	2,634,261,000	1,156,133,000		1,478,128,000	2,634,261,000	0	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	27,426,832,644	-	27,426,832,644	24,892,476,044		2,534,356,600	27,426,832,644	0	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	799,005,000	2,064,944,000	2,863,949,000	530,979,000		2,332,970,000	2,863,949,000	0	100.00%
30	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,438,446,000	-	1,438,446,000	220,898,000		1,217,548,000	1,438,446,000	0	100.00%
31	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	9,709,402,000	-	9,709,402,000	6,378,092,000		3,331,310,000	9,709,402,000	0	100.00%
32	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,966,563,000	5,209,960,000	8,176,523,000	6,240,852,000		1,935,671,000	8,176,523,000	0	100.00%
33	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7,486,312,000	-	7,486,312,000	1,860,000		7,484,452,000	7,486,312,000	0	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	1,296,505,000	-	1,296,505,000	229,198,000		1,067,307,000	1,296,505,000	0	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	910,955,000	1,088,140,000	1,999,095,000	755,610,000		1,243,485,000	1,999,095,000	0	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	2,989,553,000	16,902,000	3,006,455,000	902,105,000		2,104,350,000	3,006,455,000	0	100.00%
37	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	851,173,000	-	851,173,000			851,173,000	851,173,000	0	100.00%
38	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,049,687,000	-	1,049,687,000			1,049,687,000	1,049,687,000	0	100.00%
39	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	1,580,550,000	-	1,580,550,000	436,305,000		1,144,245,000	1,580,550,000	0	100.00%
40	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	754,234,000	1,209,683,000	1,963,917,000	507,390,000		1,456,527,000	1,963,917,000	0	100.00%
41	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KP	25,694,351,464	-	25,694,351,464	10,527,303,000		15,167,048,464	25,694,351,464	0	100.00%
42	PUSAT STANDARISASI DAN SERTIFIKASI SDM KP	183,690,000	-	183,690,000	50,650,000		133,040,000	183,690,000	0	100.00%
TOTAL		179,765,764,108	28,927,889,000	208,693,653,108	89,646,740,044	-	119,046,913,064	208,693,653,108	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
										NILAI CAPAIAN 100.00%

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAM	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERAUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%
30	STASIUN KIPM dan KHP PALANGKARAYA	1,819,998,000	-	1,819,998,000	385,950,000		1,434,048,000	1,819,998,000	0	100.00%
31	STASIUN KIPM dan KHP PALEMBANG	1,474,110,000	-	1,474,110,000	181,490,000		1,292,620,000	1,474,110,000	0	100.00%
32	STASIUN KIPM dan KHP PALU	474,690,000	-	474,690,000	61,720,000		412,970,000	474,690,000	0	100.00%
33	STASIUN KIPM dan KHP PANGKAL PINANG	1,006,732,000	-	1,006,732,000	18,000,000		988,732,000	1,006,732,000	0	100.00%
34	STASIUN KIPM dan KHP PEKANBARU	866,989,000	-	866,989,000	8,000,000		858,989,000	866,989,000	0	100.00%
35	STASIUN KIPM dan KHP PONTIANAK	2,041,312,000	-	2,041,312,000	379,255,000		1,662,057,000	2,041,312,000	0	100.00%
36	STASIUN KIPM dan KHP TERNATE	152,919,000	-	152,919,000	-		152,919,000	152,919,000	0	100.00%
37	STASIUN KIPM dan KHP YOGYAKARTA	1,341,671,000	-	1,341,671,000	105,837,000		1,235,834,000	1,341,671,000	0	100.00%
TOTAL		100,504,077,522	432,358,000	100,936,435,522	42,011,907,000	-	58,924,528,522	100,936,435,522	-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100% Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.										
									NILAI CAPAIAN 100.00%	

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	Paket RUP Terumumkan			Statistik Moner				% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	40,994,400,000	-	40,994,400,000	36,836,599,000	272,130,000	3,885,671,000	40,994,400,000	0	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	7,576,678,000	-	7,576,678,000	174,516,000	4,673,911,000	2,728,251,000	7,576,678,000	0	100.00%
3	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	27,424,390,000	-	27,424,390,000	21,447,885,000	1,027,302,000	4,949,203,000	27,424,390,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	26,488,912,000	-	26,488,912,000	19,886,050,000	3,418,731,000	3,184,131,000	26,488,912,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	16,024,348,000	-	16,024,348,000	11,832,138,000	2,225,040,000	1,967,170,000	16,024,348,000	0	100.00%
6	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	14,006,000,985	-	14,006,000,985	10,488,817,000	994,620,000	2,522,563,985	14,006,000,985	0	100.00%
7	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	7,133,555,000	-	7,133,555,000	263,002,000	3,953,616,000	2,916,937,000	7,133,555,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	33,127,842,000	-	33,127,842,000	28,419,306,000	3,247,674,000	1,460,862,000	33,127,842,000	0	100.00%
9	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	2,153,460,465,551	50,934,466,000	2,204,394,931,551	1,322,441,260,000	861,749,091,551	20,204,580,000	2,204,394,931,551	0	100.00%
TOTAL		2,326,236,591,536	50,934,466,000	2,377,171,057,536	1,451,789,573,000	881,562,115,551	43,819,368,985		-	100.00%
FORMULA PERHITUNGAN										
Note : = (Pagu Terumumkan / Pagu Pengadaan) x 100% = (Total Kolom I / Total Kolom F) x 100%		Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.								



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/II/2026 15 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Dokumen
Hal : Hasil Penilaian Pembangunan ZI Menuju
WBK/WBBM Tahun 2025

Yth. Kepala UPT Lingkup Badan PPMHKP
Di Tempat

Dalam rangka Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup UPT BPPMHKP dan Surat kami yang sebelumnya telah kami kirim dengan Nomor B. 2406/BPPMHKP.1/OT.730/VI/2025 Tanggal 5 Mei 2025 kepada 5 (lima) UPT yang dilakukan pemantauan 2 Tahunan dan Persiapan Penilaian TPI dan TPN, Surat Nomor B. 3025/BPPMHKP.1/OT.720/VII/2025 Tanggal 7 Juli 2025 kepada 42 (empat puluh dua) UPT tentang Penilaian Mandiri Eselon I terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilingkungan Badan PPMHKP Tahun 2025, serta Surat kami Nomor B.5753/BPPMHKP.1/OT.710/XII/2025 Tanggal 11 Desember 2025 kepada 47 (empat puluh tujuh) UPT tentang Pemenuhan Capaian Indikator Kinerja Utama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK UPT BPPMHKP, Tim Penilai Mandiri Eselon I lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah melaksanakan penilaian mandiri terhadap Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Tujuan Pemantauan dan Penilaian Pembangunan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 yaitu untuk:
 - a. Mengetahui perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM diseluruh Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
 - b. Sebagai tahapan proses keberlanjutan komitmen pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan dokumen pemenuhan LKE pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan memastikan bahwa indikator pembangunan Zona Integritas telah dilengkapi dengan bukti dukung memadai,
 - d. sebagai sumber data Capaian IKU Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT BPPMHKP.

2. Ruang lingkup Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM meliputi :
 - A. PENGUNGKIT (Pemenuhan dan Reform)
 - 1) Manajemen Perubahan
 - 2) Penataan Tatalaksana
 - 3) Penataan Sistem Manajemen Sdm Aparatur
 - 4) Penguatan Akuntabilitas
 - 5) Penguatan Pengawasan
 - 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - B. HASIL
 - 1) Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
 - 2) Pelayanan Publik Yang Prima
3. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM terhadap 47 UPT Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan:
 - a. 37 UPT yang memiliki target IKU Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, sebanyak 5 UPT dengan Target 75% dan 32 UPT dengan Target 70%;
 - b. Dari 37 UPT yang memiliki target IKU pembangunan Integritas, 35 UPT telah memenuhi nilai target dan 2 UPT belum memenuhi nilai target yang disebabkan pengiriman data melebihi batas waktu yang ditentukan dan proses penilaian telah selesai;
 - c. Terdapat 10 UPT yang tidak memiliki target IKU Pembangunan menuju WBK/WBBM, namun tetap dilaksanakan penilaian sebagai pemantauan komitmen UPT dalam melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang sebelumnya telah dicanangkan, dengan catatan 3 UPT tidak menyampaikan dokumen/link;
4. Hasil penilaian Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 sebagai mana terlampir dan rincian LKE serta rekomendasi perbaikan yang telah kami sampaikan ke masing-masing Unit Pelaksana Teknis dapat dipergunakan sebagai dasar pemenuhan IKU Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt.Sekretaris Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan

Woro Nur Endang Sariat

Lampiran I

Nomor : B.179/BPPMHKP.1/OT.710/I/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

Hasil Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Lingkup BPPMHKP

NO.	UNIT KERJA	TARGET NILAI	PENILAIAN MANDIRI SET BPPMHKP	KETERANGAN
1	Balai Besar KIPM Makassar	75	75.51	Target Tercapai
2	Balai KIPM Semarang	75	75.28	Target Tercapai
3	Balai KIPM Surabaya I	75	77.75	Target Tercapai
4	Balai KIPM Denpasar	75	74.45	Target Tercapai
5	Balai KIPM Manado	75	75.15	Target Tercapai
6	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I			- Tidak Ada IKU - Tidak Mengirim link/dokumen
7	BALAI KIPM MEDAN I	70	75.2	Target Tercapai
8	BALAI KIPM BALIKPAPAN	70	86.18	Target Tercapai
9	BALAI KIPM JAYAPURA	70		Tidak Mengirim link/dokumen sd Batas Waktu
10	BALAI KIPM JAKARTA II	70	75.14	Target Tercapai
11	BALAI KIPM SURABAYA II			- Tidak Ada IKU - Tidak Mengirim link/dokumen
12	BALAI KIPM MATARAM	70	86.98	Target Tercapai
13	BALAI KIPM BANJARMASIN	70	76.04	Target Tercapai
14	BALAI KIPM LAMPUNG	70		Tidak Mengirim link/dokumen sd Batas Waktu
15	BALAI KIPM AMBON	70	83.13	Target Tercapai
16	BALAI KIPM ENTIKONG		51.79	Tidak Ada IKU
17	BALAI KIPM TANJUNG PINANG	70	70.06	Target Tercapai
18	BALAI KIPM TARAKAN	70	70.03	Target Tercapai
19	STASIUN KIPM PALEMBANG	70	79.81	Target Tercapai
20	STASIUN KIPM BANDUNG		82.34	Tidak Ada IKU
21	STASIUN KIPM MERAUKE	70	75.94	Target Tercapai
22	STASIUN KIPM PONTIANAK	70	76.46	Target Tercapai
23	STASIUN KIPM KENDARI	70	75.95	Target Tercapai
24	STASIUN KIPM BATAM	70	78.17	Target Tercapai
25	STASIUN KIPM PADANG	70	80.86	Target Tercapai
26	STASIUN KIPM JAMBI	70	82.02	Target Tercapai
27	STASIUN KIPM PALU	70	71.08	Target Tercapai
28	STASIUN KIPM PALANGKARAYA	70	71.21	Target Tercapai
29	STASIUN KIPM KUPANG	70	70.04	Target Tercapai
30	STASIUN KIPM PANGKAL PINANG	70	80,8	Target Tercapai
31	STASIUN KIPM TERNATE	70	77.36	Target Tercapai
32	STASIUN KIPM YOGYAKARTA	70	83.03	Target Tercapai
33	STASIUN KIPM ACEH	70	86.03	Target Tercapai
34	STASIUN KIPM GORONTALO	70	75.61	Target Tercapai
35	STASIUN KIPM PEKANBARU	70	70.74	Target Tercapai
36	STASIUN KIPM MEDAN II		75.42	Tidak Ada IKU
37	STASIUN KIPM SORONG	70	70.21	Target Tercapai
38	STASIUN KIPM BENGKULU	70	70.03	Target Tercapai
39	STASIUN KIPM CIREBON	70	83.05	Target Tercapai
40	STASIUN KIPM LUWUK BANGGAI		38.25	Tidak Ada IKU
41	STASIUN KIPM TANJUNG BALAI ASAHAN		56.67	Tidak Ada IKU
42	STASIUN KIPM BIMA		75.32	Tidak Ada IKU
43	STASIUN KIPM TAHUNA			- Tidak Ada IKU - Tidak Mengirim link/dokumen
44	STASIUN KIPM BAU-BAU		75.68	Tidak Ada IKU
45	STASIUN KIPM MERAK	70	77.75	Target Tercapai
46	STASIUN KIPM MAMUJU	70	71.88	Target Tercapai
47	BALAI UJI STANDAR KIPM	70	73.39	Target Tercapai



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026 12 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP).

Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 adalah 88, sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 masing-masing UPT lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah beberapa catatan dari hasil validasi nilai SKM:

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh UPP BPPMHKP pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah **95,88** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,84** dan mutu pelayanan diperoleh **"A"** kategori **"Sangat Baik"**. Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.766 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah UPP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori sangat baik tercatat sebanyak 48 (empat puluh delapan) atau seluruhh UPP. Kemudian UPT Stasiun KIPM Batam, Stasiun KIPM Palu, dan Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan memperoleh nilai SKM tertinggi. Adapun tiga UPT dengan nilai SKM terendah adalah Stasiun KIPM Gorontalo, Stasiun KIPM Bengkulu, dan Stasiun KIPM Palangkaraya.

3. Hasil SKM berdasarkan jenis layanan berdasarkan rekap per unsur layanan dari 13 layanan terdapat 11 layanan mendapatkan kategori “Sangat Baik” dan 2 layanan mendapatkan kategori “Baik” yaitu Sertifikat keikutsertaan dan final report (Uji Profisiensi) (87,50) dan Bahan acuan yang disertai dengan Certificate of Analysis (CoA) (87,61).
4. Rekapitulasi per unsur pada setiap jenis layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur	Nilai
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	96,36
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,02
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	95,99
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,02
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,06
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	95,31
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	95,51
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,14
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	95,49

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U9 (Sarana dan Prasarana) dan U7 (Perilaku Pelaksana).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala UPT untuk dapat memberikan perhatian lebih pada jenis layanan yang mempunyai nilai rendah dan unsur dengan nilai terendah dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh UPP masing-masing.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala UPT dan Tim Pelayanan Publik BPPMHKP se-Indonesia. Pencapaian nilai SKM tertinggi di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan buah sinergi dan kerja keras kolektif saudara sebagai garda terdepan. Layanan transparan, cepat, dan profesional yang konsisten dijalankan telah berhasil memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi kita. Terima kasih atas dedikasi luar biasa Bapak/Ibu dalam menjaga marwah pelayanan publik BPPMHKP.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran Surat Dinas

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026

Tanggal : 12 Januari 2025

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP
5. Plt. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Plt. Sekretaris Badan Pengendalian
dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan,

Woro Nur Endang Sariati

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	UPP	NILAI PER-UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	INDEKS SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun KIPM Batam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	18	Online
2	Stasiun KIPM Palu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	22	Online
3	Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4,00	A	Sangat Baik	9	Online
4	Stasiun KIPM Ternate	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,94	4,00	A	Sangat Baik	48	Online
5	Stasiun KIPM Pekanbaru	99,73	99,73	99,80	99,60	99,73	99,73	99,66	99,80	99,80	99,73	3,99	A	Sangat Baik	373	Online
6	Balai KIPM Tarakan	99,39	100,00	100,00	99,39	99,39	99,39	100,00	100,00	99,39	99,66	3,99	A	Sangat Baik	41	Online
7	Balai KIPM Banjarmasin	99,53	99,53	99,21	99,53	99,84	99,53	99,69	99,84	99,84	99,62	3,98	A	Sangat Baik	159	Online
8	Stasiun KIPM Merauke	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	95,83	100,00	100,00	100,00	99,54	3,98	A	Sangat Baik	6	Online
9	Balai KIPM Ambon	98,61	98,89	98,89	99,17	99,17	98,33	99,17	99,44	98,89	98,95	3,96	A	Sangat Baik	90	Online
10	Balai KIPM Mataram	98,61	99,07	99,07	98,61	99,07	98,61	97,69	98,15	98,61	98,61	3,94	A	Sangat Baik	54	Online
11	Balai Besar KIPM Makassar	98,60	98,55	98,32	98,32	98,43	98,27	98,32	98,49	98,32	98,40	3,94	A	Sangat Baik	447	Online
12	Balai KIPM Tanjung Pinang	99,01	97,52	98,51	99,34	97,35	97,85	97,19	99,34	98,68	98,31	3,93	A	Sangat Baik	151	Online

13	Stasiun KIPM Kendari	97,73	98,48	97,73	97,73	97,73	97,73	98,48	97,73	99,24	98,06	3,92	A	Sangat Baik	33	Online
14	Stasiun KIPM Pontianak	100,00	100,00	100,00	99,59	100,00	95,90	95,49	95,49	95,08	97,95	3,92	A	Sangat Baik	61	Online
15	Pusat Manajemen Mutu	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	3,92	A	Sangat Baik	8	Online
16	Balai KIPM Entikong	98,17	97,87	97,87	98,78	96,95	96,95	97,26	98,17	97,26	97,70	3,91	A	Sangat Baik	82	Online
17	Balai KIPM Jayapura	97,92	93,75	100,00	97,92	100,00	100,00	95,83	97,92	95,83	97,69	3,91	A	Sangat Baik	12	Online
18	Stasiun KIPM Merak	97,92	96,53	97,22	97,92	97,92	97,92	97,22	97,92	97,22	97,53	3,90	A	Sangat Baik	36	Online
19	Stasiun KIPM Bima	96,15	100,00	96,15	98,08	98,08	98,08	96,15	98,08	96,15	97,44	3,90	A	Sangat Baik	13	Online
20	Stasiun KIPM Tahuna	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	97,22	3,89	A	Sangat Baik	9	Online
21	Stasiun KIPM Pangkal Pinang	97,31	97,04	97,04	97,04	97,04	97,04	96,77	97,85	97,58	97,19	3,89	A	Sangat Baik	93	Online
22	Stasiun KIPM Luwuk Banggai	98,17	96,34	96,95	95,73	97,56	96,95	97,56	98,17	96,34	97,09	3,88	A	Sangat Baik	41	Online
23	Stasiun KIPM Sorong	93,42	95,39	95,39	94,74	97,37	99,34	100,00	99,34	98,68	97,08	3,88	A	Sangat Baik	38	Online
24	Balai KIPM Denpasar	96,60	96,25	96,74	96,88	96,60	95,96	96,25	96,46	96,67	96,49	3,86	A	Sangat Baik	353	Online
25	Balai KIPM Surabaya II	97,75	97,50	96,75	97,75	97,50	96,50	97,25	97,00	90,00	96,44	3,86	A	Sangat Baik	100	Online
26	Stasiun KIPM Aceh	98,44	96,88	96,88	93,75	95,31	96,88	95,31	98,44	95,31	96,35	3,85	A	Sangat Baik	16	Online
27	Balai KIPM Jakarta II	96,63	97,12	96,63	96,15	96,15	95,19	96,15	96,15	95,19	96,15	3,85	A	Sangat Baik	52	Online

28	Balai KIPM Balikpapan	95,40	95,40	97,00	95,00	96,20	92,80	94,60	97,20	97,00	95,62	3,82	A	Sangat Baik	125	Online
29	Stasiun KIPM Bau-Bau	95,97	97,58	95,16	94,35	94,35	93,55	95,97	93,55	94,35	94,98	3,80	A	Sangat Baik	31	Online
30	Stasiun KIPM Jambi	96,25	91,25	95,00	97,50	95,00	92,50	94,38	95,63	95,63	94,79	3,79	A	Sangat Baik	40	Online
31	Stasiun KIPM Mamuju	94,44	94,44	94,44	97,22	94,44	91,67	91,67	94,44	94,44	94,14	3,77	A	Sangat Baik	9	Online
32	Stasiun KIPM Medan II	95,59	94,75	93,91	94,12	93,49	93,91	93,28	93,70	93,28	94,00	3,76	A	Sangat Baik	119	Online
33	Stasiun KIPM Padang	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	87,50	93,52	3,74	A	Sangat Baik	6	Online
34	Stasiun KIPM Yogyakarta	95,59	94,85	89,71	93,38	94,85	92,65	92,65	94,12	93,38	93,46	3,74	A	Sangat Baik	34	Online
35	Stasiun KIPM Palembang	96,00	96,00	92,00	94,00	91,00	89,00	94,00	95,00	94,00	93,44	3,74	A	Sangat Baik	25	Online
36	Balai KIPM Medan I	95,10	96,08	94,12	93,63	95,10	93,14	94,12	92,65	85,29	93,25	3,73	A	Sangat Baik	51	Online
37	Stasiun KIPM Bandung	94,35	93,55	91,94	92,74	93,55	93,55	91,13	92,74	91,94	92,83	3,71	A	Sangat Baik	31	Online
38	Balai KIPM Semarang	94,21	91,05	93,16	94,74	94,47	88,68	88,68	93,16	92,11	92,25	3,69	A	Sangat Baik	95	Online
39	Balai KIPM Manado	91,30	91,85	91,30	92,39	92,93	91,30	92,93	94,02	91,30	92,15	3,69	A	Sangat Baik	46	Online
40	Balai KIPM Lampung	93,18	93,18	93,18	89,39	91,67	93,18	90,91	94,70	89,39	92,09	3,68	A	Sangat Baik	33	Online
41	Stasiun KIPM Kupang	91,31	91,31	91,49	90,43	91,67	91,31	91,13	91,67	92,20	91,39	3,66	A	Sangat Baik	141	Online
42	Balai Besar KIPM Jakarta I	91,67	91,44	91,44	90,28	91,90	90,74	90,97	90,51	91,20	91,13	3,65	A	Sangat Baik	108	Online

43	Stasiun KIPM Cirebon	91,79	91,60	91,03	91,79	90,65	90,08	89,69	90,84	90,27	90,86	3,63	A	Sangat Baik	131	Online
44	Balai Uji Standar KIPM	91,03	91,03	90,76	91,03	90,49	88,86	90,49	90,22	88,86	90,31	3,61	A	Sangat Baik	92	Online
45	Balai KIPM Surabaya I	92,31	90,60	90,17	91,67	90,38	88,25	89,10	90,81	89,32	90,29	3,61	A	Sangat Baik	117	Online
46	Stasiun KIPM Bengkulu	90,97	90,28	89,58	87,50	90,97	90,28	89,58	91,67	89,58	90,05	3,60	A	Sangat Baik	36	Online
47	Stasiun KIPM Palangkaraya	91,67	90,48	90,48	87,50	88,69	85,12	86,90	88,69	88,69	88,69	3,55	A	Sangat Baik	42	Online
48	Stasiun KIPM Gorontalo	88,48	88,20	88,20	88,20	88,48	88,76	88,20	88,20	88,20	88,33	3,53	A	Sangat Baik	89	Online

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	NILAI RATA-RATA UNSUR LAYANAN									NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9			
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	6	95,83	95,83	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	95,83	91,67	93,52	A	Sangat Baik
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2506	97,39	97,25	97,40	97,37	97,29	96,69	96,80	97,33	96,93	97,16	A	Sangat Baik
3	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	15	96,67	95,00	96,67	93,33	93,33	96,67	93,33	96,67	91,67	94,81	A	Sangat Baik
4	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	129	97,29	97,29	95,93	96,32	96,90	96,71	97,48	97,29	96,32	96,83	A	Sangat Baik
5	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)	258	95,54	94,38	93,99	93,90	94,28	92,83	93,99	95,06	94,19	94,24	A	Sangat Baik
6	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	121	94,21	93,18	92,77	93,39	92,77	91,94	91,74	93,18	92,56	92,86	A	Sangat Baik
7	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (<i>approval number</i>)	8	100,00	96,88	96,88	96,88	96,88	96,88	100,00	96,88	100,00	97,92	A	Sangat Baik
8	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	398	93,72	93,53	92,78	93,03	93,09	92,15	92,15	93,15	91,65	92,80	A	Sangat Baik
9	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	250	92,60	91,40	91,80	92,00	92,70	91,40	91,30	92,20	91,10	91,83	A	Sangat Baik
10	Bahan acuan yang disertai dengan <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	13	88,46	86,54	88,46	88,46	86,54	86,54	88,46	88,46	86,54	87,61	B	Baik
11	Sertifikat keikutsertaan dan <i>final report</i>	12	91,67	89,58	89,58	85,42	89,58	85,42	89,58	83,33	83,33	87,50	B	Baik
12	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	47	94,15	93,09	93,62	94,15	94,68	92,02	93,09	94,15	94,15	93,68	A	Sangat Baik

13	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	91,67	99,07	A	Sangat Baik
Seluruh Layanan BPPMHKP		3766	96,36	96,02	95,99	96,02	96,06	95,31	95,51	96,14	95,49	95,88	A	Sangat Baik